



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN INDEKS
KEPUASAN LAYANAN
INFRASTRUKTUR (IKLI)
KABUPATEN GRESIK

2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, dimana karena-Nya kami bisa menyelesaikan Laporan Akhir untuk **Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik** tahun 2024 tepat pada waktunya. Dimana Laporan Akhir ini merupakan produk akhir dari rangkaian kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik Tahun 2024, dengan demikian laporan ini merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari produk-produk sebelumnya.

Secara garis besar Laporan Akhir ini berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran umum, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi.

Penyusun sadar laporan ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu, penyusun selalu menerima saran dan masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan akhir. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN	I-2
1.2.1 Maksud.....	I-2
1.2.2 Tujuan.....	I-2
1.2.3 Sasaran	I-3
1.3 RUANG LINGKUP	I-3
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah	I-3
1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan	I-3
1.4 DASAR HUKUM	I-4
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	I-5
BAB II TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN.....	II-1
2.1 PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK.....	II-1
2.2 PENGERTIAN INFRASTRUKTUR.....	II-2
2.3 JENIS INFRASTRUKTUR	II-3
2.4 INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR.....	II-5
2.4.1 Teori Kepuasan Masyarakat.....	II-5
2.4.2 Layanan Infrastruktur.....	II-6
2.4.3 Indikator Layanan Infrastruktur	II-9
2.5 TINJAUAN KEBIJAKAN.....	II-10
2.5.1 RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024	II-10
2.5.2 RTRW PROVINSI JAWA TIMUR.....	II-12
2.5.3 RPJMD KABUPATEN GRESIK.....	II-14

LAPORAN AKHIR

2.5.4 RTRW KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010-2040	II-15
---	-------

BAB III GAMBARAN UMUM III-1

3.1 KARAKTERISTIK FISIK DASAR	III-1
3.1.1 Administrasi Dan Geografi	III-1
3.1.2 Topografi Dan Kelerengan	III-2
3.1.3 Klimatologi	III-3
3.1.4 Geologi	III-4
3.1.5 Hidrologi.....	III-4
3.1.6 Penggunaan Lahan	III-5
3.2 KARAKTERISTIK KEPENDUDUKAN.....	III-7
3.2.1 Jumlah Penduduk.....	III-7
3.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	III-8
3.2.3 Kepadatan Penduduk.....	III-9
3.2.4 Struktur Pendidikan	III-10
3.2.5 Mata Pencarian Dan Struktur Pekerjaan	III-10
3.2.6 Kondisi Sosial Dan Budaya Masyarakat	III-12
3.3 KONDISI INFRASTRUKTUR KABUPATEN GRESIK.....	III-13
3.3.1 KONDISI SARANA.....	III-13
3.3.1.1 Sarana Pendidikan.....	III-13
3.3.1.2 Sarana Kesehatan.....	III-14
3.3.1.3 Sarana Peribadatan	III-15
3.3.1.4 Ruang Terbuka dan Olahraga.....	III-16
3.3.2 KONDISI PRASARANA	III-17
3.3.2.1 Jaringan Jalan dan Jembatan	III-17
3.3.2.2 Transportasi Publik.....	III-19
3.3.2.3 Jaringan Air Bersih.....	III-21
3.3.2.4 Jaringan Irigasi.....	III-24
3.3.3.5 Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	III-25
3.3.3.6 Ruang Publik.....	III-30

BAB IV METODOLOGI IV-1

LAPORAN AKHIR

4.1	PENDEKATAN PENYUSUNAN	IV-1
4.2	METODE PENGUMPULAN DATA.....	IV-2
4.2.1	Data Primer	IV-2
4.2.2	Data Sekunder	IV-3
4.3	VARIABEL	IV-5
4.4	METODE PENGAMBILAN SAMPEL	IV-6
4.5	TAHAP ANALISIS	IV-7
4.5.1	Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	IV-7
4.5.2	Analisis Akar Masalah	IV-8
4.5.3	Analisis SWOT.....	IV-9

BAB V HASIL ANALISIS V-1

5.1	KARAKTERISTIK RESPONDEN	V-2
5.1.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	V-3
5.1.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	V-3
5.1.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	V-4
5.1.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian	V-5
5.1.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi	V-6
5.2	ANALISIS INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IKLI)	V-8
5.2.1	Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	V-8
5.2.2	Infrastruktur Transportasi Darat.....	V-11
5.2.3	Infrastruktur Air Bersih	V-15
5.2.4	Infrastruktur Jaringan Irigasi	V-19
5.2.5	Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman	V-21
5.2.6	Infrastruktur Ruang Publik	V-25
5.2.7	Analisis Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik	V-29
5.3	ANALISIS AKAR MASALAH	V-33
5.4	ANALISIS SWOT.....	V-35
5.5	ANALISIS IFAS-EFAS	V-40
5.6	KONSEP DASAR	V-45
5.7	KONSEP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR.....	V-55
5.7.1	Infrastruktur Jalan Dan Jembatan.....	V-55

LAPORAN AKHIR

5.7.2 Infrastruktur Transportasi Darat	V-57
5.7.3 Infrastruktur Air Bersih	V-58
5.7.4 Infrastruktur Jaringan Irigasi	V-61
5.7.5 Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman	V-62
5.7.6 Infrastruktur Ruang Publik	V-66
 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	VI-1
6.1 KESIMPULAN.....	VI-1
6.2 REKOMENDASI.....	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Presentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Pada Kabupaten Gresik	III-2
Gambar 3. 2	Persentase Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik	III-6
Gambar 3. 3	Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik	III-8
Gambar 4. 1	Diagram Analisis Akar Masalah	IV-9
Gambar 4. 2	Matrik IFAS-EFAS	IV-12
Gambar 5. 1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	V-3
Gambar 5. 2	Karakteristik Berdasarkan Kelompok Usia	V-4
Gambar 5. 3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	V-5
Gambar 5. 4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	V-6
Gambar 5. 5	Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi	V-8
Gambar 5. 6	Radar Nett Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan dan Harapan Jalan dan Jembatan	V-10
Gambar 5. 7	Radar Nett Indeks Kepuasan dan Harapan Jalan dan Jembatan	V-11
Gambar 5. 8	Radar Nett Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan dan Harapan Transportasi Darat	V-14
Gambar 5. 9	Radar Nett Indeks Kepuasan dan Harapan Transportasi Darat	V-15
Gambar 5. 10	Radar Nett Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan dan Harapan Air Bersih	V-17
Gambar 5. 11	Radar Nett Indeks Kepuasan dan Harapan Air Bersih	V-18
Gambar 5. 12	Radar Nett Indeks Kepuasan dan Harapan Jalan dan Jembatan	V-20
Gambar 5. 13	Radar Nett Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan dan Harapan Perumahan dan Kawasan Permukiman	V-23
Gambar 5. 14	Radar Nett Indeks Kepuasan dan Harapan Perumahan dan Kawasan Permukiman	V-25
Gambar 5. 15	Radar Nett Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan dan Harapan Ruang Publik	V-27
Gambar 5. 16	Perbandingan Nilai Rata-Rata Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024 ...	V-32
Gambar 5. 17	Analisis Akar Masalah Kabupaten Gresik	V-34

LAPORAN AKHIR

Gambar 5. 18 Matriks SWOT	V-36
Gambar 5. 19 Kuadran IFAS EFAS Kabupaten Gresik.....	V-45
Gambar 5. 20 Konsep Kota Berkelanjutan	V-47
Gambar 5. 21 Konsep Smart City	V-49
Gambar 5. 22 Konsep Smart City	V-52
Gambar 5. 23 Komponen Smart City	V-53
Gambar 5. 24 Program Penanganan Jalan.....	V-57
Gambar 5. 25 Penyelenggaraan SPAM	V-59
Gambar 5. 26 Skema Pengembangan SPAM	V-60
Gambar 5. 27 Skema Pembiayaan SPAM.....	V-61
Gambar 5. 28 Konsep Dasar Pengelolaan Sampah.....	V-64
Gambar 5. 29 Konsep Pengembangan Jaringan Drainase	V-66

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik.....	III-1
Tabel 3. 2	Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Pada Kabupaten Gresik.....	III-3
Tabel 3. 3	Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik.....	III-5
Tabel 3. 4	Distribusi Luas dan Persentase Pola Ruang Kabupaten Gresik	III-6
Tabel 3. 5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gresik	III-7
Tabel 3. 6	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023 .	III-8
Tabel 3. 7	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Gresik.....	III-9
Tabel 3. 8	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gresik Tahun 2023.....	III-10
Tabel 3. 9	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Dalam Pekerjaan Utama di Kabupaten Gresik Tahun 2023	III-11
Tabel 3. 10	Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2023	III-13
Tabel 3. 11	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023	III-14
Tabel 3. 12	Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023	III-15
Tabel 3. 13	Jumlah Sarana Olahraga di Kabupaten Gresik Tahun 2023	III-16
Tabel 3. 14	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik (Km)	III-18
Tabel 3. 15	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2021 - 2023	III-19
Tabel 3. 16	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022	III-19
Tabel 3. 17	Jumlah Kendaraan yang Masuk Terminal Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2023	III-19
Tabel 3. 18	Ekspor Kabupaten Gresik di Pelabuhan Gresik Tahun 2017-2023.....	III-20
Tabel 3. 19	Impor Kabupaten Gresik di Pelabuhan Gresik Tahun 2017-2023.....	III-21
Tabel 3. 20	Jumlah Pelanggan Air Bersih Menurut Kecamatan di Cabang PDAM Area Pelayanan Gresik Tahun 2023	III-22
Tabel 3. 21	Jumlah Penduduk Area Pelayanan dan Jumlah Penduduk terlayani PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2019	III-23

LAPORAN AKHIR

Tabel 3. 22	Luas Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Gresik dari Tahun 2014-2017.....	III-24
Tabel 3. 23	Jumlah dan Kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kabupaten Gresik tahun 2023	III-25
Tabel 3. 24	Presentase Tempat Penyaluran Akhir Tinja	III-26
Tabel 3. 25	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Cabang PLN Area Pelayanan Gresik Tahun 2023.....	III-28
Tabel 3. 26	Panjang dan catchment area Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan di Kabupaten Gresik	III-29
Tabel 3. 27	Data Luas RTH Kabupaten Gresik Sampai Dengan Januari 2017	III-31
Tabel 4. 1	Form Survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik	IV-3
Tabel 4. 2	Kebutuhan Data Sekunder dan Instansi Yang Terkait	IV-4
Tabel 4. 3	Variabel Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik.....	IV-5
Tabel 4. 4	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan	IV-8
Tabel 5. 1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	V-3
Tabel 5. 2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	V-4
Tabel 5. 3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	V-5
Tabel 5. 4	Karakteristik Responden Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian	V-6
Tabel 5. 5	Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi	V-7
Tabel 5. 6	Indeks Kepuasan dan Harapan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Jenisnya	V-10
Tabel 5. 7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi Darat.....	V-12
Tabel 5. 8	Indeks Kepuasan dan Harapan Layanan Infrastruktur Transportasi Darat Berdasarkan Jenisnya	V-14
Tabel 5. 9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Air Bersih	V-16
Tabel 5. 10	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman ..	V-22
Tabel 5. 11	Indeks Kepuasan dan Harapan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Jenisnya	V-24
Tabel 5. 12	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Ruang Publik.....	V-26

LAPORAN AKHIR

Tabel 5. 13 Indeks Kepuasan dan Harapan Layanan Infrastruktur Ruang Publik Berdasarkan

Jenisnya V-28

Tabel 5. 14 Analisis Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik..... V-29

Tabel 5. 15 Perbandingan IKLI Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024 V-31

Tabel 5. 16 Matriks SWOT Infrastruktur Kabupaten Gresik V-37

Tabel 5. 17 Analisis SWOT Infrastruktur Kabupaten Gresik V-38

Tabel 5. 18 Matriks Analisis IFAS Infrastruktur Kabupaten Gresik V-43

Tabel 5. 19 Matriks Analisis EFAS Infrastruktur Kabupaten Gresik V-44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi serta dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dimana memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang.

Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah, infrastruktur memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial seperti penolakan dari masyarakat terhadap infrastruktur yang telah terbangun. Selain itu, keberadaan infrastruktur juga sangat diperlukan agar proses pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Proses pembangunan yang disertai dengan perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan adanya pendekatan yang benar-benar tepat dalam program pengembangan SDM.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas agenda pembangunan Kabupaten Gresik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang menempatkan sektor infrastruktur sebagai salah satu misi pembangunan yang mendapat prioritas untuk dibenahi dalam 5 tahun ke depan.

Tantangan pembangunan dan penyediaan infrastuktur oleh Pemerintah Daerah yang cukup berat serta tingginya harapan masyarakat akan pelayanan infrastruktur yang

LAPORAN AKHIR

berkualitas maka salah satu upaya yang harus dilakukan melakukan evaluasi penilaian kinerja berdasarkan persepsi masyarakat pengguna infrastruktur. Evaluasi ini berguna untuk perbaikan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Gresik.

Metode evaluasi yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada masyarakat pengguna layanan infrastruktur. Survey Kepuasan Masyarakat ini untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) atas pelayanan infrastruktur yang diberikan. Hal ini juga tidak lain karena tuntutan akan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma *rule government* yang bergeser menjadi *paradigma good governance* dimana dalam memberikan pelayanan publik berorientasi harus pada kepuasan masyarakat.

Melalui pengukuran kepuasan masyarakat ini maka upaya untuk mewujudkan *good local governance* dan misi Kabupaten Gresik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah akan dapat dicapai karena adanya evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan kinerja layanan infrastruktur secara terus menerus.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud dari pekerjaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Gresik adalah untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) melalui survey persepsi masyarakat terhadap penyediaan layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari pekerjaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Gresik ini adalah :

1. Menganalisa unsur-unsur pelayanan infrastruktur yang dapat memberikan kepuasan masyarakat.
2. Menganalisa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan tingkat kesenjangan antara kualitas dan harapan masyarakat akan pelayanan infrastruktur.

LAPORAN AKHIR

3. Merumuskan prioritas peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan infrastruktur di Kabupaten Gresik.

1.2.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan infrastruktur dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan infrastruktur oleh pemerintah.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur.
3. Sebagai bahan dalam menetapkan indikator kinerja layanan infrastruktur dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik.

1.3 RUANG LINGKUP**1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah dalam penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik adalah di wilayah **Kabupaten Gresik**.

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang ditetapkan dalam penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik antara lain:

1. Pengambilan data-data sekunder berupa data-data kondisi ekonomi dan infrastruktur di Kabupaten Gresik.
2. Pengambilan data primer berupa observasi dan wawancara terhadap kondisi ekonomi dan infrastruktur di Kabupaten Gresik.
3. Melakukan analisis terkait tingkat kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik.
4. Menyediakan rekomendasi strategi untuk meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur di Kabupaten Gresik.

LAPORAN AKHIR**1.4 DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Gresik antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Umum;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.

LAPORAN AKHIR**1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika dari pekerjaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Gresik ini disusun berdasarkan pokok bahasan dari rencana penyelesaian pekerjaan yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang diadakannya pekerjaan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Gresik, yang meliputi:

1. Latar belakang
2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
3. Ruang Lingkup kegiatan
4. Sistematika Pembahasan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 yaitu tinjauan pustaka berisi tentang segala teori yang mendukung dalam proses penyusunan laporan dan berisikan tinjauan kebijakan yang menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan di Kabupaten Gresik.

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab 3 yaitu Gambaran umum wilayah studi merupakan bab yang menjelaskan mengenai kondisi eksisting wilayah perencanaan, yaitu Kabupaten Gresik.

BAB 4 METODOLOGI

Bab 4 berisikan metode-metode yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data pada kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik.

BAB 5 ANALISIS

Bab 5 berisikan hasil analisis yang digunakan dalam Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Gresik. Analisis yang digunakan meliputi Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Analisis Akar Masalah, Analisis SWOT dan IFAS EFAS.

BAB 6 REKOMENDASI

Bab 6 berisikan rekomendasi, konsep dasar, rencana-rencana atau strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik.

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

2.1 PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari pengertian tersebut, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebagai pemegang monopoli layanan. Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan) dan pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan. Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan. Unsur kepuasan pelanggan seharusnya menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah). Pemerintah menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk

LAPORAN AKHIR

memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah. Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, memberikan arah terjadinya perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma *rule government* bergeser menjadi paradigma *good governance*.

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dapat diukur dari aspek proses dan output pelayanan. Karena tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan penggunaanya, maka penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna layanannya untuk memastikan pelayanannya tepat guna dan tepat sasaran.

2.2 PENGERTIAN INFRASTRUKTUR

Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat

LAPORAN AKHIR

terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur keairan, energi, serta bangunan dan struktur membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.

2.3 JENIS INFRASTRUKTUR

Menurut Kenastri (2007), infrastruktur Pekerjaan Umum di Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu :

A. Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur yang paling berperan dalam perekonomian nasional. Besarnya mobilitas ekonomi tahun 2002 yang melalui jaringan jalan nasional dan provinsi rata-rata perhari dapat mencapai sekitar 201 juta kendaraan-kilometer (Bappenas, 2003, dikutip oleh Kenastri, 2007). Hal ini belum termasuk mobilitas ekonomi yang mempergunakan jaringan jalan kabupaten sepanjang 240 ribu kilometer serta jaringan jalan desa. Artinya adalah infrastruktur jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional.

B. Infrastruktur Pengairan

Pada umumnya pembangunan infrastruktur sumberdaya air tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan pembangunan sektor-sektor lainnya karena infrastruktur merupakan penunjang atau pendukung pembangunan sektor-sektor tersebut. Pembangunan infrastruktur sumberdaya air banyak memberikan dukungan yang besar antara lain untuk pembangunan pertanian, perkebunan, pengendalian banjir, penyediaan air baku perkotaan dan industri, serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

LAPORAN AKHIR

C. Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk di dunia ini. Kebutuhan akan air oleh manusia menyangkut dua hal, yaitu air untuk kehidupan kita sebagai makhluk hayati dan air untuk kehidupan kita sebagai manusia yang berbudaya (Otto Soemarwoto, dikutip oleh Kenastri, 2007). Kebutuhan air untuk memenuhi kehidupan hayati secara langsung diperlukan dalam produksi bahan makanan kita, seperti untuk tanaman padi, sayur-sayuran, holtikultura, kehidupan ikan, ternak dan sebagainya. Selain itu, air diperlukan oleh industri baik untuk proses pendinginan mesin dan pengangkutan limbah. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya memerlukan air untuk keperluan mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya.

Oleh karena itu, permasalahan air dan penyehatan lingkungan (sanitation) harus menjadi perhatian, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Ketersediaan air minum yang semakin terbatas dan langka (scarcity) menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia belum mampu menikmati atau mengakses pada sumber air minum yang sehat dan bersih. Di samping itu, kondisi di atas diperparah dengan belum terbangunnya budaya untuk hidup sehat dari masyarakat dan sistem penyehatan lingkungan yang baik, seperti limbah, persampahan, dan drainase. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

D. Infrastruktur Perumahan

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak, masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi permukiman yang layak, serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, dan perdagangan.

E. Infrastruktur Sarana dan Prasarana Transportasi

Menurut Morlok (1991), terdapat beberapa yang merupakan komponen utama dari transportasi, yaitu :

1. Manusia dan barang (yang diangkut);

LAPORAN AKHIR

2. Kendaraan dan peti kemas (alat angkut);
3. Jalan (tempat alat angkut bergerak);
4. Terminal (tempat memasukkan dan mengeluarkan yang diangkut ke dalam dan dari alat angkut);
5. System pengoperasian (yang mengatur 4 komponen manusia barang kendaraan/ peti kemas, jalan dan terminal).

Sedangkan Menurut Manheim (1979) komponen utama dari transportasi hanya meliputi:

1. Jalan dan terminal;
2. Kendaraan;
3. Sistem pengelolaan.

Pada intinya adalah ketiga komponen diatas merupakan komponen sarana dan prasaran transportasi yang saling terkait dalam memenuhi permintaan akan transportasi. Dengan komponen komponen diatas, maka yang dapat diartikan dari sitem transportasi adalah gabungan elemen jalan dan terminal, kendaraan dan system peroperasian yang saling berkait dan bekerja sama dalam mengantisipasi permintaan dari manusia dan barang. Transportasi sebagai system mencakup system prasarana yaitu jalur dan simpul terjadinya pergerakan, dan system pengendalian atau pengaturan yaitu memungkinkan pergerakan tersebut dapat berjalan dengan efisien, lancer, aman dan teratur.

2.4 INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR

2.4.1 Teori Kepuasan Masyarakat

Menurut Tse dan Wilton (dalam Tjiptono, 2004) disebutkan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk setelah pemakaiannya. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari harapan dan kinerja. Oliver (dalam Tjiptono, 2004) memberikan pendapat bahwa kepuasan keseluruhan ditentukan oleh ketidaksesuaian harapan yang merupakan perbandingan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kepuasan merupakan fungsi positif dari harapan pelanggan dan keyakinan diskonfirmasi. Dengan demikian kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat merupakan respon dari perbandingan antara harapan dan kenyataan.

LAPORAN AKHIR

Lebih lanjut dijelaskan oleh Linder Pelz dalam Gotleb, Grewal dan Brown (Tjiptono, 2004) bahwa kepuasan merupakan respon afektif terhadap pengalaman melakukan konsumsi yang spesifik. Sementara Engel (dalam Tjiptono, 2004) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi purna beli terhadap alternatif yang dipilih yang memberikan hasil sama atau melampaui harapan pelanggan.

Kepuasan pelanggan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Definisi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Apabila kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas, sebaliknya apabila kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas dan apabila kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Dikaitkan dengan kepuasan masyarakat, maka kepuasan pelanggan dapat dianalogikan sebagai kepuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan instansi.

2.4.2 Layanan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah guna (*utility*). Guna yang diciptakan oleh kegiatan infrastruktur adalah guna tempat (*place utility*) dan guna waktu (*time utility*). Menciptakan guna tempat, berkaitan dengan kegiatan pemindahan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya suatu barang dari daerah produksi ke daerah pasar, maka gunanya atau nilai dari barang tersebut lebih tinggi karena dibutuhkan oleh banyak konsumen yang mampu membayar dengan harga yang lebih mahal. Untuk itu, pembangunan infrastruktur yang baik dan memadai akan menunjang kelancaran transportasi dalam memindahkan barang atau orang. Guna waktu adalah mampu memindahkan barang atau orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan dalam waktu yang lebih cepat dan singkat. Pemindahan barang dalam waktu yang lebih cepat dan singkat. Pemindahan barang dalam waktu yang lebih cepat memberikan kegunaan yang lebih besar karena barang sampai ditempat tujuan adalah tepat waktu dan barangnya dalam kondisi baik.

Selain menciptakan guna tempat dan guna waktu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur akan memberikan manfaat yang positif dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Manfaat ekonomi dari kegiatan pembangunan dan pemeliharaan

LAPORAN AKHIR

infrastruktur, yaitu: (1) memperluas pasar atau daerah pemasaran yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan bagi produsen. Daerah yang mempunyai infrastruktur yang baik akan mudah berhubungan dengan daerah yang juga mempunyai infrastruktur yang baik, sehingga pasar atau wilayah pemasaran semakin luas. Ini akan berbeda dengan daerah yang infrastrukturnya jelek akan membuat stagnan pasar dan daerah pemasarannya. (2) mengurangi perbedaan harga antar daerah menjadi sekecil mungkin sehingga harga barang-barang menjadi stabil. Infrastruktur yang baik akan memudahkan transportasi dalam menjangkau kebutuhan daerah tertentu pada daerah lain, sehingga harga barang di suatu tempat tidak dibebani dengan biaya transportasi yang lebih mahal. (3) infrastruktur yang baik akan mendorong kelancaran transportasi dan mampu menjangkau daerah yang luas serta mendorong daerah-daerah melakukan spesialisasi produksi sesuai potensi yang dimiliki berarti mampu menerapkan prinsip keunggulan komparatif (*comparative cost*), yaitu memproduksi barang dengan biaya murah.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur memberikan manfaat sosial dan budaya, misalnya (1) dalam bidang budaya dan seni, adanya pengenalan budaya dan seni dari daerah yang dulunya terpencil atau infrastruktur tidak baik, sehingga budaya dan seni daerah tersebut lestari dan berkembang. (2) dalam bidang pendidikan, buku-buku pelajaran dari daerah maju dapat dikirimkan ke daerah-daerah yang tertinggal sehingga dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) dalam bidang kesehatan, daerah-daerah yang mengalami gizi buruk atau sedang dilanda wabah penyakit atau bencana alam lainnya dapat segera dilakukan bantuan kesehatan. (4) Dengan adanya infrastruktur yang baik dapat menjalin erat rasa solidaritas dan persaudaraan antar daerah. Pada bidang politik, dengan infrastruktur yang baik dapat (1) diselenggarakan sistem pemerintahan yang mantap dan bersifat uniform. Pengaduan dari pemerintah kota/kabupaten dapat langsung dilakukan secara singkat dan cepat pada pemerintah provinsi. (2) menciptakan persatuan nasional yang semakin kuat dengan meniadakan isolasi. (3) mampu mengatasi gangguan keamanan dan pertahanan, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari luar daerah sehingga mampu mempererat persatuan daerah tersebut.

LAPORAN AKHIR

2.4.3 Indikator Layanan Infrastruktur

Keberhasilan dari pembangunan infrastruktur adalah apabila indikator manfaat (*Outcome*) atau dampak (*impact*) dapat dicapai, artinya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat misalnya akses transportasi menjadi mudah dan cepat, sedangkan dari dampak jika pembangunan tersebut akan memberikan perubahan dalam lingkungan menjadi lebih sederhana, mudah dan meningkat.

Terkait dengan pengukuran efektivitas tiap-tiap jenis infrastruktur, teori yang digunakan mengadopsi dan modifikasi pendekatan *Gibson, Donely, dan Ivancevich* yakni dengan pendekatan teori sistem (1997). Berdasarkan pendekatan ini batasan kriteria efektif yakni : (i) ketersediaan fisik (*availability*) (ii) kualitas fisik (*quality*) (iii) kesesuaian (*appropriateness*) (iv) pemanfaatan (*utility*) dan (v) penyerapan tenaga kerja (*job creation*). Dalam IKLI, juga akan ditambahkan kontribusi Sektor Infrastruktur terhadap Perekonomian. Dasar pemikiran pemilihan variabel sebagai indikator terpenuhinya aspek efektivitas antara lain :

1. Ketersediaan fisik (*availability*) adalah bahwa dalam setiap aktivitas belanja negara yang diperuntukan bagi kegiatan fisik tentunya indikator dasarnya akan menghasilkan output yang berupa barang/bangunan secara fisik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik;
2. Kualitas fisik (*quality*) adalah kualitas output yang dihasilnya, yaitu bahwa aspek efektifitas akan lebih reliable apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas output yang baik dan optimal;
3. Kesesuaian (*appropriateness*) adalah kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat ;
4. Pemanfaatan (*utility*) adalah tingkat pemanfaatan atas output yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya; dan
5. Penyerapan tenaga kerja (*job creation*) adalah tingkat penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur;

LAPORAN AKHIR

6. Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian.

2.5 TINJAUAN KEBIJAKAN

2.5.1 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ialah **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatori Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi beserta tujuan dan sasaran dari masing-masing misi tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi Baik antar Kelompok, antar Sektor, dan Keterhubungan Wilayah

Berikut ini merupakan tujuan dari misi pertama RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024 meliputi:

- a. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan;
- b. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
- c. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian;
- d. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- e. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
- f. Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM;
- g. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata;
- h. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
- i. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air; dan
- j. Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara

2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, serta Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan

Berikut ini merupakan tujuan dari misi kedua RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024 meliputi:

LAPORAN AKHIR

- a. Menurunnya angka kemiskinan, yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Menurunnya penduduk miskin perdesaan;
 - Meningkatnya kemandirian PMKS.
 - b. Meningkatnya kesetaraan gender, yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya pemberdayaan perempuan.
 - c. Terpenuhinya kebutuhan dasar, yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya kualitas pendidikan;
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - d. Menurunnya pengangguran, yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Menurunnya tingkat pengangguran masyarakat.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi Kewarganegaraan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan.
- Berikut ini merupakan tujuan dari misi ketiga RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024 meliputi:
- a. Terwujudnya pemerintahan yang baik, yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
 - Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;
 - Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan
 - Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - b. Menguatnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat, yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - Meningkatnya Kepedulian Sosial; dan
 - Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan, untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi, dan Ruang Budaya.

Berikut merupakan tujuan dari misi keempat RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024 meliputi:

LAPORAN AKHIR

- a. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan, yang memiliki sasaran sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana.

2.5.2 RTRW Provinsi Jawa Timur

Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah di Provinsi Jawa Timur meliputi pemantapan penyediaan prasarana wilayah dengan meningkatkan kelengkapan, skala pelayanan, pemerataan, serta sistem inter konektivitas dan keterpaduan antar jenis prasarana dengan wilayah-wilayah yang dilayani secara efisien pada sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi dan informatika, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

A. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 meliputi:

1. Pemantapan dan pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara yang terintegrasi dengan kebijakan pengembangan wilayah;
2. Peningkatan integrasi intermoda dan antarmoda yang didukung dengan sarana dan prasarana; dan
3. Pengembangan sistem jaringan transportasi turut mempertimbangkan kepentingan evakuasi bencana.

B. Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Strategi pengembangan sistem jaringan energi berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 meliputi:

1. Pengembangan diversifikasi sumber energi baru dan terbarukan, antara lain: energi mikrohidro, energi angin, energi surya, energi air, energi panas bumi, energi gelombang laut, energi biogas, dan energi biomassa;
2. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di kawasan perkotaan dan pedesaan;

LAPORAN AKHIR

3. Peningkatan eksplorasi dan eksploitasi migas dengan teknologi dan metode yang ramah lingkungan; dan
4. Pembukaan peluang investasi sumber energi potensial berupa panas bumi sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.

C. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informatika

Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 meliputi:

1. Pengembangan jaringan primer dengan sistem kabel dan nirkabel; dan
2. Pengembangan sistem prasarana telekomunikasi dan informatika yang efektif dan efisien.

D. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 meliputi:

1. Pengembangan pemanfaatan air permukaan yang meliputi sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya;
2. Perlindungan dan pelestarian sumber air melalui konservasi kawasan lindung;
3. Peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
4. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
5. Pengembangan sarana pengendali banjir yang didukung kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pengendalian daya rusak air yang dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan
7. Penyediaan informasi sumber daya air yang meliputi informasi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, dan lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya.

LAPORAN AKHIR

E. Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan

Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 meliputi:

1. Pembangunan dan pemfasilitasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan sampah;
2. Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu antarwilayah yang dikelola secara bersama;
3. Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang melayani wilayah provinsi;
4. Pengendalian pencemaran di sekitar tempat pengolahan sampah dan limbah B3; dan
5. Mengkoordinasi pengembangan sistem drainase di kawasan perkotaan.

2.5.3 RPJMD Kabupaten Gresik

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 ialah sebagai berikut:

A. Visi

“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera dan Berkehidupan yang Berkualitas”

B. Misi

1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri. Dirumuskan 9 (sembilan) strategi dan 4 (empat) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, dan 4 (empat) sasaran.
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Dirumuskan 39 (tiga puluh sembilan) strategi dan 15 (lima belas) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan mengedepankan

LAPORAN AKHIR

- prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas, dan 9 (sembilan) sasaran.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Dirumuskan 77 (tujuh puluh tujuh) strategi dan 25 (dua puluh lima) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada kompetisi global, dan 15 (lima belas) sasaran.
 4. Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dirumuskan 26 (dua puluh enam) strategi dan 9 (sembilan) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, dan 5 (lima) sasaran.

2.5.4 RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2040**A. Tujuan Penataan Ruang**

Tujuan penataan ruang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan. Tujuan penataan ruang Kabupaten Gresik menurut RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2040 yaitu

“Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan berbasis Budaya, Industri, dan Agribisnis yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan”

B. Kebijakan Pengembangan Sektor Perumahan dan Permukiman

Strategi pengembangan kawasan permukiman menurut RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2040 meliputi:

LAPORAN AKHIR

1. Mengembangkan penyediaan kawasan perumahan baru dengan pola hunian berimbang;
2. Mengembangkan kawasan permukiman perkotaan yang terintegrasi dan tangguh bencana;
3. Mengembangkan kawasan permukiman perdesaan yang produktif dan tangguh bencana;
4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang permukiman yang memadai.

Kawasan permukiman yang direncanakan pada RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2040 memiliki luas sebesar 40,950. Ha, kawasan permukiman tersebut terbagi menjadi dua yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Kawasan permukiman perkotaan direncanakan seluas 15,591.48 Ha yang tersebar pada Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah. Pengembangan permukiman perkotaan antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luasan kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah;
2. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur penunjang permukiman.

Untuk kawasan permukiman pedesaan direncanakan seluas 25,358.7 Ha yang tersebar pada Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah. Pengembangan permukiman pedesaan antara lain:

1. Perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik rumah;
2. Penataan kawasan pedesaan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi lainnya;
3. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman; dan
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

LAPORAN AKHIR**C. Rencana Sistem Perkotaan dan Sistem Pusat-Pusat Permukiman**

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan menurut rencana struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2040 meliputi 5 (lima) bagian, yakni PKN, PKW, PKL, PPK, dan PPL.

a. PKN

PKN berfungsi sebagai pusat perkantoran pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta skala nasional, pusat pengembangan permukiman, pusat pelayanan sosial, pusat pendidikan, pusat pariwisata, industri pengolahan, pelabuhan skala nasional, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten, berada pada:

- 1) Kecamatan Gresik;
- 2) Kecamatan Kebomas;
- 3) Sebagian wilayah Kecamatan Manyar, yaitu pada Desa Roomo, Desa Sukomulyo, Desa Yosowilangun, Desa Pongangan, dan Desa Suci.
- 4) Kecamatan Menganti; dan
- 5) Kecamatan Driyorejo.

b. PKW

PKW berfungsi sebagai pusat industri pengolahan, pusat pengembangan permukiman, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pelabuhan skala internasional dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten, berada pada:

- 1) Sebagian wilayah Kecamatan Manyar, yaitu Desa Banjarsari, Desa Banyuwangi, Desa Betoyoguci, Desa Betoyokauman, Desa Gumeno, Desa Karangrejo, Desa Leran, Desa Manyar Sidomukti, Desa Manyar Sidorukun, Desa Manyarejo, Desa Morobakung, Desa Ngampel, Desa Peganden, Desa Pejanggaran, Desa Sembayat, Desa Sumberejo, Desa Tanggulrejo, dan Desa Tebalo; dan
- 2) Kecamatan Wringinanom.

LAPORAN AKHIR**c. PKL**

PKL yang berfungsi sebagai pusat perikanan budidaya, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten, berada pada:

- 1) Kecamatan Cerme;
- 2) Kecamatan Kedamean; dan
- 3) Kecamatan Sidayu.

d. PPK

PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yang meliputi:

- 1) Perkotaan Balongpanggang di Kecamatan Balongpanggang dengan fungsi kawasan pertanian dan permukiman perdesan;
- 2) Perkotaan Benjeng di Kecamatan Benjeng dengan fungsi kawasan pertanian dan permukiman perdesan;
- 3) Perkotaan Duduksampeyan di Kecamatan Duduksampeyan dengan fungsi kawasan perikanan budidaya, pertanian, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pendidikan, dan permukiman perdesaan;
- 4) Perkotaan Bungah di Kecamatan Bungah dengan fungsi kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan;
- 5) Perkotaan Dukun di Kecamatan Dukun dengan fungsi kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan;
- 6) Perkotaan Ujung Pangkah di Kecamatan Ujung Pangkah dengan fungsi kawasan perikanan, budidaya, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman perdesaan;
- 7) Perkotaan Panceng di Kecamatan Panceng dengan fungsi kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pendidikan;
- 8) Perkotaan Sangkapura di Kecamatan Sangkapura dengan fungsi kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan; dan
- 9) Perkotaan Tambak di Kecamatan Tambak dengan fungsi kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan.

LAPORAN AKHIR**e. PPL**

PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang meliputi:

- 1) PPL pada Perdesaan Kecamatan Kedamean;
- 2) PPL pada Perdesaan Kecamatan Benjeng;
- 3) PPL pada Perdesaan Kecamatan Balongpanggang;
- 4) PPL pada Perdesaan Kecamatan Dudusampeyan;
- 5) PPL pada Perdesaan Kecamatan Bungah;
- 6) PPL pada Perdesaan Kecamatan Dukun;
- 7) PPL pada Perdesaan Kecamatan Ujung Pangkah;
- 8) PPL pada Perdesaan Kecamatan Panceng;
- 9) PPL pada Perdesaan Kecamatan Tambak; dan
- 10) PPL pada Perdesaan Kecamatan Sangkapura.

Kebijakan pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Gresik adalah mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk pusat-pusat pelayanan yang efektif dan efisien untuk mendukung fungsi Ibu Kota Kabupaten Sebagai PKN. Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota–perkotaan dan wilayah diantaranya sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menetapkan sistem pusat perkotaan Kabupaten secara berjenjang;
2. Melakukan revitalisasi dan percepatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mendukung perwujudan pusat-pusat kegiatan perkotaan kabupaten yang didukung oleh pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan lokal;
3. Meningkatkan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Kabupaten dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan;
4. Mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi pusat kegiatan;
5. Memantapkan integrasi kawasan perdesaan dan perkotaan yang mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan fisik- lingkungan berdasar konsep agropolitan dan minapolitan; dan

LAPORAN AKHIR

6. Mengembangkan sarana dan prasarana dasar yang menunjang keberlanjutan kawasan perdesaan.

D. Pembangunan Permukiman Sesuai Arahan RTRW**a. Kawasan Permukiman Perkotaan**

Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gresik memiliki rencana pengembangan kurang lebih 15.591,48 Ha yang dikembangkan di Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Dudusampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah. Arahan kebijaksanaan yang ditetapkan mengacu pada:

1. Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman baru
2. Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas/prasarana yang dibutuhkan
3. Penggunaan lahan eksistingnya

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gresik lebih diarahkan pada penggunaan lahan non-produktif dengan kebijaksanaan penataan ruang secara rinci meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan, tambak, dll)
2. Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan rawan bencana alam.
3. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.
4. Permukiman perkotaan, meliputi:
 - Permukiman perkotaan pada PPK diarahkan di seluruh ibukota kecamatan; dan
 - Permukiman perkotaan pada kawasan yang terpengaruh perkembangan Kota Surabaya diarahkan di Kecamatan Driyorejo, Kedamean, Menganti, dan Cerme.

LAPORAN AKHIR

b. Kawasan Permukiman Perdesaan

Permukiman lahan perdesaan dikembangkan dengan berorientasi pada Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) Untuk pengembangan kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Gresik memiliki luas sebesar 25.358,7 Ha yang dikembangkan di Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Dudusampeyan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Ujungpangkah. Arah kebijakan yang ditetapkan mengacu pada:

1. Memperhatikan keberadaan sawah irigasi sebagai kawasan limitasi pengembangan kawasan;
2. Memperhitungkan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas;
3. Memperhatikan kebutuhan perumahan penduduk pedesaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
4. Memperhatikan keterkaitan dengan pusat pertumbuhan yang ada seperti ibu kota kecamatan sebagai pusat distribusi dan koleksi di seluruh wilayah kecamatan.

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas, kebijakan penataan ruang untuk kawasan permukiman pedesaan meliputi:

1. Program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik rumah;
 2. Penataan kawasan pedesaan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi lainnya;
 3. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman, seperti air bersih, drainase, persampahan, listrik, bangunan pendidikan, pasar, dll;
 4. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- Permukiman pedesaan diarahkan dengan ketentuan:
1. Permukiman pedesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan; dan
 2. Permukiman pedesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat.

LAPORAN AKHIR**E. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah****a. Sistem Jaringan Transportasi Darat****1. Sistem Jaringan Prasarana**

Perwujudan sistem jaringan prasarana Kabupaten Gresik, meliputi:

- Pembangunan jaringan jalan nasional berupa Jalan Bebas Hambatan;
- Pengembangan jalan kolektor primer (JKP-1) dan (JKP-2);
- Peningkatan dan penyesuaian lebar dimensi jalan sesuai dengan standar minimal dimensi jalan;
- Pemindahan Terminal Tipe B Bunder ke Duduksampeyan;
- Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Sidayu, Kecamatan Panceng, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Manyar, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Cerme, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Tambak, Kecamatan Gresik, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Menganti, dan Kecamatan Benjeng;
- Peningkatan kelas Terminal Tipe C menjadi Tipe B di Kecamatan Kebomas; dan
- Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Manyar, Kecamatan Cerme, Kecamatan Dukun, Kecamatan Gresik, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Wringinanom

2. Sistem Jaringan Kereta Api

Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan kereta api, meliputi:

- Pengembangan double track pada jalur Surabaya-Lamongan-Babat-Bojonegoro-Cepu;
- Pengembangan jalur kereta api cepat Bandung-Jakarta-Semarang-Surabaya;
- Pengembangan transportasi publik di Gerbangkertasusila (Surabaya Regional Railways Line);
- Pengaktifan kembali pelayanan rel kereta api yang mati dan menambah pelayanan KA jalur Petro, Arif Rahman Hakim, Stasiun Indro – Surabaya;
- Pengembangan jalur kereta api menuju kawasan industri (JIPE); dan
- Pengembangan stasiun Duduksampeyan menjadi stasiun kelas II.

LAPORAN AKHIR**b. Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:

1. Pengembangan pelabuhan pengumpul Gresik di Kecamatan Gresik;
2. Pembangunan pelabuhan Kali Mireng II yang berskala Internasional di Kecamatan Manyar;
3. Pembangunan Pelabuhan Camar dan Pelabuhan Tambak di Kabupaten Gresik;
4. Pengembangan pelabuhan perikanan di Campurejo, Kecamatan Panceng; dan
5. Pengembangan pelabuhan pengumpan regional di Pulau Bawean.

c. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi udara, meliputi:

1. Pengembangan Bandara Harun Thohir Bawean dengan penambahan Runway menjadi 1.380 m, pembangunan Terminal dan Apron Baru, Daya Dukung Runway: ATR72, Boeing 737-200, dan pembangunan Entrance/Gate Baru.

F. Strategi pengembangan sistem jaringan energi

- a. Mengembangkan sistem jaringan energi yang berkelanjutan; dan
- b. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di kawasan perkotaan dan perdesaan.

G. Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi

Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Gresik dengan mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika.

H. Strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air

- a. Mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang terintegrasi;
- b. Melakukan perlindungan dan pelestarian sumber air melalui konservasi kawasan lindung;
- c. Melakukan optimalisasi pengendalian banjir; dan
- d. Melakukan perlindungan daya rusak air yang dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

LAPORAN AKHIR**I. Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya**

- a. Mengembangkan sistem jaringan penyediaan air minum;
- b. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah;
- c. Mengembangkan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. Mengembangkan pengelolaan persampahan;
- e. Mengembangkan pengelolaan sistem jaringan drainase; dan
- f. Mengembangkan jaringan evakuasi dan ruang evakuasi bencana.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 KARAKTERISTIK FISIK DASAR

3.1.1 Administrasi dan Geografi

Kabupaten Gresik secara geografis terletak antara 112°-113° Bujur Timur dan 7°-8° Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Gresik dibagi menjadi dua, yaitu Gresik daratan dan pulau Bawean. Batas-batas wilayah Kabupaten Gresik antara lain:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya

Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

Sebelah Timur : Selat Madura

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah sebesar 1.191,25 km² yang terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean. Berikut dibawah ini luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik

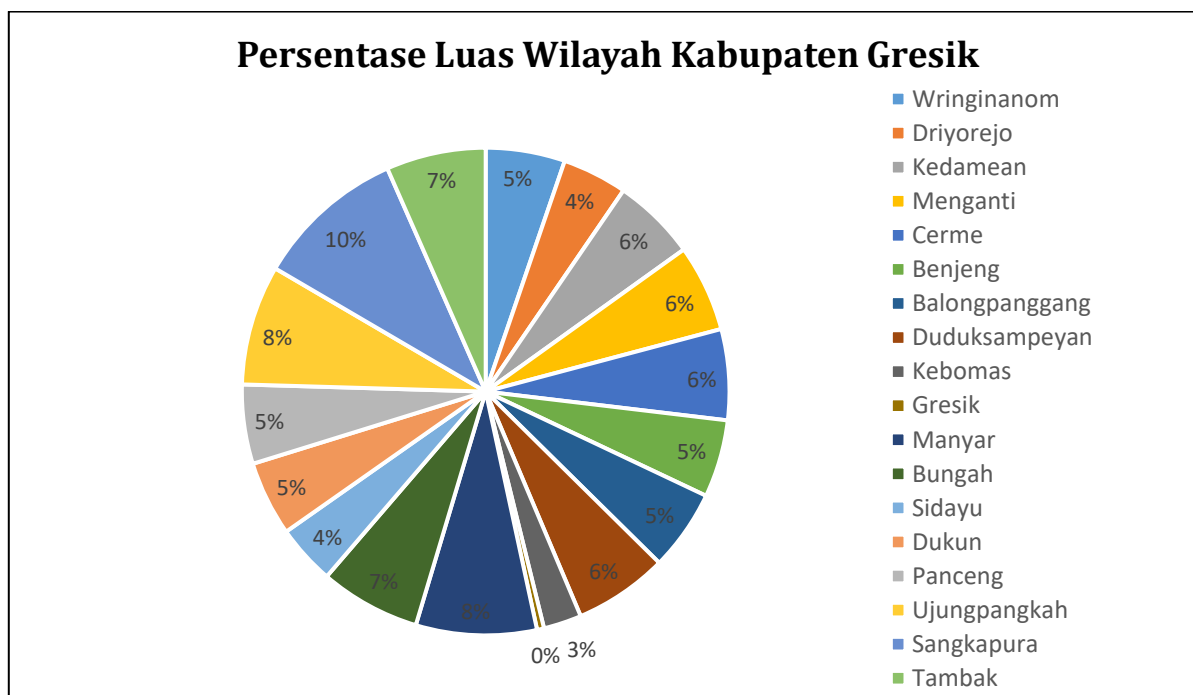
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Balongpanggang	6.388
2	Benjeng	6.126
3	Bungah	7.944
4	Cerme	7.173
5	Driyorejo	5.129
6	Duduksampeyan	7.429
7	Dukun	5.908
8	Gresik	554
9	Kebomas	3.006
10	Kedamean	6.595
11	Manyar	9.542
12	Menganti	6.873
13	Panceng	6.259
14	Sangkapura	11.827
15	Sidayu	4.713

LAPORAN AKHIR

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
16	Tambak	7.870
17	Ujungpangkah	9.482
18	Wringinanom	6.262
Kabupaten Gresik		119.326

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa di Kabupaten Gresik kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Sangkapura dengan luas sebesar 11.827 Ha dan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Gresik dengan luas sebesar 554 Ha. Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.



Gambar 3. 1 Presentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Pada Kabupaten Gresik

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka 2024

3.1.2 Topografi dan Kelerengn

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0-2%, 3-15%, dan 16-40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0-2% mempunyai luas ±

LAPORAN AKHIR

94.613,00 Ha atau sekitar 80,59%, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40% lebih sedikit $\pm$ 1.072,23 Ha atau sekitar 0,91%. Ketinggian tanah di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0–500 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Berikut merupakan luas daerah berdasarkan ketinggian tanah di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 2 Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Pada Kabupaten Gresik

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Wringinanom	0.00	6.254.00	0.00	6.262.00
Driyorejo	0.00	5.130.00	0.00	5.130.00
Kedamean	6.588.00	0.00	0.00	6.596.00
Menganti	6.196.00	0.00	0.00	6.367.00
Cerme	6.126.00	0.00	0.00	6.126.00
Benjeng	0.00	6.862.00	0.00	6.871.00
Balongpanggang	7.167.00	0.00	0.00	7.167.00
Duduksampeyan	7.440.00	0.00	0.00	7.449.00
Kebomas	2.966.00	0.00	0.00	3.433.00
Gresik	524.00	0.00	0.00	799.00
Manyar	8.287.00	0.00	0.00	8.671.00
Bungah	8.022.00	0.00	0.00	7.936.00
Sidayu	4.521.00	0.00	0.00	4.521.00
Dukun	5.909.00	0.00	0.00	5.909.00
Panceng	0.00	0.00	6.318.00	6.259.00
Ujungpangkah	9.470.00	0.00	0.00	10.406.00
Sangkapura	11.872.00	0.00	0.00	11.872.00
Tambak	7.755.00	0.00	0.00	7.739.00
Jumlah	92.843.00	18.246.00	6.318.00	119.513.00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100.00

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

3.1.3 Klimatologi

Seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik mempunyai kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi:

1. Musim kering terjadi pada Bulan Juni sampai dengan Bulan September.
2. Musim penghujan basah terjadi pada Bulan Desember sampai dengan Bulan Maret.

LAPORAN AKHIR

3. Musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada Bulan Oktober dan November.
4. Musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada Bulan April dan Mei.

3.1.4 Geologi

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Kabupaten Gresik bagian Utara adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman.
2. Kabupaten Gresik bagian Selatan merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian lagi merupakan daerah berbukit sehingga daerah ini cocok untuk industri, permukiman dan pertanian.
3. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian lagi merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan.

3.1.5 Hidrologi

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup

LAPORAN AKHIR

tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut di atas, keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.

3.1.6 Penggunaan Lahan

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah sebesar 1,191.25 km². Penggunaan lahan di Kabupaten Gresik didominasi oleh penggunaan lahan sawah yaitu sebesar 32.26%. Penggunaan lahan paling kecil di Kabupaten Gresik berupa hamparan pasir pantai yaitu sebesar 0.01% dari luas total penggunaan lahan di Kabupaten Gresik. Berikut merupakan luas wilayah menurut penggunaan lahan di Kabupaten Gresik dalam satuan Ha.

Tabel 3. 3 Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

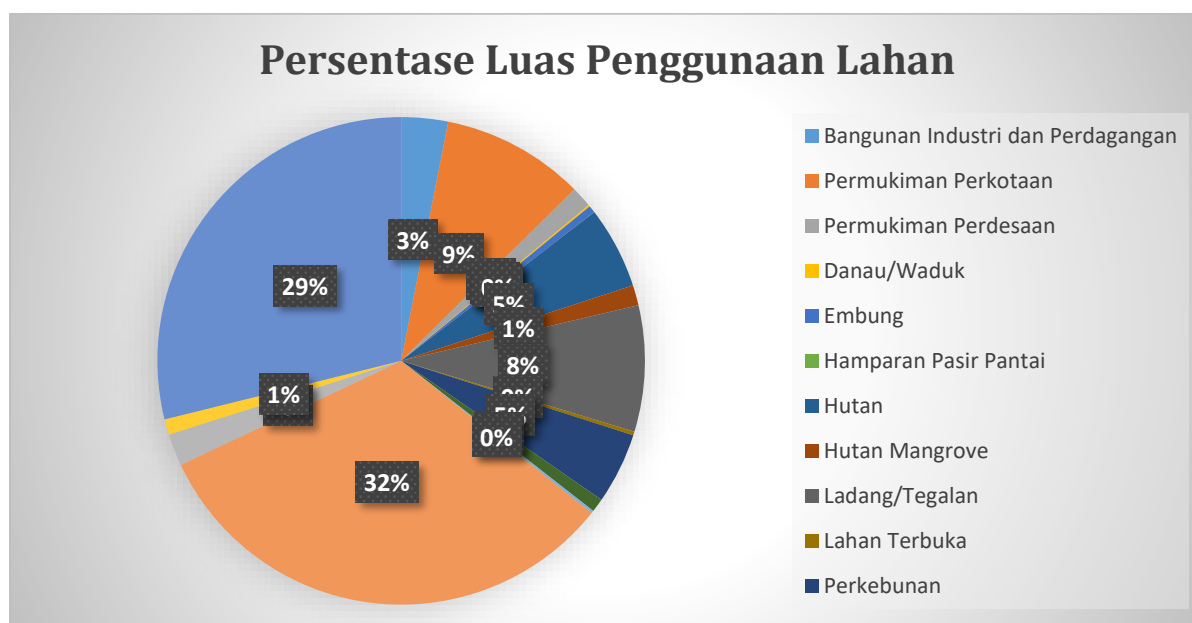
Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Bangunan Industri dan Perdagangan	3.879,80	3,10
Permukiman Perkotaan	11.886,96	9,48
Permukiman Perdesaan	1.733,44	1,38
Danau/Waduk	143,13	0,11
Embung	595,10	0,47
Hamparan Pasir Pantai	8,51	0,01
Hutan	6.812,16	5,43
Hutan Mangrove	1.681,96	1,34
Ladang/Tegalan	10.478,61	8,36
Lahan Terbuka	314,92	0,25
Perkebunan	5.903,29	4,71
Pertambangan	1.130,76	0,90
Rawa	207,26	0,17
Sawah	40.434,76	32,26
Semak Belukar	2.658,18	2,12
Sungai	1.304,62	1,04
Tambak	36.177,07	28,86
Total	125.350,52	100

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan lahan paling besar di Kabupaten Gresik adalah berupa sawah, yaitu sebesar 32,6% dari jumlah total penggunaan lahan di Kabupaten Gresik atau seluas 40.434,76 Ha. Penggunaan Lahan paling kecil di Kabupaten Gresik Berupa hamparan pasir pantai yaitu sebesar 0,01% atau seluas 8,51 Ha. Penggunaan lahan untuk permukiman di Kabupaten Gresik sebesar 13.620,40 Ha yang terdiri

LAPORAN AKHIR

dari permukiman kota dan permukiman pedesaan. Permukiman pedesaan sebesar 1,38% atau seluas 1.733,44 Ha, sedangkan permukiman perkotaan sebesar 9,48% atau seluas 11.886,96 Ha. Berikut adalah diagram persentase luas penggunaan lahan di Kabupaten Gresik.



Gambar 3. 2 Persentase Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dilihar dari rencana pola ruang Kabupaten Gresik, distribusi penggunaan lahan terdiri dari dua macam yaitu distribusi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Distribusi kawasan lindung sebesar 8,5% atau seluas 10.916,16 Ha. Sedangkan distribusi untuk kawasan budidaya sebesar 69,74% atau seluas 117.535,01 Ha. Rencana penggunaan dalam RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Distribusi Luas dan Persentase Pola Ruang Kabupaten Gresik

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Lindung			
1	Kawasan Resapan Air	1.737,05	1,35
2	Kawasan Suaka Margasatwa	3.539,18	2,76
3	Kawasan Cagar Alam	585,24	0,46
4	Kawasan Bandara	66,39	0,05
5	Kawasan Pantai Bermangrove	1.919,97	1,49
6	Kawasan Perlindungan Setempat	3.068,33	2,39
Kawasan Budidaya			
7	Kawasan Permukiman	27.962,64	21,77
8	Kawasan Pertanian Tanaman pangan	25.790,75	20,08
9	Kawasan Perdagangan dan Jasa	6.186,3	4,82
10	Kawasan Perkebunan	2.503,59	1,95
11	Kawasan Pariwisata	82,06	0,06
12	Kawasan Hutan Prosduksi	997,26	0,78
13	Kawasan Hortikultura	15.675,3	12,20
14	Kawasan Perikanan Budidaya	24.841,12	19,34

LAPORAN AKHIR

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
15	Kawasan Pelabuhan	1.257,03	0,98
16	Kawasan Industri	12.238,96	9,53
Total		12.8451,2	100

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa distribusi Kawasan Lindung paling besar adalah berupa kawasan perlindungan setempat yaitu sebesar 2,39% atau seluas 3.069,33 Ha. Distribusi penggunaan lahan di Kawasan Lindung paling kecil adalah berupa kawasan bandara yaitu sebesar 0,05% atau seluas 66,39 Ha. Sedangkan pada kawasan budidaya, distribusi penggunaan lahan paling besar berupa kawasan permukiman yaitu sebesar 21,77% atau seluas 27.962,64 Ha. Distribusi penggunaan lahan paling kecil yaitu berupa kawasan pariwisata sebesar 0,06% atau seluas 82,06 Ha.

3.2 KARAKTERISTIK KEPENDUDUKAN

3.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 1.296.688 jiwa berdasarkan hasil registrasi. Dengan persentase jumlah penduduk terbanyak berada pada kecamatan Menganti, yakni sebesar 9,86% dari keseluruhan penduduknya. Sedangkan menurut jenis kelamin, penduduk di Kabupaten Gresik didominasi oleh penduduk laki-laki sejumlah 651.463 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda dengan penduduk laki-lakinya, yakni sebanyak 645.225 jiwa.

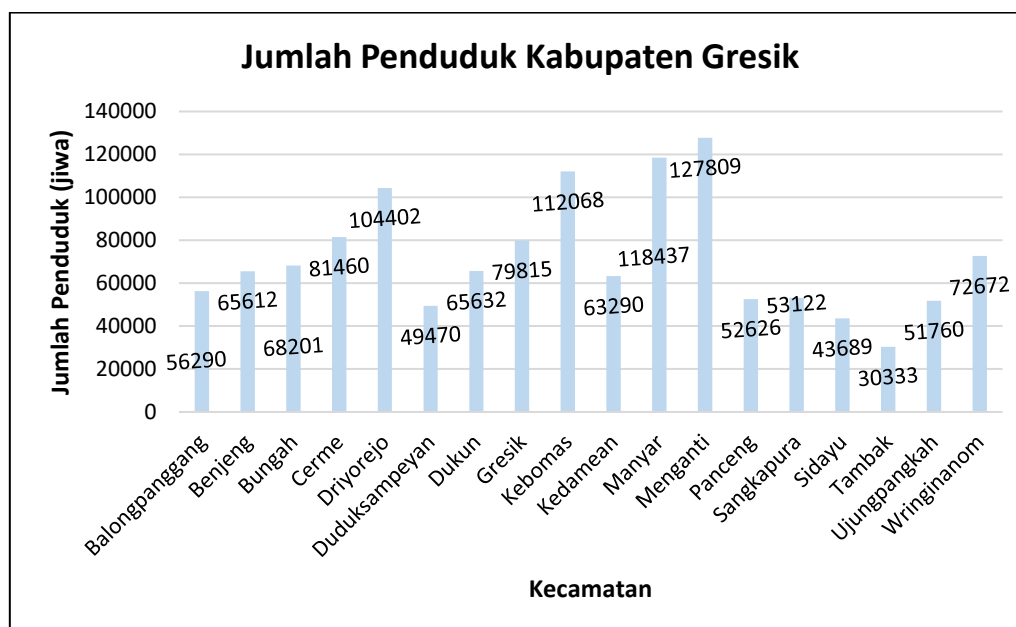
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gresik

No.	Kecamatan	Penduduk Laki-Laki (jiwa)	Penduduk Perempuan (jiwa)	Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)
1	Balongpanggang	28.005	28.285	56.290	4,34
2	Benjeng	32.926	32.686	65.612	5,06
3	Bungah	34.455	33.746	68.201	5,26
4	Cerme	41.028	40.432	81.460	6,28
5	Driyorejo	52.559	51.843	104.402	8,05
6	Dudusampeyan	24.726	24.744	49.470	3,82
7	Dukun	33.085	32.547	65.632	5,06
8	Gresik	39.584	40.231	79.815	6,16
9	Kebomas	56.122	55.946	112.068	8,64
10	Kedamean	31.907	31.383	63.290	4,88
11	Manyar	59.782	58.655	118.437	9,13
12	Menganti	64.398	63.411	127.809	9,86
13	Panceng	26.318	26.308	52.626	4,06
14	Sangkapura	26.819	26.303	53.122	4,10
15	Sidayu	22.041	21.648	43.689	3,37
16	Tambak	15.106	15.227	30.333	2,34

LAPORAN AKHIR

No.	Kecamatan	Penduduk Laki-Laki (jiwa)	Penduduk Perempuan (jiwa)	Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)
17	Ujungpangkah	25.982	25.778	51.760	3,99
18	Wringinanom	36.620	36.052	72.672	5,60
Kabupaten Gresik		651.463	645.225	1.296.688	100,00

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka 2024



Gambar 3. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik

3.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik per tahun 2020 – 2023 adalah sebesar -0,56. Jika dilihat hingga level kecamatan, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020 – 2023 paling rendah terjadi di Kecamatan Driyorejo yakni sebesar -7,77. Berikut adalah laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 6 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2023

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 – 2023 (%)
1	Balongpanggang	56.290	2,39
2	Benjeng	65.612	2,18
3	Bungah	68.201	2,20
4	Cerme	81.460	0,15
5	Driyorejo	104.402	-7,77
6	Dudusampeyan	49.470	2,53
7	Dukun	65.632	2,28
8	Gresik	79.815	2,25
9	Kebomas	112.068	-2,79
10	Kedamean	63.290	1,68
11	Manyar	118.437	-0,38

LAPORAN AKHIR

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 – 2023 (%)
12	Menganti	127.809	-5,8
13	Panceng	52.626	2,06
14	Sangkapura	53.122	2,45
15	Sidayu	43.689	0,23
16	Tambak	30.333	1,10
17	Ujungpangkah	51.760	2,82
18	Wringinanom	72.672	-0,12
Kabupaten Gresik		1.296.688	-0,56

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka 2024

3.2.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik dimana Kecamatan Gresik memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni sebesar 144 jiwa/Ha. Sementara itu, kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan kepadatan penduduk sebesar 4 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada masing-masing wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Gresik

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk per Ha	Sex Ratio
1	Balompanggang	56.290	4,34	6.388	9	99,01
2	Benjeng	65.612	5,06	6.126	11	100,73
3	Bungah	68.201	5,26	7.944	9	102,10
4	Cerme	81.460	6,28	7.173	11	101,47
5	Driyorejo	104.402	8,05	5.129	20	101,38
6	Duduksampeyan	49.470	3,82	7.429	7	99,93
7	Dukun	65.632	5,06	5.908	11	101,65
8	Gresik	79.815	6,16	554	144	98,39
9	Kebomas	112.068	8,64	3.006	37	100,31
10	Kedamean	63.290	4,88	6.595	10	101,67
11	Manyar	118.437	9,13	9.542	12	101,92
12	Menganti	127.809	9,86	6.873	19	101,56
13	Panceng	52.626	4,06	6.259	8	100,04
14	Sangkapura	53.122	4,10	11.827	4	101,96
15	Sidayu	43.689	3,37	4.713	9	101,82
16	Tambak	30.333	2,34	7.870	39	99,21
17	Ujungpangkah	51.760	3,99	9.482	5	100,79
18	Wringinanom	72.672	5,60	6.262	12	101,58
Kabupaten Gresik		1.296.688	100,00	119376	11	100,97

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka 2024

3.2.4 Struktur Pendidikan

Data Kabupaten Gresik Dalam Angka pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gresik dengan usia sekolah 5-24 tahun berjumlah 400.953 Jiwa. Berdasarkan

LAPORAN AKHIR

jumlah tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 668.645 jiwa atau sebesar 93% dan angkatan pengangguran sebanyak 50.368 jiwa atau sebesar 7%. Sedangkan persentase bekerja terhadap angkatan kerja pendidikan Sekolah Dasar sebesar 97,28%, tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 94,65%, Sekolah Menengah Atas sebesar 90,25%, dan Perguruan Tinggi sebesar 94,24%.

Data Kabupaten Gresik Dalam Angka tahun 2024 juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang termasuk dalam golongan bukan Angkatan kerja sebesar 314.881 Jiwa. Jumlah angkatan kerja pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebesar 166.844 jiwa, pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar 145.910 jiwa, Sekolah Menengah Atas sebanyak 337.359 jiwa dan pada tingkat pendidikan perguruan tinggi sebesar 98.100 jiwa. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja pada Kabupaten Gresik tahun 2023:

Tabel 3. 8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
1	Sekolah Dasar	162.104	4.540	166.644	97,28	104.275	270.919	61,51
2	Sekolah Menengah Pertama	138.105	7.805	145.910	94,65	95.185	241.095	60,52
3	Sekolah Menengah Atas	304.465	32.894	337.359	90,25	102.380	439.739	76,72
4	Perguruan Tinggi	83.971	5.129	89.100	94,24	13.041	102.141	87,23
Total		688.645	50.368	739.013	93,18	314.881	1.053.894	70,12

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

3.2.5 Mata Pencarian dan Struktur Pekerjaan

Struktur ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi berbagai sektor dalam memproduksi barang dan jasa. Kontribusi nilai tambah dari setiap sektor mencerminkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap aktivitas produksi di berbagai lapangan usaha. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026, selama lima tahun terakhir (2016-2020), Kabupaten Gresik ditandai oleh dominasi lima sektor utama dalam

LAPORAN AKHIR

struktur perekonomiannya. Sektor-sektor tersebut meliputi Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dominasi ini tercermin dari kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik. Pada tahun 2020, lapangan usaha Industri Pengolahan memainkan peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gresik, menyumbang sebanyak 49,59 persen dari total PDRB (naik dari 48,73 persen pada tahun 2016). Diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 12,47 persen (turun dari 12,86 persen pada tahun 2016), serta lapangan usaha Konstruksi yang menyumbang 9,42 persen (menurun dari 9,47 persen pada tahun 2016). Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 7,70 persen (turun dari 8,38 persen pada tahun 2016), dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menyumbang 5,96 persen (menurun dari 7,02 persen pada tahun 2016).

Berdasarkan Data Kabupaten Gresik Dalam Angka 2024, dapat diketahui bahwa pekerjaan utama yang terdapat di Kabupaten Gresik terdiri dari empat jenis. Pekerjaan utama tersebut yakni pengusaha, Buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Berikut adalah jumlah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Gresik Tahun 2023 :

Tabel 3. 9 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Dalam Pekerjaan Utama di Kabupaten Gresik Tahun 2023

No.	Status Dalam Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Berusaha sendiri	83.870	75.478	159.348
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	39.906	20.174	60.080
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	12.764	5.490	18.254
4	Buruh/karyawan/pegawai	252.867	109.704	362.571
5	Pekerja Bebeas	25.542	9.007	34.549
6	Pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar	8.912	44.931	53.843
Kabupaten Gresik		423.861	264.784	688.645

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk dengan pekerjaan utama sebagai buruh/pegawai/ karyawan lebih mendominasi yakni sebesar 362.571 jiwa. Kemudian diikuti oleh penduduk yang bekerja sebagai pengusaha sebanyak 159.348 jiwa, buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 60.080 jiwa dan yang paling kecil yakni penduduk yang bekerja sebagai buruh tetap/buruh dibayar sebesar 18.254 jiwa. Berdasarkan data yang

LAPORAN AKHIR

dipublikasikan Badan Pusat Statistik, tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik sebanyak 6,82%. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik berdasarkan Kabupaten Dalam Angka paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,00%. Tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling kecil di Kabupaten Gresik yakni sebesar 6,82%.

3.2.6 Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Penduduk Kabupaten Gresik terdiri dari beragam suku, dan agama. Namun secara umum Kabupaten di sebut sebagai kabupaten para santri. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Gresik merupakan penduduk yang beragama Islam serta tradisi dan budaya yang di wariskan oleh masyarakat itu bernuansa islami. Salah satu tradisi masyarakat Kabupaten Gresik yang masih ada sampai saat ini ialah Budaya Haul dan Sedekah Bumi. Tradisi ini merupakan tradisi yang dicetuskan oleh Sunan Prapen yang dahulu menyebarkan Agama Islam yang menyesuaikan dengan budaya lokal. Saat akhir masa pemerintahan Sunan Prapen sekitar 1.648 masehi, Beliau membangun cungkup makam bagi Sunan Giri dengan tujuan sebagai tanda jasa penghormatan bagi Sunan Giri dengan membangun makam serta melakukan perubahan cara penghormatan yang kemudian tradisi penghormatan ini berkembang dari masa ke masa. Terdapat tiga alasan pokok pelaksanaan haul yakni untuk mengembalikan wibawa Sunan Giri karena adanya serangan dari Kerajaan Majapahit dengan mengungkap sejarah dari Sunan Giri, membangkitkan semangat untuk beribadah serta bertujuan untuk membangkitkan perjuangan dan kerukunan.

Tradisi ini dilakukan untuk memberi penghormatan kepada para wali dan pada ulama serta tokoh agama yang memiliki pengaruh. Proses tradisi ini berupa penyerahan hasil tangkapan ikan yang diawali dengan penyembelihan sapi di Balai Gedhe serta dibarangi dengan ziarah, tahlil, Khotmil Quran dan Manaqiban. Tradisi ini menjaga nilai gotong royong dari masyarakat dimana dalam penyelenggaraannya masyarakat dengan suka rela menyumbang hasil tangkapan ikan mereka untuk pelaksanaan tradisi. Selain itu, terkadang acara ini ditambahi dengan acara hadrah atau kasidah yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan agar senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu terdapat pula tradisi Sedekah Bumi sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada yang Maha Kuasa atas nikmat panen yang mereka dapatkan.

LAPORAN AKHIR

Tradisi ini merupakan tradisi yang dilaksanakan masyarakat Gresik secara turun temurun yang mana juga memiliki tujuan untuk meminta keselamatan dari malapetaka dan kemaslahatan bagi masyarakat.

3.3 KONDISI INFRASTRUKTUR KABUPATEN GRESIK

3.3.1 Kondisi Sarana

Kabupaten Gresik memiliki beberapa jenis sarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Beberapa sarana yang terdapat di Kabupaten Gresik berupa sarana pendidikan, sarana Kesehatan, sarana peribadatan, sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berikut merupakan jabaran data sarana yang terdapat di Kabupaten Gresik:

3.3.1.1 Sarana Pendidikan

Kabupaten Gresik dalam Angka tahun 2023 menunjukkan bahwa, sarana pendidikan yang ada berupa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliya (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi (PT) dengan jumlah total 1.853 unit. Diketahui jumlah fasilitas pendidikan masing masing jenjang yakni sarana TK sebanyak 604 unit, Sekolah Dasar sebanyak 376 unit, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 3376 unit, Sekola Menengah Pertama sebanyak 122 unit, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 159 unit, Sekolah Menengah Atas sebanyak 52 unit, Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 61 unit, Madrasah Aliyah sebanyak 86 unit, dan Perguruan Tinggi sebanyak 17 unit. Berikut adalah jumlah sarana pada masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik

Tabel 3. 10 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Kecamatan	TK	SD	MI	SMP	Mts	SMA	MA	SMK	PT	Total
1	Balompanggang	30	18	18	6	2	3	1	1	0	79
2	Benjeng	62	20	20	6	6	3	3	3	0	123
3	Bungah	20	27	27	11	13	3	11	4	0	116
4	C e r m e	61	19	19	5	3	4	1	4	1	117
5	Driyorejo	48	13	13	11	8	5	1	6	0	105
6	Dudusampeyan	38	22	22	3	6	1	2	1	0	95
7	Dukun	32	29	29	2	18	4	5	7	0	126
8	Gresik	23	10	10	11	2	4	-	6	0	66
9	Kebomas	45	11	11	7	2	4	2	2	3	87
10	Kedamean	31	16	16	4	8	2	4	2	4	87
11	Manyar	38	32	32	10	11	3	6	4	2	138
12	Menganti	22	25	25	13	8	4	6	4	1	108
13	Panceng	23	27	27	6	17	1	10	3	1	115
14	Sangkapura	27	30	30	5	18	3	12	4	1	130
15	Sidayu	27	22	22	6	8	3	7	2	1	98

LAPORAN AKHIR

No	Kecamatan	TK	SD	MI	SMP	Mts	SMA	MA	SMK	PT	Total
16	Tambak	21	17	17	3	9	1	7	-	0	75
17	Ujungpangkah	35	24	24	7	13	3	6	4	2	118
18	Wringinanom	21	14	14	6	7	1	2	4	1	70
Kabupaten Gresik		604	376	376	122	159	52	86	61	17	1.853

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki sarana pendidikan paling banyak adalah Kecamatan Manyar sebanyak 138 unit sarana. Sedangkan kecamatan dengan sarana pendidikan paling sedikit yakni Kecamatan Gresik yakni sebanyak 66 unit sarana. Selain itu dapat diketahui bahwa jenis sarana pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Gresik adalah sarana Taman Kanak-Kanak sebanyak 604 unit dan sarana pendidikan paling sedikit berupa perguruan tinggi yakni sebanyak 17 unit.

3.3.1.2 Sarana Kesehatan

Kabupaten Gresik memiliki beberapa jenis fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan, dan poskesdes yang tersebar di 18 kecamatan. Data Kabupaten Gresik dalam Angka tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat total 1903 Unit di Kabupaten Gresik yang terdiri dari 19 unit rumah sakit, 3 unit rumah sakit bersalin, klinik/balai kesehatan 98 unit, 32 unit puskesmas, 1523 unit ppsyandu dan 228 unit poskesdes. Berikut merupakan data rincian dari persebaran sarana Kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik:

Tabel 3. 11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Klinik/Balai Kesehatan	Puskesmas	Posyandu	Poskesdes	Total
1	Balongpanggang	2	0	0	2	83	18	105
2	Benjeng	0	0	3	2	84	17	106
3	Bungah	1	0	2	1	75	14	93
4	C e r m e	0	0	9	2	79	19	109
5	Driyorejo	2	0	12	2	122	9	147
6	Dudusampeyan	0	0	4	1	65	17	87
7	Dukun	0	0	4	2	83	18	107
8	Gresik	6	0	8	3	92	12	121
9	Kebomas	1	1	19	2	147	11	181
10	Kedamean	0	0	1	2	77	9	89
11	Manyar	2	0	16	3	145	11	177
12	Menganti	3	0	8	2	133	15	161
13	Panceng	0	2	2	1	49	7	61
14	Sangkapura	1	0	3	1	66	13	84
15	Sidayu	0	0	1	1	52	15	69
16	Tambak	0	0	0	1	42	4	47

LAPORAN AKHIR

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Klinik/Balai Kesehatan	Puskesmas	Posyandu	Poskesdes	Total
17	Ujungpangkah	1	0	1	2	56	8	68
18	Balongpanggang	0	0	5	2	73	11	91
Kabupaten Gresik		19	3	98	32	1523	228	1903

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kecamatan dengan sarana Kesehatan terbanyak terdapat di Kecamatan Kebomas yakni memiliki total 181 unit sarana kesehatan. Sedangkan kecamatan dengan sarana kesehatan paling sedikit berada di Kecamatan Tambak yakni 47 unit. Selain itu dapat diketahui fasilitas kesehatan terbanyak yang terdapat di Kabupaten Gresik berupa posyandu yakni sebanyak 1523 unit. Sedangkan, sarana kesehatan yang paling sedikit berupa rumah sakit bersalin sebanyak 3 unit.

3.3.1.3 Sarana Peribadatan

Kabupaten Gresik dalam Angka 2024 menunjukkan bahwa terdapat 5 jenis sarana peribadatan dengan jumlah total 4202 unit yang tersebar di wilayah Kabupaten Gresik yang berupa Masjid, Mushola, Gereja, Vihara, dan Klenteng. Diketahui jumlah total dari masing-masing sarana peribadatan yakni 1927 unit Masjid, 2954 unit Mushola, 33 unit Gereja, 1 unit Vihara, dan 1 unit Klenteng.

Tabel 3. 12 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja	Vihara	Klenteng	Total
1	Balongpanggang	102	0	1	0	0	103
2	Benjeng	85	137	1	0	0	223
3	Bungah	59	207	0	0	0	266
4	Cerme	83	116	2	0	0	201
5	Driyorejo	86	279	9	0	0	374
6	Duduksampeyan	48	90	0	0	0	138
7	Dukun	61	164	0	0	0	225
8	Gresik	31	169	7	1	1	209
9	Kebomas	79	247	4	0	0	330
10	Kedamean	65	195	0	0	0	260
11	Manyar	90	219	0	0	0	309
12	Menganti	103	219	8	0	0	330
13	Panceng	41	148	0	0	0	189
14	Sangkapura	81	218	0	0	0	299
15	Sidayu	33	110	0	0	0	143
16	Tambak	46	100	0	0	0	146
17	Ujungpangkah	31	137	0	0	0	168
18	Wringinanom	89	199	1	0	0	289
Kabupaten Gresik		1927	2954	33	1	1	4202

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

LAPORAN AKHIR

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sarana peribadatan paling banyak di Kabupaten Gresik berupa Mushola yang berjumlah 2954 unit. Sarana peribadatan paling sedikit berupa Vihara dan Klenteng yakni masing-masing berjumlah 1 unit dan terletak di Kecamatan Gresik. Selain itu dapat diketahui bahwa Kecamatan dengan sarana peribadatan terbanyak yakni Kecamatan Menganti dengan jumlah total sarana peribadatan sebanyak 330 unit. Sedangkan Kecamatan Balongpanggang memiliki sarana peribadatan paling sedikit yakni sebanyak 103 unit.

3.3.1.4 Ruang Terbuka dan Olahraga

Kabupaten Gresik memiliki beberapa jenis lapangan olahraga yang terbagi menjadi 3 jenis yakni lapangan atau gedung yang bersifat permanen, semi permanen, dan musiman. Fasilitas sarana ruang terbuka dan olahraga tersebut tersebar di 18 Kecamatan yang terdiri dari beberapa jenis sarana seperti lapangan sepak bola, lapangan futsal, Bola Volley, lapangan basket, gedung badminton, gedung olahraga tenis meja, gedung olahraga renang, gedung olahraga selam, gedung atletik, lapangan tenis, gedung pencak silat, gedung karate, gedung olahraga catur, gedung olahraga bridge, gedung olahraga bola sodok, sarana berbain sepatu roda, lapangan takraw, gedung olahraga dayung, dan gedung olahraga panjat tebing

Tabel 3. 13 Jumlah Sarana Olahraga di Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Kecamatan	Lapangan/Gedung Olahraga			Total
		Permanen	Semi Permanen	Musiman	
1	Sepak Bola	56	10	0	66
2	Sepak Futsal	3	2	0	5
3	Volley	5	0	2	7
4	Basket	21	0	0	21
5	Badminton	4	10	2	16
6	Tenis Meja	1	0	1	2
7	Renang	1	0	0	1
8	Selam/Diving	1	0	0	1
9	Atletik	2	1	0	3
10	Tenis	13	0	0	13
11	Pencak Silat	1	0	0	1
12	Karate	1	17	0	18
13	Catur	1	10	0	11
14	Bridge	1	0	0	1
15	Bola Sodok	1	1	0	2
16	Sepatu Roda	0	1	0	1
17	Sepak Takraw	0	0	0	0
18	Dayung	64	0	0	64
19	Panjat Tebing	0	0	0	0
Kabupaten Gresik		188	52	5	245

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui jumlah total sarana olahraga yang terdapat di Kabupaten Gresik yakni sebanyak 245 unit. Jenis lapangan olah raga yang bersifat permanen lebih banyak yakni sejumlah 188 unit di bandingkan lapangan/gedung olahraga yang bersifat semi permanen dan musiman. Dapat diketahui sarana olahraga yang paling banyak di Kabupaten Gresik Berupa Lapangan Sepak Bola sejumlah 66 unit. Selain itu, sarana olahraga paling banyak juga berupa sepak bola yakni sejumlah 1 unit.

3.3.2 Kondisi Prasarana

3.3.2.1 Jaringan Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan sebagai bagian utama dalam sistem transportasi perlu dikembangkan untuk mendukung potensi wilayah Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu simpul strategis di Provinsi Jawa Timur terutama dalam bisang perindustrian dan pergudangan. Penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas dan memperkuat daya saing infrastruktur, dan lebih khusus ditujukan untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognasi dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Kabupaten Gresik memiliki banyak jembatan yang digunakan secara fungsional. Seperti jembatan manyar, jembatan sembayer baru, jembatan Tambak Ombo yang baru-baru ini dilakukan perbaikan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, dan saat ini jembatan yang sudah dalam perbaikan karena rusak itu sudah dapat dimanfaatkan secara optimal terutama kendaraan besar mengangkut bahan baku industri. Beberapa jembatan juga mulai dibangun di Kabupaten Gresik, seperti Jembatan Kacangan yang menghubungkan Desa Bulurejo dengan Desa Gluranploso, Kecamatan Benjeng. Namun, belum adanya jembatan pada wilayah Gresik Selatan.

Kondisi jalan di ruas Kabupaten Gresik mengalami arus yang mendekati kemacetan dengan nilai derajat kejenuhan lebih dari 0.75. Beberapa ruas tersebut adalah ruas JL. Raya Sukomulyo dan Jl. Raya Manyar dikarenakan adanya kawasan sekolah, aktivitas lalu lintas penyeberangan warga antar Desa Gandeng dan Desa Manyar, dan ada penyempitan jalan

LAPORAN AKHIR

(bottleneck) pada jembatan Sukomulyo. Sementara itu exit toll Surabaya-Gresik pada gerbang Tol Kebomas disebabkan banyaknya volume lalu lintas kendaraan penumpang maupun kendaraan berat yang menggunakan tol menuju Gresik atau Lamongan. Ruas Jl. Raya Banjarsari juga mengalami kejenuhan karena adanya manuver kendaraan berat pada simpang bunder, pada titik tersebut juga terdapat aktivitas keluar masuk bis dari Terminal Bunder. Sedangkan ruas Jl. Cerme Kidul mengalami kejenuhan karena adanya aktifitas Pasar Cerme dan pelintasan sebidang kereta api sebelah timur Stasiun Cerme. Dapat disimpulkan bahwa total ruas yang memiliki nilai derajat kejenuhan lebih dari 0.75 pada kondisi jalan Kabupaten Gresik adalah 3,37% dari total jumlah ruas jalan yang apabila dimodelkan menggunakan SATURN, yaitu sebanyak 326 ruas jalan.

Panjang jalan di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 tercatat sebesar 684,68 km yang terdiri dari 93,21 km jalan negara, 24,86 jalan provinsi, dan 566,61 km jalan kabupaten. Selanjutnya, dilihat berdasarkan jenis permukaan jalan kabupaten, 280,87 km merupakan jalan aspal, 5,24 km jalan kerikil, 1,71 km jalan tanah, dan 278,77 km merupakan jalan beton. Dilihat dari status jalan yang berada di Kabupaten Gresik didominasi jalan Kabupaten Jalan ini meliputi jalan yang menghubungkan antarwilayah kecamatan di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 14 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik (Km)

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2021	2022	2023
Negara	92,95	93,21	93,21
Provinsi	21,03	21,03	24,86
Kabupaten/Kota	512,16	512,16	566,61
Jumlah	626,14	626,4	684,68

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

Sebagian besar kondisi struktur jalan di Kabupaten Gresik memiliki jenis permukaan jalan berupa teraspal yaitu sepanjang 280,87 km pada tahun 2023. Panjang jalan dengan perkerasan kerikil sepanjang 5,26 km dan panjang jalan dengan jenis perkerasan tanah adalah 1,71 km serta 278,77 km jalan dengan perkerasan beton.

Tabel 3. 15 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2021 - 2023

Jenis Permukaan Jalan	2021	2022	2023
Aspal	257,04	266,20	280,87
Kerikil	12,85	8,00	5,26
Tanah	2,80	0,80	1,71
Beton	239,47	237,16	278,77
Jumlah	512,16	512,16	566,61

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

LAPORAN AKHIR

Dilihat dari panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Gresik, panjang jalan di dominasi oleh jalan dengan kondisi baik. Panjang jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Gresik sepanjang 309,72 km, jalan dengan kondisi sedang sepanjang 96,78, kondisi jalan dengan kondisi rusak sepanjang 148,54 km dan kondisi jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 11,57 km. Berikut adalah panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Gresik:

Tabel 3. 16 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2022

Kondisi Jalan	2021	2022	2023
Baik	284,81	284,72	309,72
Sedang	91,85	94,28	96,78
Rusak	119,85	124,37	148,54
Rusak Berat	15,65	9,97	11,57
Jumlah	512,16	512,17	566,61

Sumber : Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

3.3.2.2 Transportasi Publik

Sistem transportasi sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan system transportasi dapat membuat mobilitas antar titik dalam suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Sarana transportasi yang lancer dan murah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kabupaten gresik memiliki 2 jenis transportasi yakni transportasi darat dan transportasi air.

1. Transportai Darat

Kabupaten Gresik memiliki 3 teminal dalam mendukung kebutuhan mobilitas darat masyarakat. Terminal tersebut yakni Terminal Menganti, Terminal Gulomantung dan Terminal Gubernur Suryo. Berikut merupakan data jumlah kendaraan yang masuk terminal di wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2023:

Tabel 3. 17 Jumlah Kendaraan yang Masuk Terminal Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Bulan	Terminal		
		Menganti	Gulomantung	Gubernur Suryo
1	Januari	2.726	4.888	8.511
2	Februari	7.659	39	20.131
3	Maret	6.980	35	18.987
4	April	7.305	43	7.01
5	Mei	6.874	28	16.081
6	Juni	7.301	45	22.874
7	Juli	6.959	51	22.006
8	Agustus	7.177	60	24.694
9	September	7.018	35	22.631
10	Oktober	6.605	38	22.072
11	November	6.559	51	21.515
12	Desember	6.586	43	20.015

No	Bulan	Terminal		
		Menganti	Gulomantung	Gubernur Suryo
Jumlah Total		83.438	526	236.922

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terminal yang paling banyak melayani kendaraan masuk adalah Terminal Gubernur Suryo yakni sebanyak 236.922 kendaraan pada tahun 2023. Sedangkan terminal yang paling sedikit melayani kendaraan masuk adalah Terminal Gulomantung sebanyak 526 kendaraan. Diketahui bahwa di tahun 2023 bulan-bulan dengan kendaraan masuk terminal paling ramai berda di bulan Juni, Agustus, September, dan Oktober. Sedangkan bulan dengan kendaraan masuk terminal lebih sedikit pada bulan Januari hingga Maret.

2. Tranportasi Laut

Kabupaten Gresik hanya memiliki Pelabuhan Muat yakni pelabuhan yang melayani pengangkutan barang baik untuk di ekspor antar daerah maupun ke luar negeri. Arus perdagangan ekport import Kabupaten Gresik dapat dilihat dari data besaran atau volume serta nilai ekport import. Diketahui bahwa pada tahun 2020 volume ekspor Kabupaten Gresik turun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2.036,16 ribu ton dengan nilai sebesar 938,81 juta \$US. Berikut merupakan data ekpor Kabupaten Gresik di Pelabuhan Gresik dari tahun 2017-2023:

Tabel 3. 18 Ekspor Kabupaten Gresik di Pelabuhan Gresik Tahun 2017-2023

No	Tahun	Volume Ekspor (ribu ton)	Nilai FOB (Juta US \$)
1	2017	1.863,97	1.056,87
2	2018	1.756,30	990,55
3	2019	2.221,33	1.022,81
4	2020	2.036,16	938,81
5	2021	2.383,29	1.608,66
6	2022	2.451,26	2.023,13
7	2023	2.589,89	1.445,24

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa volume ekpor terbesar dalam 7 tahun terakhir di Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik berada pada tahun 2023 yakni sebesar 2.589,98 ton dengan nilai FOB sebesar 1.445,24 juta \$US. Sedangkan ekpor terkecil terjadi pada tahun 2018 yakni volume sebesar 1,756.30 ton dengan nilai FOB sebesar 990,55 juta \$ US.

LAPORAN AKHIR

Tabel 3. 19 Impor Kabupaten Gresik di Pelabuhan Gresik Tahun 2017-2023

No	Tahun	Volume Impor (ribu ton)	Nilai FOB (Juta US \$)
1	2017	8.029,69	1.567,72
2	2018	6.455,61	1.968,55
3	2019	7.323,68	1.591,80
4	2020	6.933,87	1.334,49
5	2021	8.419,05	2.245,60
6	2022	7.309,93	3.161,86
7	2023	6.651,62	2.029,42

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa volume impor terbesar dalam 7 tahun terakhir di Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik berada pada tahun 2021 yakni sebesar 8.419,05 ton dengan nilai FOB sebesar 2.245,60 juta \$ US. Sedangkan impor terkecil terjadi pada tahun 2018 yakni volume sebesar 6.455,61 ton dengan nilai FOB sebesar 1.968,55 juta \$ US.

3.3.2.3 Jaringan Air Bersih

Pelayanan kebutuhan air bersih Kabupaten Gresik dipenuhi melalui beberapa sumber seperti Sumber mata air yang dikelola PDAM dan ada juga dipenuhi melalui air sumur ataupun air sungai. Namun berdasarkan data Kabupaten Gresik dalam Angka Tahun 2023 yang terlayani PDAM Gresik hanya 11 kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada. Kecamatan yang terlayani PDAM area layanan Gresik yakni Kecamatan Wringinanom, Driyorejo, Kedamean, Menganti, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Duduksampeyan, Kebomas, Gresik, dan Manyar. Berikut merumakan data jumlah pelanggan air PDAM menurut kecamatan di Kabupaten Gresik tahun 2023.

Tabel 3. 20 Jumlah Pelanggan Air Bersih Menurut Kecamatan di Cabang PDAM Area Pelayanan Gresik Tahun 2023

No	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp.)
1	Wringinanom	153	87.267	1.069.620.940
2	Driyorejo	25.257	6.400.892	31.126.201.195
3	Kedamean	1.284	218.058	1.717.405.280
4	Menganti	19.297	3.852.802	18.409.424.795
5	Cerme	15.883	3.444.867	13.951.775.910
6	Benjeng	2.693	678.043	2.713.335.265
7	Balongpanggang	1.000	384.647	1.720.006.750
8	Duduksampeyan	2.462	535.997	2.303.694.355
9	Kebomas	27.491	9.100.449	71.378.985.430
10	Gresik	11.154	2.515.202	11.189.315.215
11	Manyar	13.865	6.939.172	61.505.194.175
12	Bungah	-	-	-

LAPORAN AKHIR

No	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp.)
13	Sidayu	-	-	-
14	Dukun	-	-	-
15	Panceng	-	-	-
16	Ujungpangkah	-	-	-
17	Sangkapura	-	-	-
18	Tambak	-	-	-
Kabupaten Gresik		120.539	34.157.396	217.084.959.310

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah total pelanggan cabang PDAM Kabupaten Gresik sebesar 102.539 dengan konsumsi air sebesar 34.157.396 m³ dan memperoleh pemasukan sebesar Rp. 217.084.959.310. Kecamatan dengan pelanggan air bersih cabang terbanyak ialah Kecamatan Kebomas yakni sebanyak 27.491 pelanggan, dengan konsumsi air mencapai 9.100.449 m³. Sedangkan kecamatan dengan pelanggan air bersih paling sedikit yakni Kecamatan Wringinanon sebanyak 153 pelanggan dengan konsumsi pemakaian mencapai 87.267 m³. Namun, dapat diketahui bahwa besaran pendapatan tiap kecamatan sangat bergantung dengan jumlah konsumsi air.

Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh PDAM dan Non PDAM. Pelayanan air minum PDAM dilaksanakan dan dikelola oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik, sedangkan Non PDAM dilakukan oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk kawasan-kawasan yang belum terjangkau oleh PDAM.

Tabel 3. 21 Jumlah Penduduk Area Pelayanan dan Jumlah Penduduk terlayani PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2019

No	Pelayanan	Penduduk (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)	Persentase Pelayanan (%)
1	Cabang Kota	257.230	190.456	53.31
2	Cabang Cerme	204.593	60.404	29.52
3	Cabang Menganti	188.355	59.392	31.53
4	Cabang Driyorejo	175.943	87.938	49.98
Jumlah		926.121	398.180	42.99

Sumber: RISPAM Kabupaten Gresik, 2020

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa penduduk paling banyak terlayani PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik yaitu Cabang Kota dengan jumlah 190.456 jiwa dari 257.230 jiwa atau 53.31%. Sedangkan pelayanan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik paling sedikit yaitu Cabang Driyorejo dengan penduduk yang terlayani sebanyak 87.938 dari 175.943 atau 49.98%. presentase pelayanan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik tahun 2020 sebanyak

LAPORAN AKHIR

42.99% atau 398.180 jiwa dari total penduduk cabang Kota, Cabang Cerme, cabang Menganti, dan Cabang Driyorejo sebanyak 926.121 jiwa.

Terdapat potensi terkait jaringan air bersih di Kabupaten Gresik yaitu terkait air baku di Wilayah Kabupaten Gresik selain berupa mata air dan Air Bawah Tanah (ABT) adalah air permukaan berupa sungai dan embung atau waduk. Embung waduk atau Aliran sungai yang dimiliki Kabupaten Gresik tersebut berpotensi dapat dikelola dalam rangka upaya untuk pemenuhan sumber air baku air bersih di Kabupaten Gresik pada masa yang akan datang.. Salah satu waduk yang berpotensi dapat dikelola untuk pemenuhan sumber air baku air bersih khususnya di Wilayah Gresik Utara adalah Waduk Sukodono yang ada di Kecamatan Panceng. Beberapa sumber mata air yang berada di lahan milik warga dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Didalam potensi yang ada, terdapat juga permasalahan terkait jaringan air bersih di Kabupaten Gresik yaitu pada Cabang Gresik Kota secara umum adalah kekurangan suplai air bersih dengan perkiraan kapasitas sebesar ± 150 L/det. Di Cabang Cerme adalah sistem pendistribusian air ke pelanggan yang hanya menggunakan 1 unit pompa, dimana kapasitasnya masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. di Cabang Menganti adalah seringnya terjadi kebocoran pada jaringan pipa distribusi karena jumlah unit air valve yang dipasang masih kurang. Dan di Cabang Driyorejo adalah pendistribusian air bersih di daerah Bambe kurang lancar karena diameter pipa distribusi eksisting yang kurang besar.

3.3.2.4 Jaringan Irigasi

Panjang Jaringan Irigasi keseluruhan di Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebesar 147.356 meter. Dari panjang tersebut sebesar 51.554,19 meter atau sebesar 34,23% berada dalam kondisi baik. Jumlah ini meningkat daripada tahun 2018 yang panjang irigasi dalam kondisi baik sebesar 43.744,69 meter atau sebesar 29,69%. Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik ini meningkat 5,3% dari tahun sebelumnya. Peningkatan irigasi kondisi baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur.

LAPORAN AKHIR

Jaringan irigasi di Kabupaten Gresik terdiri dari jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer yang berada di Kabupaten Gresik berjumlah sebanyak 103 yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik, jaringan irigasi sekunder tersebar pada seluruh wilayah kabupaten dan terintegrasi dengan jaringan primer. Sawah irigasi tersebar di Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu, dan Dukuh dengan luasan sekitar $\pm 26.614,74$ Ha. Berikut data terkait sawah irigasi yang terdapat di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 22 Luas Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Gresik dari Tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah luas lahan sawah irigasi (Ha)
1	2013	8381
2	2014	8381
3	2015	7872
4	2016	7992
5	2017	7542

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa luas lahan sawah irigasi terluas yaitu pada tahun 2013. Sedangkan, luas lahan sawah irigasi terkecil yaitu 2017. Dapat disimpulkan bahwa, lahan sawah irigasi mengalami penurunan pada tahun 2014 ke tahun 2015 sebanyak 509 Ha dan tahun 2016 ke 2017 sebanyak 450 Ha. Peningkatan luas lahan sawah irigasi hanya pada tahun 2015 ke 2016 sebanyak 120 Ha.

Moderni Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional menghadapi kendala tingginya alih fungsi lahan, defisit air irigasi, serta potensi kompetisi penggunaan air dengan kawasan perkotaan dan industri. Upaya penyediaan infrastruktur irigasi juga masih belum sejalan dengan kebijakan pengembangan lahan pertanian baru. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Sebagian besar sistem irigasi belum didukung dengan keandalan pasokan air, dimana baru sekitar 12,5 persen sistem irigasi yang dilayani oleh waduk. Upaya operasi dan pemeliharaan sistem irigasi masih perlu ditingkatkan melalui pengelolaan sistem irigasi yang modern yang selanjutnya tidak hanya dimanfaatkan untuk irigasi padi tetapi juga untuk produk pertanian nonpadi bernilai tinggi. Selain itu, upaya sinkronisasi pembangunan irigasi baru dan pembukaan lahan pertanian masih perlu ditingkatkan.

LAPORAN AKHIR

3.3.3.5 Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Persampahan

Sistem jaringan persampahan yang berada di Kabupaten Gresik dibedakan menjadi tiga, yaitu Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang terdapat di TPA Ngipik. Berdasarkan Kabupaten Gresik dalam Angka 2024, hampir seluruh kecamatan sudah memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS). Berdasarkan data tersebut, terdapat 4 kecamatan yang belum memiliki TPS diantaranya Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Tambak, dan kecamatan Ujungpangkah. Berikut merupakan jumlah dan kapasitas TPS yang ada di Kabupaten Gresik.

Tabel 3. 23 Jumlah dan Kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kabupaten Gresik tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Kapasitas TPS (ton/hari)				Kapasitas TPS (ton/tahun)			
			10m3	6m3	2m3	Total	10m3	6m3	2m3	Total
1	Balongpanggang	1	0	2	0	2	0	547,50	0	547,50
2	Benjeng	3	0	4	0	4	0	1.368,75	0	1.368,75
3	Bungah	6	0	3	0	3	0	1.186,25	0	1.186,25
4	C e r m e	14	0	12	0,25	13	0	4.471,25	91,25	4.562,50
5	Driyorejo	5	5	1	0	6	1.825,00	456,25	0	2.281,25
6	Duduksampeyan	11	0	6	0,50	7	0	2.281,25	182,50	2.463,75
7	Dukun	3	0	2	0	2	0	730,00	0	730,00
8	Gresik	17	0	63	0,25	63	0	22.903,75	91,25	22.995,00
9	Kebomas	38	0	45	4,17	50	0	16.607,14	1.520,83	18.127,97
10	Kedamean	1	0	1	0	1	0	182,50	0	182,50
11	Manyar	13	0	27	0,25	28	0	9.946,25	91,25	10.037,50
12	Menganti	14	0	13	0	13	0	4.653,75	0	4.653,75
13	Panceng	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sangkapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sidayu	2	0	4	0	4	0	1.368,75	0	1.368,75
16	Tambak	0	0	0	-	0	0	0	0	0
17	Ujungpangkah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Wringinanom	1	0	1	0	1	0	273,75	0	273,75
Jumlah		129	5	183,50	0	193,92	1.825,00	66.977,14	1.977,08	70.779,22

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

Permasalahan penanganan sampah disebabkan karena ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang ditimbulkan dengan pelayanan penanganan yang dapat diberikan. Pelayanan pemerintah daerah belum dapat menangani sampah seluruhnya. Keterbatasan sarana menyebabkan hanya sebagian sampah yang terangkut ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah. Oleh karena itu pelaksanaan pengelolaan sampah harus melibatkan masyarakat karena sebagai penghasil utama sampah, masyarakat juga harus merasakan dampak negatif jika sampah tidak tertangani.

B. Air Limbah

LAPORAN AKHIR

Kondisi sanitasi di Kabupaten Gresik berdasarkan Persentase Desa/ Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), yaitu Realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 12,07%, sedangkan target yang ditetapkan ditahun 2018 sebesar 10%, sehingga capaian yang diperoleh yaitu 121. Pada tahun 2019 dari 356 Desa di Kabupaten Gresik, terdapat 43 Desa/ Kelurahan STBM, tahun ini mengalami peningkatan 14 Desa yang ber STBM dari tahun lalu yang hanya 29 Desa. Keberhasilan ini didapatkan karena adanya dukungan SK Bupati No. 910/205/HK/407.12/2015 tentang Tim Percepatan Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Mandiri di Kabupaten Gresik serta dukungan lintas sectoral dan lintas program terkait.

Hampir semua rumah di Kabupaten Gresik sudah memiliki jamban pribadi. Diketahui bahwa penduduk Kabupaten Gresik yang buang air besar ke jamban pribadi sebesar 99,25%, ke jamban tetangga/saudara sebanyak 0,5% dan ke MCK/WC umum sebanyak 0,25%. Diketahui persentase tempat penyaluran air kotor/ limbah tinja manusia di Kabupaten Gresik sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3. 24 Presentase Tempat Penyaluran Akhir Tinja

No	Tempat	Presentase (%)
1	Kebun/Tanah/lapang	1,13
2	Kolam/sawah	0,13
3	Langsung ke saluran drainase	0,13
4	Tangki septik konstruksi sendiri sesuai SNI (kedap samping dan dasar)	14,63
5	Cubluk/lubang tanah	85,00

Sumber: Strategi Sanitas Kabupaten (SSK) Kabupaten Gresik Tahun 2020

Tempat penyaluran akhir tinja di Kabupaten Gresik disalurkan pada 6 (enam) tempat seperti yang tertera pada tabel diatas, antara lain sebanyak 85,00% dibuang ke cubluk/lubang tanah, sebanyak 14,63% ke tangki septik konstruksi sendiri (kedap samping dan dasar), sebanyak 0,13% ke kolam/sawah, sebanyak 0,13% dibuang langsung ke drainase, dan sebanyak 0,13% dibuang ke kebun/tanah lapang.

Akses masyarakat terhadap layanan sanitasi permukiman (air limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan) masih sangat rendah. Banyak hal yang menjadi penyebab rendahnya akses sanitasi ini, mulai dari kurangnya perhatian pemerintah akan pentingnya sanitasi yang sering mengakibatkan pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan dari pemerintah, hingga rendahnya kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Lebih jauh buruknya kondisi sanitasi membawa dampak

LAPORAN AKHIR

atau efek domino yang sangat luas, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup termasuk pencemaran sumber air bersih, meningkatnya angka penyakit sebagai akibat sanitasi buruk, hingga menurunnya citra kabupaten/kota sebagai daerah tujuan wisata atau investasi dan menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum.

C. Jaringan Listrik

Berdasarkan Data Kabupaten Gresik dalam Angka 2024, kelistrikan secara makro dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) dengan persentase umum pelanggan yakni 90,54% kebutuhan rumah tangga, sebesar 5,70% kebutuhan bisnis, sebesar 0,14% untuk sektor industri, sebesar 2,95% untuk kebutuhan sosial, dan sebesar 0,68% untuk kebutuhan pemerintahan. Adapun wilayah pelayanan energi listrik untuk PT PLN (persero) cabang Gresik yakni meliputi kecamatan Cerme, Benjeng, Balongpanggang, DuduGresik, Manyar Bungah, Sidayu, Dukun, Panceng, Ujungpangkah, Sangkapura, dan Tambak. Adapun kecamatan yang dilayani PT PLN diluar Gresik yaitu Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Driyorejo yang dilayani wilayah kerja PLN UP3 Sidoarjo, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Menganti dilayani oleh PLN UP3 Surabaya Barat. Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2023 mencapai 335.275.

Tabel 3. 25 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Cabang PLN Area Pelayanan Gresik Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Wringinanom	Dilayani wilayah lain	Dilayani wilayah lain	Dilayani wilayah lain	Dilayani wilayah lain	Dilayani wilayah lain
2	Driyorejo					
3	Kedamean					
4	Menganti					
5	Cerme	26.593	26.818	27.624	29.441	32.079
6	Benjeng	15.532	15.621	16.09	19.785	20.843
7	Balongpanggang	17.113	17.214	17.731	16.539	17.533
8	Duduksampean	11.538	11.641	11.991	12.285	12.932
9	Kebomas	45.157	45.882	47.261	56.29	59.852
10	Gresik	33.446	33.795	34.812	26.724	27.965
11	Manyar	41.706	42.297	43.568	50.981	54.765
12	Bungah	17.576	17.716	18.248	20.22	21.802
13	Sidayu	10.654	10.765	11.089	13.655	14.634
14	Dukun	17.416	17.594	18.123	17.522	18.52
15	Panceng	17.336	17.477	18.002	16.207	16.524
16	Ujungpangkah	11.711	11.824	12.179	15.369	16.386
17	Sangkapura	14.872	15.454	15.918	13.641	13.795
18	Tambak	6.63	6.889	7.096	7.925	7.645
Kabupaten Gresik		287.280	290.987	299.732	316.584	335.275

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2024

LAPORAN AKHIR

D. Jaringan Drainase

Dalam hal infrastruktur drainase, Kondisi sistem drainase permukiman di wilayah-wilayah kecamatan atau desa di Kabupaten Gresik, selain di wilayah kota masih banyak terdapat daerah terbuka yang mampu berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga potensi banjir dan genangan kecil. Sedangkan di wilayah perkotaan Gresik, khususnya di wilayah Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar walaupun telah memiliki sistem drainase yang terbangun cukup lengkap dan merata di seluruh wilayah kota, tetap saja banjir dan genangan masih sering terjadi di beberapa lokasi terutama apabila terjadi hujan yang cukup lebat. Keadaan ini disebabkan oleh saluran-saluran tersier dan sekunder yang dimensinya terlalu kecil, tersumbat sampah, dan bozem-bozem yang tidak lagi berfungsi akibat pendangkalan dan pengurukan menjadi kawasan permukiman.

Sistem drainase Kota Gresik sangat kompleks karena selain terdapat sungai/saluran drainase juga terdapat bozem, pompa banjir dan pintu air mengingat lokasi Kota Gresik yang berada di tepi pantai sehingga sistem drainasenya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. penelusuran alur drainase dan batas daerah pematusan yang telah dilakukan ternyata di Kota Gresik terdapat 27 (dua puluh tujuh) sistem drainase primer dan 12 (dua belas) system lainnya dengan luas total 74,53 km² (7452,506 Ha). Yang dimaksud dengan sistem lainnya adalah system dengan luas catchment area yang kecil atau system tersendiri yang langsung menuju ke laut, telaga atau Kali Lamong. Kondisi di wilayah masing-masing sistem drainase dilihat dari penggunaan lahan di *catchment area* dan juga panjang drainase akan diuraikan di bawah ini.

Tabel 3. 26 Panjang dan *catchment area* Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan di Kabupaten Gresik

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Jumlah/ Panjang (m)	<i>catchment area (ha)</i>
1	Sistem kali tengger	10.882	601,639
2	Sistem kali Roomo	8.307	661,306
3	Sistem drainase petrokimia	6.117	235,308
4	Sistem kali towo	2.513 + 1 unit	124,715
5	Sistem kali tutup barat	2.930 + 1 unit	44,192
6	Sistem kali tutup timur	2.265	90,681
7	Sistem drainase yos sudarsono	925	37,478
8	Sistem drainase tlogodendo	3.344 + 3 unit	300,745
9	Sistem drainase sidorukun indah	1.090	29,522
10	Sistem drainse pelabuhan semen	1.818	59,850
11	Sistem drainase sidorukun	325	19,914
12	Sistem kali indro	3.431	257,401
13	Sistem drainase tenggulun	702	65,398
14	Sistem drainase karangkering	555	22,191
15	Sistem drainase segoromadu 1	1.237	50,996
16	Sistem drainase veteran	1.269	40,665
17	Sistem drainase segoromadu 2	1.058	149,308

LAPORAN AKHIR

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Jumlah/ Panjang (m)	catchment area (ha)
18	Sistem drainase segoromadu 3	825	78,889
19	Sistem drainase gulomantung	4.798	441,398
20	Sistem drainase timur tol-kali lamong	2.801	149,874
21	Sistem drainase barat tol-kali lamong	4.603	224,020
22	Sistem drainase kedanyang	2.211	332,180
23	Sistem drainase banjaranyar 1	3.003	240,566
24	Sistem drainase banjaranyar 2	658	187,677
25	Sistem drainase telabo	9.525	929,757
26	Sistem kali manyar 1	1.679	600,051
27	Sistem kali manyar 2	5.679	498,161

Sumber: Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Gresik Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kota Gresik (wilayah perkotaan yang terdiri 3 kecamatan yaitu Gresik, Kebomas dan Manyar) mempunyai 27 sistem drainase utama yang terdiri dari drainase primer, sekunder dan primer. Semua sistem drainase tersebut masih berfungsi meskipun ada yang tersumbat baik oleh sampah maupun tanah sehingga menyebabkan banjir/genangan. Namun, terdapat lokasi genangan sebagian besar terjadi di wilayah tengah ke selatan. Genangan terbesar di kecamatan Manyar sebesar 208 Ha, disusul kecamatan Kebomas 151 Ha. Desa/kelurahan yang mengalami genangan terbesar di desa Sukomulyo kecamatan Manyar sebesar 75,9 Ha.

Permasalahan umum drainase di Kabupaten Gresik yang ada sekarang adalah berupa banjir dan genangan yang disebabkan oleh faktor-faktor Pertambahan debit limpasan akibat perubahan tataguna lahan, Dimensi saluran dan atau dimensi gorong-gorong yang ada sudah tidak lagi memadai, Hambatan aliran pada saluran, Saluran mengalami penyempitan, Sistem drainase yang belum tertata dengan baik, dan Kurang memadainya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan saluran drainase.

3.3.3.6 Ruang Publik

A. Jalur Pejalan Kaki

Di Kabupaten Gresik Hierarki (peranan) Jalan dengan fungsi pergerakan pejalan kaki dibedakan menjadi tiga. Yaitu peranan jalan arteri tidak ada pergerakan pejalan kaki, kecuali diberi pemisah secara vertikal. Kemudian peranan jalan kolektor aktivitas pejalan kaki dibatasi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan. Dan peranan jalan lokal, bahwa penyeberangan dikontrol dengan kanalisasi (*zebra cross*). Simpul transportasi perKabupatenan harus memiliki fasilitas pejalan kaki dan fasilitas parkir pindah moda (*park and ride*), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter).

LAPORAN AKHIR

Di wilayah Kabupaten Gresik saat ini sangat banyak ditemukan jalur pejalan kaki khususnya di wilayah Kota yaitu di Jl. Panglima Sudirman, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dr. Soetomo, Jl. RA. Kartini. Di sepanjang jalan tersebut juga banyak ditemukan PKL dan pengamen serta pengemis yang dapat mengganggu pejalan kaki yang melintas. Beberapa Jalur Pejalan Kaki di Kabupaten Gresik sudah mulai digarap. Lebih tepatnya kawasan heritage yang berada di Jalan Setia Budi, Jalan AKS Tuban, dan Jalan KH. Zubair. Pada Pengembangan Stasiun Duduksampeyan menjadi stasiun kelas II dengan menggunakan konsep kawasan berorientasi transit yang berhubungan dengan angkutan masal lainnya seperti terminal yang dilengkapi oleh jalur pejalan kaki.

B. RTH

Kabupaten Gresik saat ini mengalami pembangunan wilayah fisik yang pesat terutama perumahan, perdagangan jasa, dan industri, dan jumlah penduduk yang selalu bertambah. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai salah satu faktor yang turut andil dalam mendukung keseimbangan lingkungan di kawasan perkotaan di Kabupaten Gresik. Maka perlu diperhatikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkait kecakupannya. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 yang dituangkan dalam pasal 22 ayat 1 huruf d dan e disebutkan bahwa penyediaan RTH perkotaan publik dengan luas 20% dari luas kawasan perkotaan dan penyediaan RTH perkotaan privat dengan luas 10% dari luas kawasan perkotaan. Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 1.191,25 km² telah memiliki ruang terbuka hijau kurang dari 20%, hal itu terbagi dalam beberapa bentuk ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dsb. Berikut ini disajikan tabel berupa luasan pada tiap klasifikasi.

Tabel 3. 27 Data Luas RTH Kabupaten Gresik Sampai Dengan Januari 2017

No	Jenis RTH	Luasan RTH (km ²)
1	Taman Kota	161.08
2	Hutan Kota	357.19
3	Pemukaman	13.5
4	Median dan Pulau Jalan	4.2
5	Sempadan Sungai	11.2
6	Sempadan Pantai	3.74
7	Sepadan Telaga	1.05
8	Sepadan Rel KA	0.63
9	Sepadan SUTT	1.15
10	RTH Kawasan Industri	135.51
11	RTH Pemukiman	33.81

LAPORAN AKHIR

No	Jenis RTH	Luasan RTH (km ²)
12	Tugu Kartanegara	22
Jumlah		736.06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, 2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis RTH paling luas yaitu jenis RTH Hutan Kota, sedangkan jenis RTH paling kecil yaitu jenis RTH Sepadan Telaga. jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten Gresik yaitu 736.06 Km². Dinas lingkungan hidup selaku penanggung jawab atas pelaksanaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik masih berupaya untuk mencapai batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No 26 tahun 2007 sebesar 30%.

BAB IV

METODOLOGI

4.1 PENDEKATAN PENYUSUNAN

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik pada dasarnya berorientasi kepada hal-hal sebagai berikut:

A. Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pendekatan perencanaan program yang berwawasan lingkungan menuntut tercapainya hasil-hasil perencanaan sarana dan prasarana lingkungan yang senantiasa berorientasi pada kondisi lingkungan alami tidak merusak ekosistem yang ada melalui perubahan-perubahan akibat desain yang seminimal mungkin.

B. Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan

Pendekatan perencanaan berkelanjutan (*Sustainable Development*) akan mendorong perencanaan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan dan pemanfaatan ruang semaksimal mungkin untuk kebutuhan saat ini, namun tetap berorientasi pada masa yang akan datang dengan tetap memanfaatkan ruang seoptimal mungkin untuk kebutuhan saat ini, namun tetap memanfaatkan ruang seoptimal mungkin dengan tidak merusak lingkungan.

C. Perencanaan Pembangunan Terpadu

Pendekatan perencanaan program ini merangkum 2 arah pendekatan, yaitu perencanaan program dari atas ke bawah sebagai penurunan kebijaksanaan pembangunan pada tingkat regional. Pendekatan ini lebih dikenal sebagai pendekatan "*top down*".

Arah pendekatan berikutnya adalah pembangunan dari bawah ke atas yang mengakomodasikan sumber daya lokal yang tersedia setelah dianalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Pola pendekatan yang lebih menitik beratkan pada pendekatan "*bottom up*" ini menyangkut kebijaksanaan dan manajemen pemerintahan yang menuntut

LAPORAN AKHIR

bahwa segala aspek manajemen sesuai dengan usulan dari bawah. Memperhatikan bahwa pendekatan ini mempunyai kelemahan, khususnya dalam hal teknis, administratif, dan keuangan. Selanjutnya sisi kelemahan dari metode pendekatan ini dilingkupi dengan pendekatan *top down*. Pendekatan di sisi ini lebih bersifat bantuan dan pembinaan teknis kepada masyarakat atau unsur lainnya yang terlibat dalam proses pembangunan melalui *bottom up planning*.

D. Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Intersektoral – Holistic

Pendekatan perencanaan program ini bertumpu pada perencanaan program yang selalu terkait dengan sektor–sektor lain serta wilayah dengan skala lebih luas secara regional atau nasional. Sehingga pada tahap selanjutnya didapat koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan sektor terkait. Metode ini juga menuntut adanya keterpaduan yang selaras dan seimbang dalam pengembangan setiap komponen pembangunan, terutama yang mengacu pada kajian terhadap kebijaksanaan sektoral tentang Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik.

Adanya keterpaduan antara berbagai sektor dan bidang pembangunan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam satu scope program pengembangan sektoral akan menghasilkan perencanaan program yang terintegrasi dengan kebijakan dan arahan pemanfaatan ruang dalam skala yang lebih luas.

4.2 METODE PENGUMPULAN DATA**4.2.1 Data Primer**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik terdiri dari pengumpulan data primer dan sekunder.

A. Data Primer

Data primer merupakan data dan pengamatan yang dikumpulkan secara langsung dari responden/masyarakat dengan metode survei, observasi dan wawancara.

LAPORAN AKHIR

1. Observasi

Observasi, dilakukan untuk mendapatkan informasi dan fakta primer/langsung tentang kondisi pelayanan infrastruktur di Kabupaten Gresik yang merupakan hasil pengamatan lapangan secara visual.

2. Angket/Kuisisioner

Angket/Kuisisioner, dilakukan untuk mendapatkan gambaran primer dari responden/masyarakat tentang persepsi dan harapan akan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Gresik. Angket/Kuisisioner dilakukan dengan memberikan form kuisisioner kepada responden di Kabupaten Gresik. Angket/Kuisisioner dilakukan secara langsung dan melalui google form.

Tabel 4. 1 Form Survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik

NO	PERTANYAAN	INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IKLI)				INDEKS HARAPAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IHLI)			
A	INDIKATOR KETERSEDIAAN FISIK INFRASTRUKTUR								
I	Ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Gresik	Sangat Tersedia	Tersedia	Kurang Tersedia	Tidak Tersedia	Sangat Penting	Penting	Kurang Penting	Tidak Penting
1	Jalan dan Jembatan								
a	Jalan Nasional								
b	Jalan Provinsi								
c	Jalan Kabupaten								
d	Jalan Poros Desa								
e	Jalan Lingkungan								

4.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan melalui berbagai literatur atau data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan tema. Selain itu, data sekunder didapatkan melalui survei instansi.

A. Studi literatur

Dilakukan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan tema penelitian baik berupa buku, tugas akhir, tesis, jurnal, peraturan-peraturan, peta.

B. Survey instansi

Survey instansi bertujuan mencari data pendukung melalui instansi atau lembaga tertentu yang berhubungan langsung dengan tema penelitian atau pernah melakukan

LAPORAN AKHIR

penelitian dengan tema tersebut. Adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kebutuhan Data Sekunder dan Instansi Yang Terkait

No	Kebutuhan Data	Dokumen	Instansi
1	- Dokumen RTRW Kabupaten Gresik - Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik	RTRW Kabupaten Gresik	Bappeda Kabupaten Gresik
2	- SHP Dasar - SHP Guna Lahan - SHP Rencana	SHP RTRW Kabupaten Gresik	Bappeda Kabupaten Gresik
3	- Visi, misi, dan kebijakan - Program pembangunan daerah	RPJMD Kabupaten Gresik	Bappeda Kabupaten Gresik
4	- Visi, misi, dan kebijakan - Program pembangunan daerah	RPJP Kabupaten Gresik	Bappeda Kabupaten Gresik
5	Panjang jalan	SK Jalan	DPUTR
6	- Panjang jalan berdasarkan hierarki - Kondisi jalan - Panjang jalur perjalanan kaki dan sepeda - Data dan peta jaringan jalan baru - Data dan peta fasilitas pelengkap jalan - Potensi dan masalah	Masterplan Jalan	DPUTR
7	- Data kependudukan - Persebaran sarana dan prasarana - PDRB	Kabupaten Gresik Dalam Angka	BPS
8	- Peta dan jaringan air bersih - Pengguna air bersih berdasarkan jenis - Kondisi air bersih - Potensi dan masalah	RISPAM	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	- Panjang jaringan drainase berdasarkan hierarki - Panjang jaringan irigasi	Masterplan Drainase	DPUTR
10	- Sebaran dan jumlah sarana dan prasarana persampahan - Timbulan sampah - Kondisi sarana dan prasarana persampahan - Strategi dan kebijakan persampahan - Potensi dan masalah - Sebaran bank sampah - Kondisi TPA	Masterplan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
11	- Jumlah dan sebaran sarana dan prasarana air limbah - Cakupan pelayanan sarana dan prasarana air limbah - Timbulan limbah domestik dan non domestik - Strategi dan kebijakan pengelolaan air limbah - Potensi dan masalah	- Masterplan Air Limbah - SSK Kabupaten Gresik	Dinas Lingkungan Hidup
12	- Sebaran RTH berdasarkan tipologi - Luas RTH berdasarkan tipologi - Kondisi RTH - Infrastruktur pelengkap RTH	Masterplan RTH	Dinas Lingkungan Hidup

LAPORAN AKHIR

No	Kebutuhan Data	Dokumen	Instansi
13	• Tingkat pelayanan jalan • Volume kendaraan • Kondisi sarana dan prasarana transportasi darat • Data dan peta trayek angkutan umum • Data harian rata-rata LHR • Lokasi parkir on street dan off street • Potensi dan masalah	Buku Tatralok (Tataran Transportasi Lokal)	Dinas Perhubungan
14	• Kondisi perumahan dan kawasan permukiman • Kondisi sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman • Kawasan kumuh • Strategi dan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman • Potensi dan masalah	Dokumen RP3KP	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	• Panjang jaringan irigasi • Kondisi jaringan irigasi • Sarana dan prasarana pelengkap jaringan irigasi • Strategi dan kebijakan • Potensi masalah	Masterplan jaringan irigasi/masterplan sumber daya air	DPUTR

4.3 VARIABEL

Variabel yang digunakan dalam pekerjaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik ini adalah Penilaian (*Percepsi*) dan Harapan (*Expectacy*) masyarakat atas unsur-unsur pelayanan dari setiap jenis infrastruktur yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kepuasan layanan yang diterimanya. Variabel yang digunakan dalam penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Unsur-unsur tersebut dikembangkan berdasarkan sasaran dan indikator dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah. Unsur-unsur kepuasan masyarakat akan pelayanan tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam butir-butir pernyataan dalam kuesioner.

Tabel 4. 3 Variabel Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik

Variabel	Sub Variabel
Jalan dan Jembatan	Jalan Nasional
	Jalan Provinsi
	Jalan Kabupaten

LAPORAN AKHIR

Variabel	Sub Variabel
Transportasi	Jalan Lingkungan
	Jembatan
	Bus
	Kereta Api
	Ojek
	Angkutan Kota
Air Bersih	Terminal
	Stasiun
	Sumber Air Baku
Jaringan Irigasi	Unit Pengolahan Air
	Unit Transmisi dan Pelayanan
Ruang Publik	Jaringan Irigasi
Perumahan dan Kawasan permukiman	Jalur Pejalan Kaki
	Taman Kota
	Persampahan
	Sanitasi
	Drainase
	Listrik
	Telekomunikasi

4.4 METODE PENGAMBILAN SAMPEL

Metode pengambilan sampel dalam pekerjaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Gresik adalah dengan metode *non probability* sampling karena populasi yang diteliti infinite (populasi yang jumlah dan identitas anggota populasi tidak diketahui). Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel secara *Accidental Sampling* yaitu prosedur sampling yang memilih orang yang paling mudah dijumpai atau diakses. *Accidental Sampling* adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya adalah orang tersebut merupakan pengguna dari suatu layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik.

Tidak terdapat kriteria khusus dalam pemilihan responden yang digunakan dalam penyusunan indeks kepuasan layanan infrastruktur Kabupaten Gresik. Sebagai kota yang inklusif, penyusunan indeks kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik tidak hanya terfokus pada masyarakat secara umum. Pengambilan sampel juga mengakomodir pendapat masyarakat difabel. Hal tersebut diharapkan hasil dari indeks kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik mengakomodir seluruh lapisan masyarakat dan sesuai dengan kondisi yang seharusnya.

Pengambilan jumlah sampel dalam penyusunan indeks kepuasan layanan infrastruktur Kabupaten Gresik mengacu pada lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan

LAPORAN AKHIR

Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara Pelayanan Publik dimana pengambilan sampel menggunakan sampel Morgan dan Krejcie. Populasi Kabupaten Gresik adalah sebesar 1.291.518 jiwa. Sehingga berdasarkan sampel Morgan dan Krejcie jumlah sampel minimal yang digunakan adalah sebanyak 384 responden. Namun untuk mengurangi sampling error, pengambilan sampel dalam penyusunan indeks kepuasan layanan infrastruktur Kabupaten Gresik selanjutnya menggunakan rumus slovin. Metode pengambilan sampel menggunakan slovin dengan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n : Ukuran sampel/jumlah responden

N : Ukuran populasi

E : Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir;

e : 0,1

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan didapatkan jumlah sampel dalam penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik adalah sebesar 625 responden. Pengambilan sampel tersebut juga sesuai dengan jumlah sampel minimal yang ditetapkan pada sampel Morgan dan Krejcie yaitu sebesar 384 responden.

4.5 TAHAP ANALISIS

4.5.1 Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Metode pengolahan data pada pekerjaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), masing masing jenis infrastruktur memiliki jumlah unsur pelayanan yang berbeda disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrastruktur

LAPORAN AKHIR

yang disediakan oleh pemerintah. Namun demikian setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) per unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKLI = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) yaitu antara 25 – 100 sehingga hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKLI Unit Pelayanan} \times 25$$

Hasil perhitungan di atas di kategorikan sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan

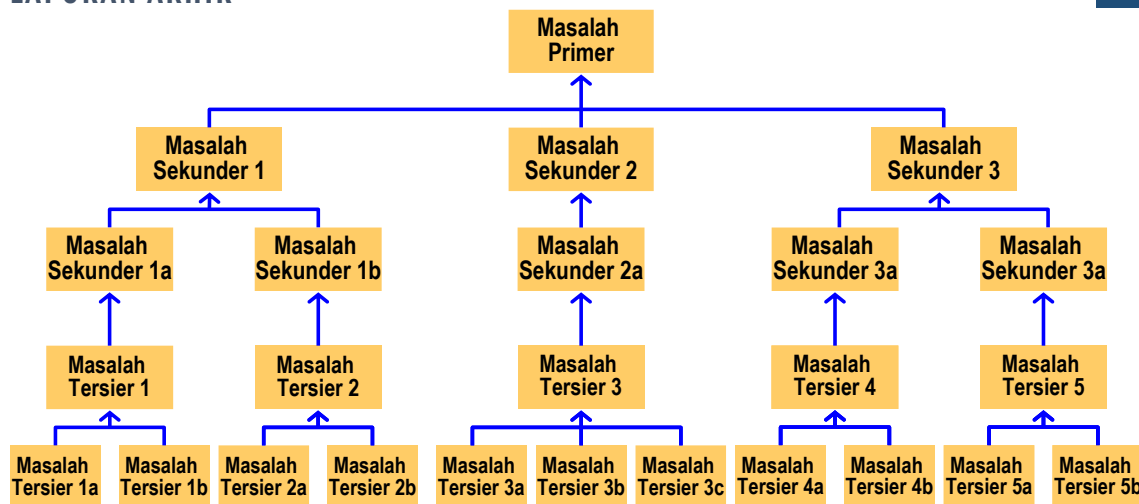
Nilai Persepsi	Nilai Interval (N)	Nilai Interval Konversi (NK)	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017

4.5.2 Analisis Akar Masalah

Analisis akar masalah bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting akar dari permasalahan dalam penyediaan infrastruktur di Kabupaten Gresik. Melalui teknik ini, orang yang terlibat dalam hal memecahkan satu masalah dapat melihat penyebab yang sebenarnya, yang mungkin belum bisa dilihat kalau masalah hanya dapat dilihat secara pintas. Teknik Analisa Akar Masalah dapat melibatkan orang setempat yang tahu secara mendalam masalah yang ada. Adapun manfaat analisis potensi dan masalah antara lain:

1. Untuk mengetahui secara jelas potensi dan masalah.
2. Untuk memudahkan para perencana melihat dimana potensi dan masalah tersebut berada sebagai bahan masukan dalam merencanakan pengembangan wilayah tersebut.
3. Untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan perencanaan di suatu wilayah.



Gambar 4. 1 Diagram Analisis Akar Masalah

4.5.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi infrastruktur di Kabupaten Gresik, yaitu untuk melihat *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (kesempatan) dan *Threaten* (ancaman), dan menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan infrastruktur Kabupaten Gresik. Kawasan perencanaan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Potensi (*Strength*)

Kekuatan apa yang dapat dikembangkan agar lebih tangguh, sehingga dapat bertahan di pasaran, yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri.

B. Masalah (*Weakness*)

Segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yang datang dari dalam wilayah atau obyek itu sendiri.

C. Peluang (*Opportunities*)

Kesempatan yang berasal dari luar wilayah studi. Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan atau kondisi ekonomi secara global.

D. Ancaman (*Threaten*)

Merupakan hal yang dapat mendatangkan kerugian yang berasal dari luar wilayah atau obyek.

LAPORAN AKHIR

Keempat faktor tersebut dianalisis ditinjau dari beberapa variabel yaitu dari sumber daya alam, sumber daya buatan, sosial dan budaya masyarakat serta faktor lain, yang akan mempengaruhi pengembangan. Kemudian dilakukan penilaian untuk mengetahui posisi obyek pada kuadran SWOT. Dari penilaian tersebut diketahui posisinya sebagai berikut:

- Kwadran I (*Growth*),
- Kwadran II (*Stability*),
- Kwadran III (*Survival*),
- Kwadran IV (*Diversification*),

Sebelumnya perlu diketahui dulu faktor eksternal EFAS (*Eksternal Strategic Factors Analysis Summary*) dan faktor internal IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) untuk menyusun matriks SWOT. Berikut ini sistem penilaiannya digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

a. Matrik IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*)

Cara-cara penentuan Faktor Strategi Internal (IFAS) adalah :

- Kolom 1 disusun 5-10 faktor-faktor kekuatan dan kelemahan.
- Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00).
- Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi infrastruktur yang bersangkutan.
- Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif, jika kelemahan besar sekali dibandingkan dengan nilai rata-rata infrastruktur Kabupaten Gresik lainnya, nilainya adalah 4, sedangkan jika kelemahan suatu dibawah rata-rata lain, nilainya adalah 1. Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1 (poor).

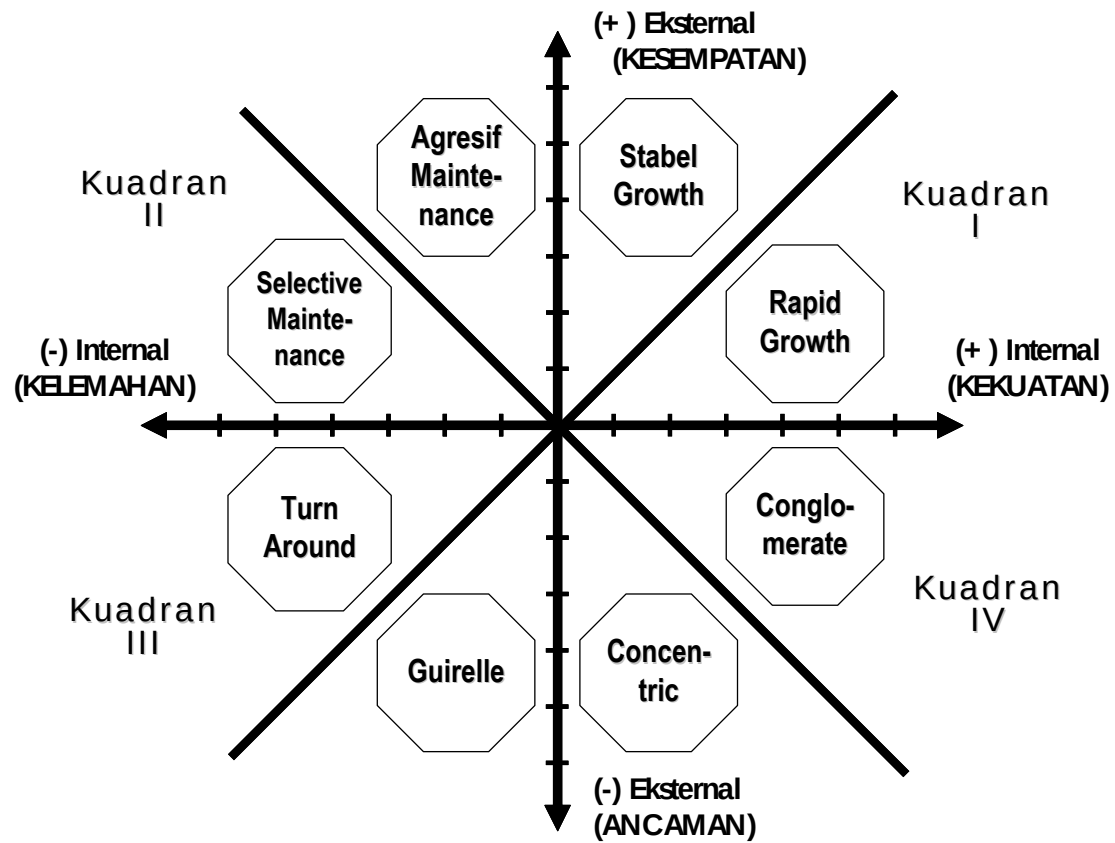
LAPORAN AKHIR

- Kolom 5 digunakan untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan bagi penilaian infrastruktur Kabupaten Gresik yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana infrastruktur bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya.

b. Matrik EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*)

Cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal EFAS adalah :

- Kolom 1 disusun 5-10 peluang dan ancaman.
- Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).
- Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi infrastruktur.
- Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 4. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 1.
- Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*)
- Kolom 5 digunakan untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.



Gambar 4. 2 Matrik IFAS-EFAS

BAB V

ANALISIS

5.1 KARAKTERISTIK RESPONDEN

Metode yang digunakan dalam penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Gresik menggunakan metode non probability sampling karena populasi yang diteliti bersifat infinite, artinya jumlah dan identitas anggotanya tidak diketahui. Selain itu, digunakan juga metode Accidental Sampling, di mana responden dipilih secara kebetulan berdasarkan siapa saja yang mudah dijumpai atau diakses oleh peneliti. Dalam Accidental Sampling, orang yang kebetulan ditemui dipilih sebagai sampel jika mereka merupakan pengguna layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik, sesuai dengan kriteria utama yang ditetapkan. Dalam proses penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Gresik, tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan responden. Kabupaten Gresik berkomitmen untuk inklusif, tidak hanya memperhatikan pendapat masyarakat umum tetapi juga mengakomodir pandangan masyarakat difabel. Oleh karena itu, diharapkan hasil indeks dapat mencerminkan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam proses penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik, penentuan jumlah sampel mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode pengambilan sampel mengikuti prosedur yang disebut sampel Morgan dan Krejcie. Dengan populasi Kabupaten Gresik sebanyak 1.291.518 jiwa, jumlah sampel minimal yang ditetapkan adalah 384 responden berdasarkan metode Morgan dan Krejcie. Namun, untuk mengurangi kesalahan sampel, dalam penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik, digunakan metode pengambilan sampel berdasarkan rumus Slovin.

LAPORAN AKHIR

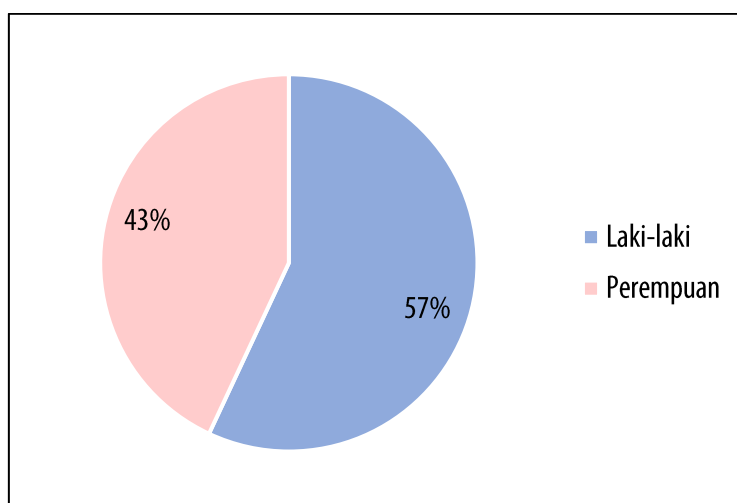
5.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa dominasi jenis kelamin responden adalah laki-laki. Proporsi responden laki-laki mencapai 57% dari total, atau sebanyak 356 orang, sementara responden perempuan hanya sebanyak 43%, atau 269 orang. Tabel berikut menyajikan rincian karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 5. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Karakteristik Responden	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	356	57%
2.	Perempuan	269	43%
JUMLAH		625	100%

Sumber : Survei Primer, 2024



Gambar 5. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

5.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Kelompok Usia adalah sebuah kategori yang memaparkan distribusi usia penduduk, dengan tujuan menganalisis dominasi kelompok usia produktif atau non-produktif dalam setiap kelompok kesejahteraan. Klasifikasi karakteristik responden berdasarkan usia terbagi menjadi lima kelompok untuk keperluan analisis ini, yaitu sebagai berikut.

- 15-24 tahun : Kelompok usia muda
- 25-34 tahun : Kelompok usia pekerja awal
- 35-44 tahun : Kelompok usia paruh baya
- 45-54 tahun : Kelompok usia pra-pensiun
- 55 tahun keatas : Kelompok usia lanjutan

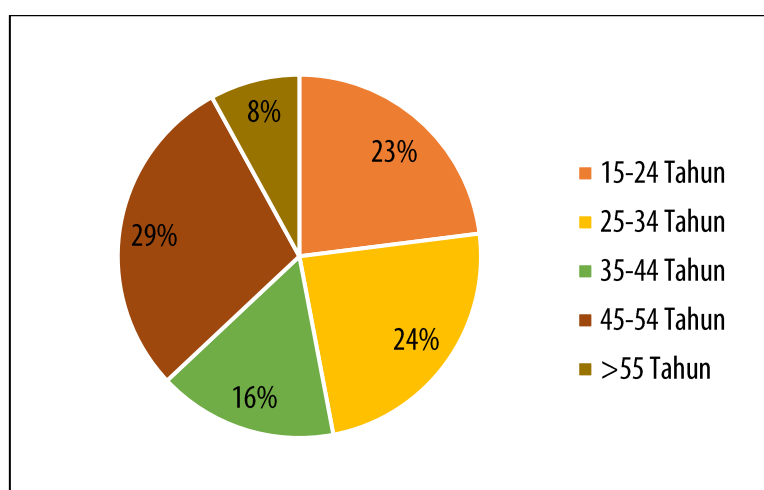
LAPORAN AKHIR

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden didominasi oleh kelompok usia 45-54 tahun. Persentase responden dalam kelompok usia 15-24 tahun adalah 23% atau 146 orang. Kelompok usia 25-34 tahun memiliki persentase 24%, mewakili 148 responden. Sementara itu, 16% atau 102 responden termasuk dalam kelompok usia 35-44 tahun. Persentase tertinggi, yaitu 29%, adalah responden dalam kelompok usia 45-54 tahun, dengan jumlah mencapai 179 orang. Selanjutnya, kelompok usia di atas 55 tahun memiliki persentase 8%, yang setara dengan 50 responden. Rincian karakteristik responden berdasarkan usia dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir.

Tabel 5. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Karakteristik Responden	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	15-24 Tahun	146	23%
2.	25-34 Tahun	148	24%
3.	35-44 Tahun	102	16%
4.	45-54 Tahun	179	29%
5.	>55 Tahun	50	8%
JUMLAH		625	100%

Sumber : Survei Primer, 2024



Gambar 5. 2 Karakteristik Berdasarkan Kelompok Usia

5.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden diklasifikasikan dalam tujuh kelompok: SD, SMP, SLTP, SLTA, D1/D3/D4, S-1, dan S-2 ke atas. Berdasarkan hasil survei, diketahui dominasi responden berasal dari kelompok SLTA. Proporsi responden dengan pendidikan terakhir SD adalah 7%, atau 42 orang. Kelompok pendidikan terakhir SMP/SLTP memiliki persentase sebesar 7%, atau 44 orang. Sebanyak 48%, atau 297 orang responden memiliki dengan pendidikan terakhir SLTA. Responden dengan pendidikan

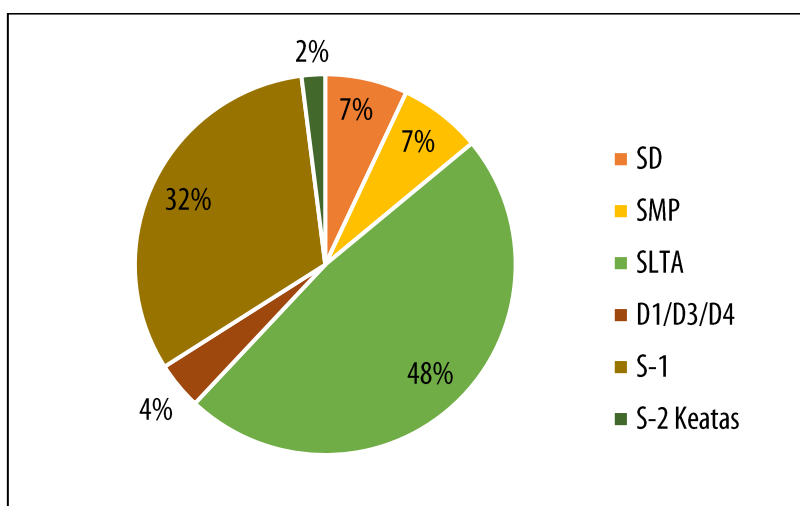
LAPORAN AKHIR

terakhir D1/D3/D4 memiliki persentase sebesar 4%, atau 28 orang. Selanjutnya, sebanyak 32%, atau 200 orang, memiliki pendidikan terakhir S1, sedangkan 2%, atau 14 orang merupakan responden dengan pendidikan terakhir S2 ke atas. Rincian karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat ditemukan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Karakteristik Responden	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SD	42	7%
2.	SMP/SLTP	44	7%
3.	SLTA	297	48%
4.	D1/D3/D4	28	4%
5.	S-1	200	32%
6.	S-2 Keatas	14	2%
JUMLAH		625	100%

Sumber : Survei Primer, 2024



Gambar 5. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

5.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Struktur Mata Pencarian

Karakteristik responden berdasarkan mata pencarian mereka dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu Guru/dosen, Ibu Rumah Tangga (IRT), Karyawan Swasta, Pelajar/Mahasiswa, Pemerintah Desa/Kecamatan, Petani, PNS/TNI/POLRI, Wiraswasta, Tidak Bekerja dan Lainnya. Berdasarkan hasil survei, diketahui dominasi responden berasal dari responden dengan mata pencarian sebagai wiraswasta. Persentase responden yang bekerja sebagai guru/dosen sebesar 2% atau 12 orang. Responden dengan mata pencarian sebagai ibu rumah tangga memiliki persentase 5%, mewakili 34 orang. Sementara itu, 16% atau 101 responden memiliki mata pencarian sebagai karyawan swasta. Sebanyak 112 orang atau 18% responden adalah pelajar/mahasiswa. Responden yang bekerja di

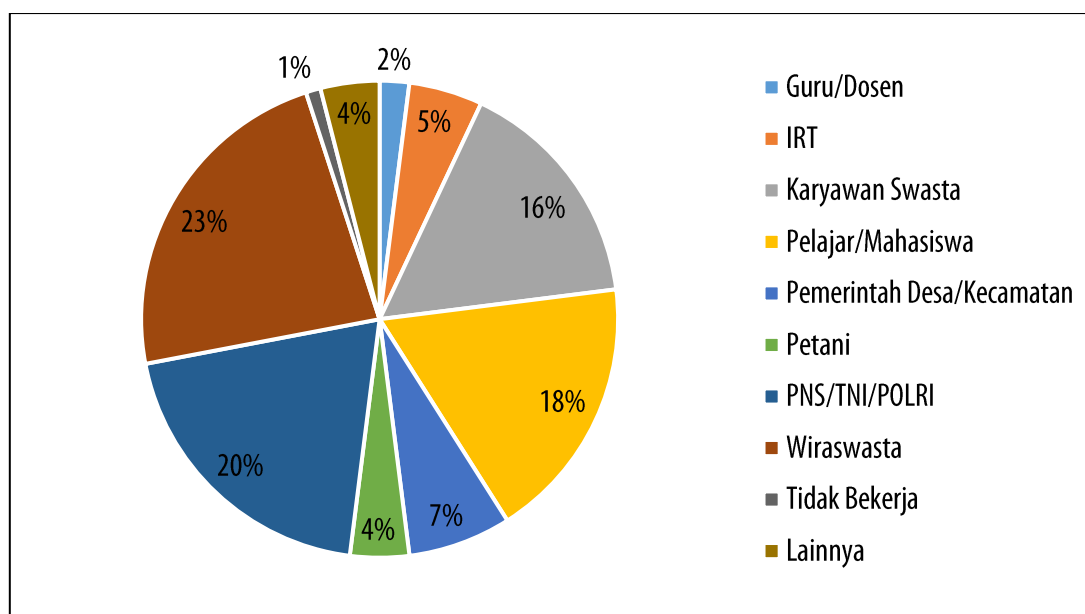
LAPORAN AKHIR

pemerintah desa/kecamatan sebesar 7% atau 41 orang. Sebanyak 45 atau 25 orang responden memiliki mata pencaharian sebagai petani. Responden yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI memiliki persentase sebanyak 20% atau 123 orang. Persentase tertinggi yaitu 23%, adalah responden yang memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta, dengan jumlah mencapai 142 orang. Selanjutnya, responden terdapat yang tidak bekerja sebanyak 1% atau 8 orang serta responden yang bekerja diluar kategori yang telah ditetapkan sebesar 4% atau 27 orang. Rincian mengenai karakteristik responden berdasarkan struktur mata pencaharian tersedia dalam tabel berikut.

Tabel 5. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Guru/Dosen	12	2%
2	IRT	34	5%
3	Karyawan Swasta	101	16%
4	Pelajar/Mahasiswa	112	18%
5	Pemerintah Desa/Kecamatan	41	7%
6	Petani	25	4%
7	PNS/TNI/POLRI	123	20%
8	Wiraswasta	142	23%
9	Tidak Bekerja	8	1%
10	Lainnya	27	4%
JUMLAH		625	100%

Sumber : Survei Primer, 2024



Gambar 5. 4 Karateristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

5.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi

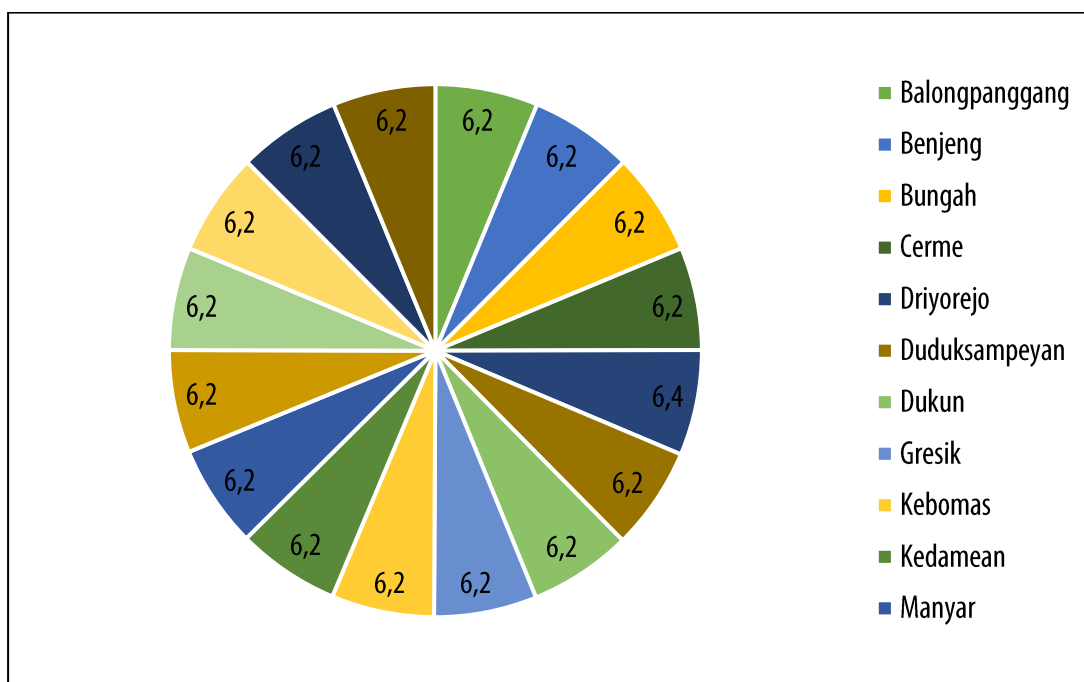
LAPORAN AKHIR

Pengambilan sampel dilakukan secara merata pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Adapun jumlah responden berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi

Kecamatan	Jumlah (orang)	Persentase
Balongpanggang	39	6.2%
Benjeng	39	6.2%
Bungah	39	6.2%
Cerme	39	6.2%
Driyorejo	40	6.4%
Duduksampeyan	39	6.2%
Dukun	39	6.2%
Gresik	39	6.2%
Kebomas	39	6.2%
Kedamean	39	6.2%
Manyar	39	6.2%
Menganti	39	6.2%
Panceng	39	6.2%
Sangkapura	0	0.0%
Sidayu	39	6.2%
Tambak	0	0.0%
Ujungpangkah	39	6.2%
Wringinanom	39	6.2%
TOTAL	625	6%

Sumber : Survei Primer, 2024



Gambar 5. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi

5.2 ANALISIS INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IKLI)

5.2.1 Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dalam penyusunan Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik, akan dilakukan evaluasi terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Jenis infrastruktur yang akan dievaluasi mencakup Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, dan Jembatan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan enam unsur layanan infrastruktur, termasuk ketersediaan, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan, kontribusi terhadap perekonomian, dan kontribusi terhadap pembangunan. Analisis menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) untuk jalan dan jembatan mencapai nilai 89,41 dengan tingkat pelayanan kelas A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai sangat baik. Sementara itu, Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) untuk jalan dan jembatan mencapai nilai 95,53 dengan tingkat pelayanan kelas A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai sangat penting. Evaluasi rinci terhadap Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) untuk jalan dan jembatan dapat diketahui secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

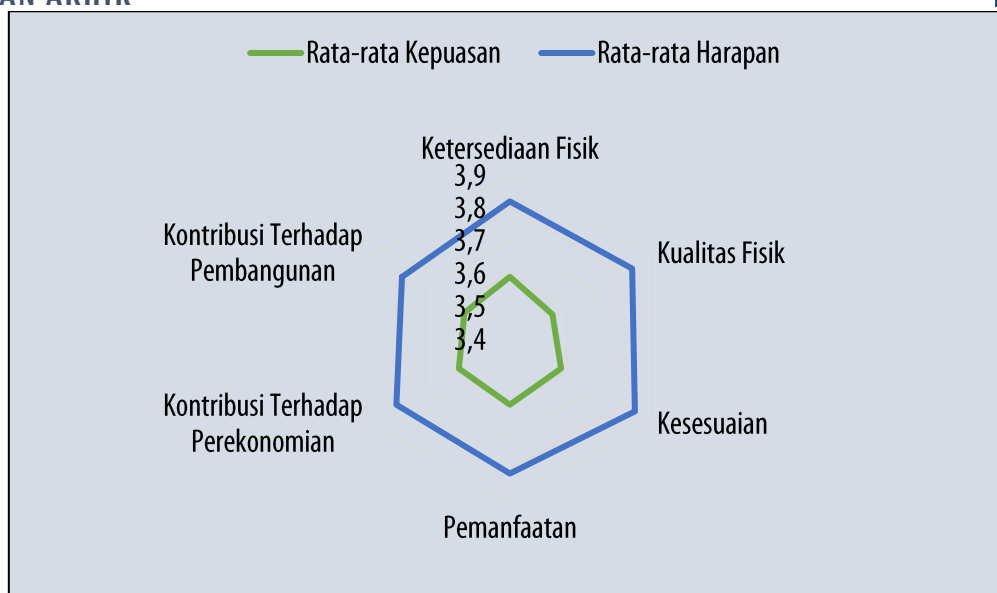
No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Kepuasan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Harapan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	GAP	Tingkat Kesesuaian
1	Ketersediaan Fisik	3,59	Sangat Baik	0,60	3,82	Sangat Penting	0,64	-0,23	93,92
2	Kualitas Fisik	3,55	Sangat Baik	0,59	3,83	Sangat Penting	0,64	-0,28	92,64
3	Kesesuaian	3,58	Sangat Baik	0,60	3,84	Sangat Penting	0,64	-0,27	93,02
4	Pemanfaatan	3,60	Sangat Baik	0,60	3,81	Sangat Penting	0,63	-0,20	94,62
5	Kontribusi Terhadap Perekonomian	3,58	Sangat Baik	0,60	3,80	Sangat Penting	0,63	-0,21	94,35
6	Kontribusi Terhadap Pembangunan	3,56	Sangat Baik	0,59	3,78	Sangat Penting	0,63	-0,22	94,16
Jumlah Rata-rata tertimbang		21,46		3,58	22,88		3,81	-0,24	96,78
Nilai Indeks				89,42			95,35		
Mutu pelayanan				A			A		
Kinerja				Sangat Baik			Sangat Penting		

Sumber : Hasil Analisis, 2024

LAPORAN AKHIR

Berdasarkan tabel yang disajikan, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mencapai nilai 89,42 dengan mutu layanan tergolong dalam kategori A. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan pada Kabupaten Gresik dianggap sangat baik. Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa unsur Pemanfaatan mendapat skor kinerja atau kepuasan tertinggi, dengan nilai rata-rata mencapai 3,60. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden menyatakan bahwa infrastruktur Jalan dan Jembatan yang ada telah dimanfaatkan dengan sangat baik atau dengan kata lain infrastruktur jalan yang dibangun telah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh masyarakat. Di sisi lain, kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kontribusi terhadap pembangunan, dengan nilai rata-rata sebesar 3,56.

Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap layanan infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Gresik sebesar 95,35 dengan mutu harapan/kepentingan masuk dalam kategori A yang menunjukkan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Gresik termasuk dalam kondisi sangat penting. Oleh karena itu, pentingnya harapan/kepentingan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Gresik terbukti. Harapan tertinggi masyarakat terfokus pada unsur kesesuaian, dengan skor rata-rata mencapai 3,80. Masyarakat menilai peran kesesuaian jaringan jalan dan jembatan dalam menghubungkan antar wilayah sangat penting. Sementara itu, harapan terendah masyarakat terhadap infrastruktur jalan dan jembatan adalah unsur kontribusi terhadap pembangunan, dengan skor 3,78. Meskipun memiliki angka rata-rata yang paling rendah diantara unsur pelayanan yang lain, unsur kontribusi terhadap pembangunan masih berada dalam kategori sangat penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan unsur pelayanan infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gresik dianggap sangat penting.



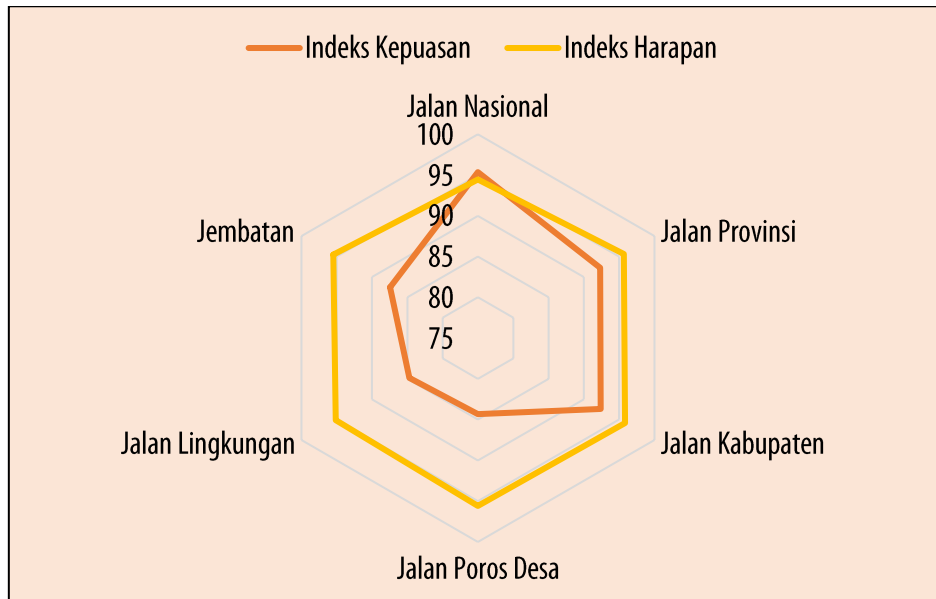
Gambar 5. 6 Radar Net Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan dan Harapan Jalan dan Jembatan

Dalam Penyusunan Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik, evaluasi difokuskan pada infrastruktur jalan dan jembatan yang terbagi menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, dan Jembatan. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tertinggi adalah Jalan Nasional, mencapai nilai indeks sebesar 95,36 dan termasuk kategori mutu pelayanan A dengan kinerja yang sangat baik. Rincian mengenai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Harapan Layanan Infrastruktur untuk jalan dan jembatan tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 6 Indeks Kepuasan dan Harapan Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Jenisnya

No	Aspek	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Indeks Harapan Layanan Infrastruktur		
		Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	Jalan dan jembatan	89,42	A	Baik	95,35	A	Sangat Penting
a	Jalan Nasional	95,36	A	Sangat Baik	94,46	A	Sangat Penting
b	Jalan Provinsi	92,29	A	Sangat Baik	95,64	A	Sangat Penting
c	Jalan Kabupaten	92,38	A	Sangat Baik	95,83	A	Sangat Penting
d	Jalan Poros Desa	84,32	B	Baik	95,58	A	Sangat Penting
e	Jalan Lingkungan	84,73	B	Baik	95,12	A	Sangat Penting
f	Jembatan	87,45	B	Baik	95,49	A	Sangat Penting

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 5. 7 Radar Nett Indeks Kepuasan dan Harapan Jalan dan Jembatan

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diamati bahwa indeks kepuasan layanan tertinggi terdapat pada infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah Jalan Nasional, dengan nilai mencapai 95,36 dan mutu harapan/kepentingan termasuk dalam kategori A. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jalan Nasional memiliki kinerja terbaik dibandingkan jenis jaringan jalan dan jembatan lainnya. Di sisi lain, hasil tabulasi menunjukkan bahwa indeks kepuasan layanan terendah terdapat pada Jalan Poros Desa dengan nilai mencapai 84,32 dan mutu harapan/kepentingan termasuk dalam kategori B. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pada infrastruktur Jalan Poros Desa.

Apabila ditinjau melalui Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gresik, dapat diketahui bahwa Jalan Kabupaten mendapatkan skor tertinggi yaitu sebesar 95,83 dengan mutu harapan/kepentingan termasuk kategori A. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jalan Kabupaten dianggap paling penting dibandingkan infrastruktur Jalan dan Jembatan lainnya.

5.2.2 Infrastruktur Transportasi Darat

Evaluasi Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur Transportasi Darat Kabupaten Gresik melibatkan transportasi darat yaitu bus, kereta api, ojek, angkutan kota, dan terminal yang mendukung mobilitas penduduk dari dan ke tempat tujuan mereka, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas mereka dengan kualitas yang memadai, sesuai dengan

LAPORAN AKHIR

harapan masyarakat. Evaluasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi Darat dilakukan melalui penilaian pada unsur-unsur terkait ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan, dan kontribusi terhadap ekonomi serta pembangunan Kabupaten Gresik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi Darat mencapai 90,31 dengan mutu layanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Baik. Di sisi lain, Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) untuk Transportasi Darat mencapai 93,38 dengan mutu layanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Penting. Evaluasi spesifik terhadap Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) untuk Transportasi Darat Kabupaten Gresik tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. 7 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi Darat

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Kepuasan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Harapan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	GAP	Tingkat Kesesuaian
1	Ketersediaan Fisik	3,60	Sangat Baik	0,60	3,74	Sangat Penting	0,62	-0,14	96,33
2	Kualitas Fisik	3,59	Sangat Baik	0,60	3,75	Sangat Penting	0,62	-0,16	95,86
3	Kesesuaian	3,64	Sangat Baik	0,61	3,73	Sangat Penting	0,62	-0,09	97,46
4	Pemanfaatan	3,60	Sangat Baik	0,60	3,73	Sangat Penting	0,62	-0,13	96,60
5	Kontribusi Terhadap Perekonomian	3,59	Sangat Baik	0,60	3,73	Sangat Penting	0,62	-0,14	96,37
6	Kontribusi Terhadap Pembangunan	3,65	Sangat Baik	0,61	3,74	Sangat Penting	0,62	-0,09	97,62
Jumlah Rata-rata tertimbang			21,67	3,61	22,41		3,74	-0,12	96,71
Nilai Indeks				90,31			93,38		
Mutu pelayanan				A			A		
Kinerja				Sangat Baik			Sangat Penting		

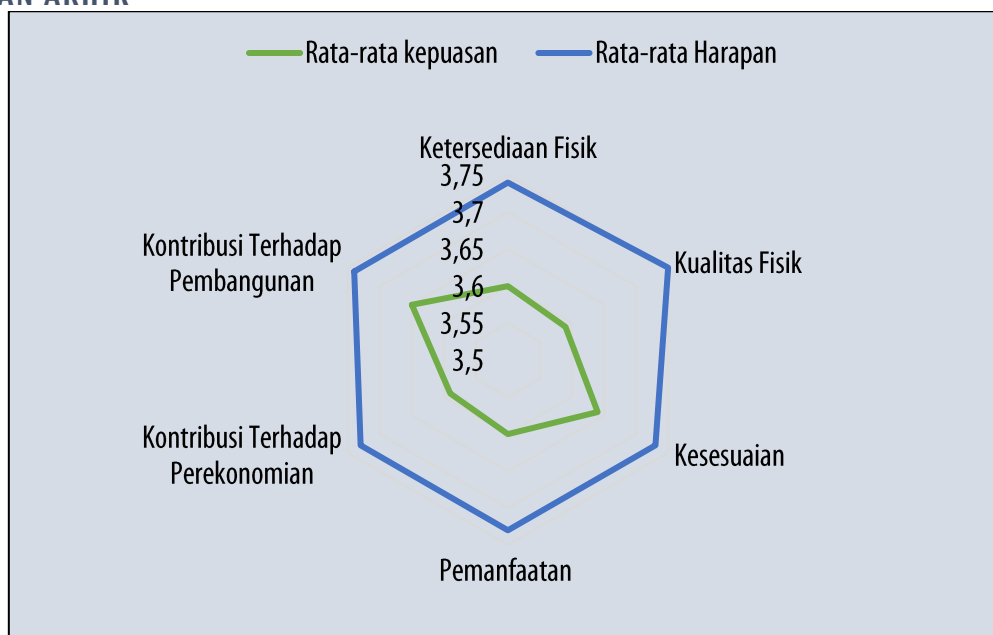
Sumber : Hasil Analisis, 2024

Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap Infrastruktur Transportasi Darat menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi Darat diperoleh nilai 90,31 dengan mutu pelayanan termasuk kategori A. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Transportasi Darat termasuk dalam kondisi yang Sangat Baik. Skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur kontribusi terhadap pembangunan dengan nilai rata-rata 3,65. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden beranggapan

LAPORAN AKHIR

bahwa Transportasi Darat yang tersedia telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan dengan sangat baik atau dengan kata lain Transportasi Darat yang dibangun telah memberikan pengaruh yang sangat baik dalam pembangunan Kabupaten Gresik. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kualitas fisik Transportasi Darat dan kontribusi terhadap perekonomian dengan nilai rata-rata sebesar 3,59. Meskipun demikian, keseluruhan unsur pelayanan masih berada dalam kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan infrastruktur Transportasi Darat Kabupaten Gresik sudah sangat baik.

Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Transportasi Darat Kabupaten Gresik sebesar 93,38 dengan mutu harapan/kepentingan masuk dalam kategori A yang menunjukkan pelayanan infrastruktur Transportasi Darat di Kabupaten Gresik termasuk dalam kondisi sangat penting. Oleh karena itu, pentingnya harapan/kepentingan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur Transportasi Darat di Kabupaten Gresik terbukti. Harapan tertinggi masyarakat terfokus pada unsur kualitas fisik, dengan skor rata-rata mencapai 3,75. Masyarakat menilai kualitas fisik layanan infrastruktur Transportasi Darat dalam menghubungkan antar wilayah sangat penting. Sementara itu, harapan terendah masyarakat terhadap layanan infrastruktur Transportasi Darat adalah unsur kesesuaian, pemanfaatan serta kontribusi terhadap ekonomi, dengan skor rata-rata 3,73. Meskipun memiliki angka rata-rata yang paling rendah diantara unsur pelayanan yang lain, unsur-unsur tersebut masih berada dalam kategori sangat penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan unsur pelayanan infrastruktur Transportasi Darat di Kabupaten Gresik dianggap sangat penting.



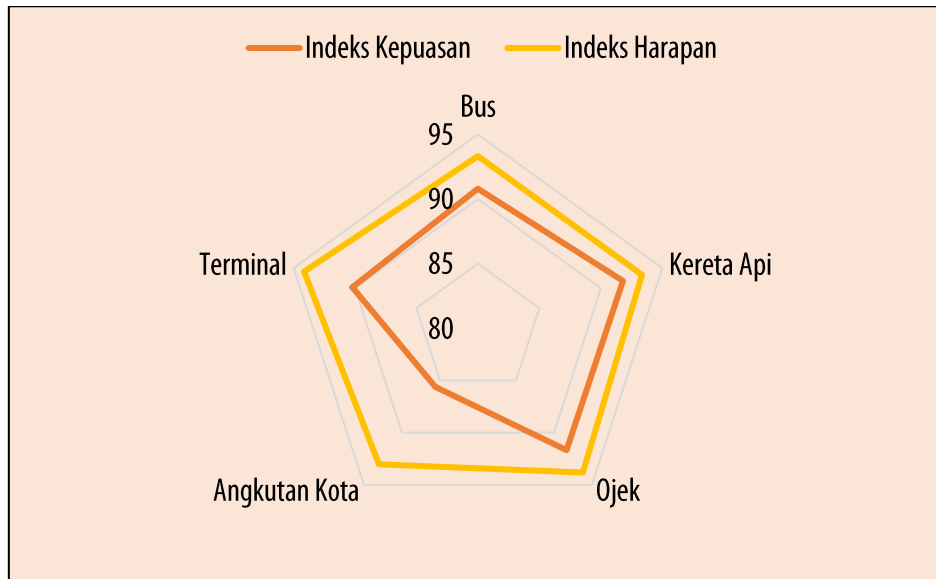
Gambar 5. 8 Radar Nett Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan dan Harapan Transportasi Darat

Dalam Penyusunan Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik, evaluasi difokuskan pada infrastruktur Transportasi Darat yang mencakup Bus, Kereta Api, Ojek, Angkutan Kota, dan Terminal. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa infrastruktur Transportasi Darat dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tertinggi adalah Kereta Api mencapai nilai indeks sebesar 91,80 dengan kategori mutu pelayanan A dengan kinerja yang sangat baik. Rincian mengenai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Harapan Layanan Infrastruktur untuk Infrastruktur Transportasi Darat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 8 Indeks Kepuasan dan Harapan Layanan Infrastruktur Transportasi Darat Berdasarkan Jenisnya

No	Aspek	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Indeks Harapan Layanan Infrastruktur		
		Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
2	Transportasi Darat	90,31	A	Sangat Baik	93,38	A	Sangat Penting
a	Bus	90,79	A	Sangat Baik	93,31	A	Sangat Penting
b	Kereta Api	91,80	A	Sangat Baik	93,35	A	Sangat Penting
b	Ojek	91,67	A	Sangat Baik	93,81	A	Sangat Penting
c	Angkutan Kota	85,62	B	Baik	93,03	A	Sangat Penting
d	Terminal	90,22	A	Sangat Baik	94,15	A	Sangat Penting

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 5. 9 Radar Nett Indeks Kepuasan dan Harapan Transportasi Darat

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diamati bahwa indeks kepuasan layanan tertinggi terdapat pada infrastruktur Transportasi Darat jenis kereta api, dengan nilai mencapai 91,80 dan mutu harapan/kepentingan termasuk dalam kategori A. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kereta Api memiliki kinerja terbaik dibandingkan infrastruktur transportasi darat lainnya. Di sisi lain, hasil tabulasi menunjukkan bahwa indeks kepuasan layanan terendah terdapat pada angkutan kota dengan nilai mencapai 85,62 dan mutu harapan/kepentingan termasuk dalam kategori A. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pada infrastruktur transportasi angkutan kota.

Apabila ditinjau melalui Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap layanan infrastruktur transportasi darat berdasarkan jenisnya di Kabupaten Gresik, dapat diketahui bahwa jenis infrastruktur transportasi Ojek mendapatkan skor tertinggi yaitu sebesar 93,81 dengan mutu harapan/kepentingan termasuk kategori A. Hal tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi darat jenis bus dianggap paling penting dibandingkan infrastruktur Transportasi Darat lainnya.

5.2.3 Infrastruktur Air Bersih

Pelayanan kebutuhan air bersih Kabupaten Gresik dipenuhi melalui beberapa sumber seperti Sumber mata air yang dikelola PDAM dan ada juga dipenuhi melalui air sumur ataupun air sungai. Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh PDAM dan Non PDAM. Pelayanan air minum PDAM dilaksanakan dan dikelola oleh PDAM Giri

LAPORAN AKHIR

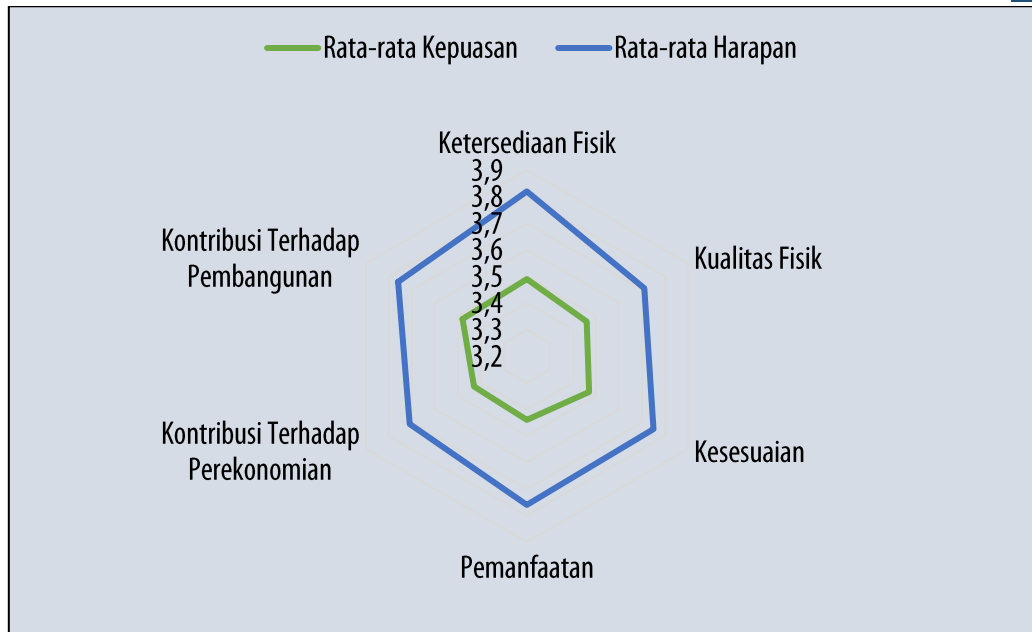
Tirta Kabupaten Gresik, sedangkan Non PDAM dilakukan oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk kawasan-kawasan yang belum terjangkau oleh PDAM.

Infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Gresik yang akan dievaluasi dalam Penyusunan Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik terdiri dari Sumber Air, Unit Pengolahan Air, dan Unit Transmisi dan Pelayanan. Evaluasi layanan infrastruktur ini akan mempertimbangkan enam unsur, termasuk ketersediaan, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan, kontribusi terhadap perekonomian, dan kontribusi terhadap pembangunan. Dari hasil analisis, tercatat bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Air Bersih mencapai 86,65 dengan mutu pelayanan B dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Baik. Selain itu, Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) Air Bersih mencapai 93,81 dengan mutu pelayanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Penting. Evaluasi spesifik terhadap Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) Air Bersih dapat ditemukan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 9 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Air Bersih

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Kepuasan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Harapan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	GAP	Tingkat Kesesuaian
1	Ketersediaan Fisik	3,49	Baik	0,58	3,82	Sangat Penting	0,64	-0,33	91,37
2	Kualitas Fisik	3,46	Baik	0,58	3,71	Sangat Penting	0,62	-0,24	93,42
3	Kesesuaian	3,47	Baik	0,58	3,75	Sangat Penting	0,62	-0,27	92,67
4	Pemanfaatan	3,44	Baik	0,57	3,76	Sangat Penting	0,63	-0,33	91,30
5	Kontribusi Terhadap Perekonomian	3,43	Baik	0,57	3,71	Sangat Penting	0,62	-0,29	92,27
6	Kontribusi Terhadap Pembangunan	3,48	Baik	0,58	3,76	Sangat Penting	0,63	-0,28	92,55
Jumlah Rata-rata tertimbang			20,77	3,46	22,52		3,75	-0,29	92,26
Nilai Indeks				86,55			93,81		
Mutu pelayanan				B			A		
Kinerja				Baik			Sangat Penting		

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 5. 10 Radar Nett Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan dan Harapan Air Bersih

Berdasarkan tabulasi data, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Air Bersih mencapai nilai 86,55 dengan mutu layanan berada dalam kategori B. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur Air Bersih dianggap baik. Hasil tabulasi kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa aspek ketersediaan fisik mendapat skor tertinggi, dengan rata-rata nilai mencapai 3,49. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Gresik telah tersedia dengan baik. Di sisi lain, aspek kontribusi terhadap perekonomian mendapat skor terendah yaitu 3,43.

Apabila ditinjau berdasarkan Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Gresik mencapai nilai 93,81, dengan mutu harapan/kepentingan termasuk dalam kategori A. Hal ini menandakan bahwa harapan/kepentingan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Gresik dianggap sangat penting. Harapan tertinggi masyarakat terkait dengan ketersediaan fisik infrastruktur Air Bersih, yang mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,82. Masyarakat menganggap tersedianya jaringan Air Bersih dalam menghubungkan wilayah sangat penting. Sementara itu, harapan terendah terkait dengan kualitas fisik dan kontribusi terhadap perekonomian, dengan skor sebesar 3,38.

Infrastruktur Air Bersih yang dievaluasi dalam Penyusunan Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik meliputi Sumber Air Baku, Unit Pengolahan Air, dan Unit Transmisi dan Pelayanan. Dalam peninjauan berdasarkan jenis infrastruktur air

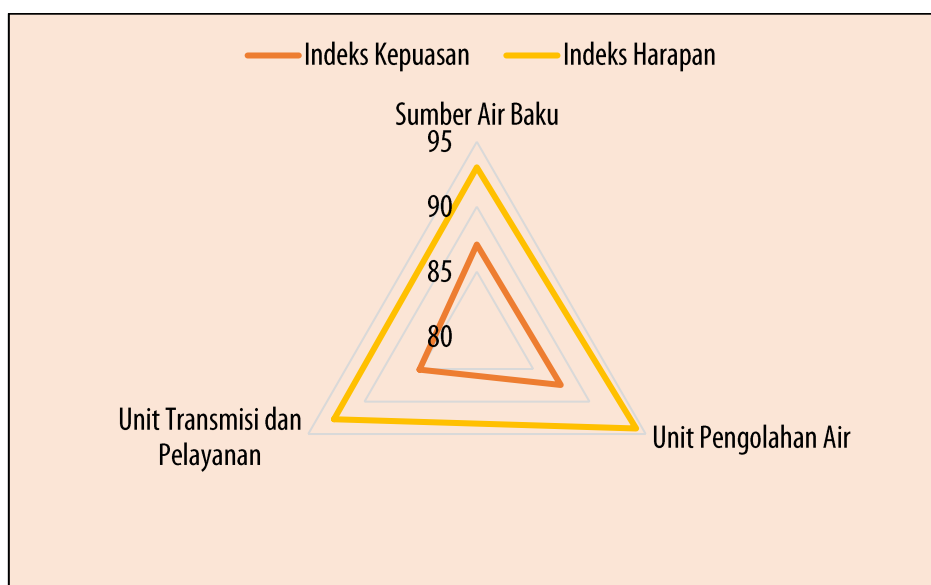
LAPORAN AKHIR

bersih, terlihat bahwa Unit Pengolahan Air mencapai nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tertinggi, yaitu 87,45. Informasi lebih rinci mengenai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Harapan Layanan Infrastruktur Air Bersih tersedia dalam tabel berikut.

Tabel 4. 2 Indeks Kepuasan dan Harapan Layanan Infrastruktur Air Bersih Berdasarkan Jenisnya

No	Aspek	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Indeks Harapan Layanan Infrastruktur		
		Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
3	Air Bersih	86,55	B	Baik	93,81	A	Sangat Penting
a	Sumber Air Baku	87,09	B	Baik	93,03	A	Sangat Penting
b	Unit Pengolahan Air	87,45	B	Baik	94,15	A	Sangat Penting
c	Unit Transmisi dan Pelayanan	85,11	B	Baik	92,71	A	Sangat Penting

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 5. 11 Radar Net Indeks Kepuasan dan Harapan Air Bersih

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diamati bahwa indeks kepuasan layanan tertinggi terdapat pada Layanan Infrastruktur Air Bersih Unit Pengolahan Air, dengan nilai mencapai 87,45 dan mutu harapan/kepentingan termasuk dalam kategori B. Hal tersebut menunjukkan bahwa Unit Pengolahan Air memiliki kinerja terbaik dibandingkan Layanan Infrastruktur Air Bersih lainnya. Di sisi lain, hasil tabulasi menunjukkan bahwa indeks kepuasan layanan terendah terdapat pada Unit Trasn misi dan Pelayanan dengan nilai mencapai 85,11 dengan mutu harapan/kepentingan termasuk dalam kategori B. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pada infrastruktur Unit Transmisi dan Pelayanan.

LAPORAN AKHIR

Apabila ditinjau melalui Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Air Bersih berdasarkan jenisnya di Kabupaten Gresik, dapat diketahui bahwa Unit Pengolahan Air mendapatkan skor tertinggi yaitu sebesar 94,15 dengan mutu harapan/kepentingan termasuk kategori A. Hal tersebut menunjukkan bahwa Infrastruktur Air Bersih Unit Pengolahan Air dianggap paling penting dibandingkan Infrastruktur Air Bersih lainnya.

5.2.4 Infrastruktur Jaringan Irigasi

Kabupaten Gresik memiliki jaringan irigasi dengan panjang yang mencapai 147.356 meter. Jaringan irigasi di Kabupaten Gresik terdiri dari 103 jaringan irigasi primer yang tersebar di seluruh wilayah, serta jaringan irigasi sekunder yang juga tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan terintegrasi dengan jaringan primer.

Evaluasi Indeks Kepuasan Layana Infrastruktur Jaringan Irigasi dilakukan melalui penilaian pada unsur-unsur terkait ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan, dan kontribusi terhadap ekonomi serta pembangunan Kabupaten Gresik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jaringan Irigasi mencapai 90,58 dengan mutu layanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Baik. Di sisi lain, Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) untuk Transportasi Darat mencapai 95,78 dengan mutu layanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Penting. Evaluasi spesifik terhadap Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) untuk Jaringan Irigasi Kabupaten Gresik tercantum dalam tabel berikut.

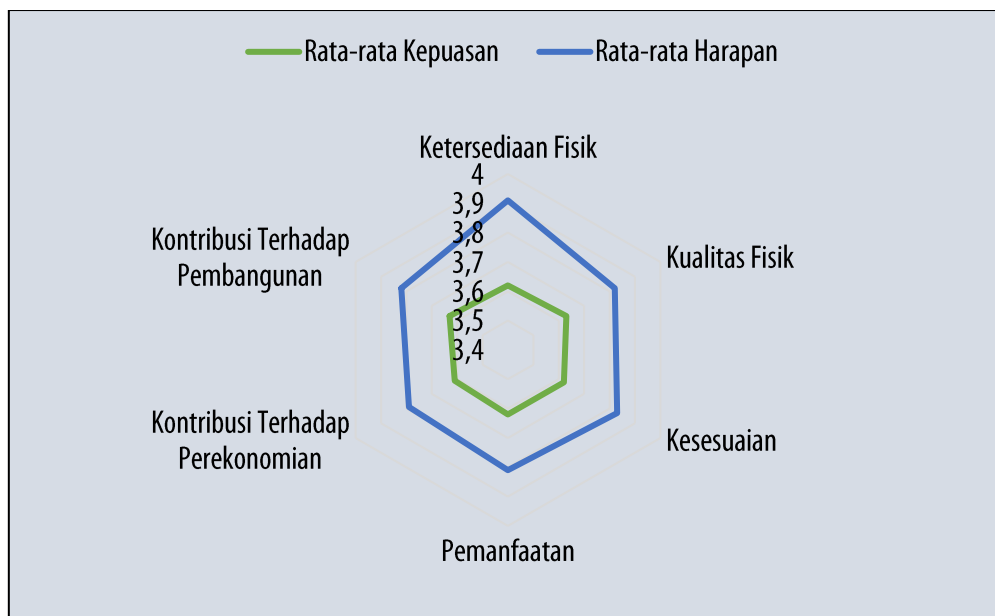
Tabel 4. 3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Jaringan Irigasi

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Kepuasan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Harapan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	GAP	Tingkat Kesesuaian
1	Ketersediaan Fisik	3,62	Sangat Baik	0,60	3,91	Sangat Penting	0,65	-0,29	92,58
2	Kualitas Fisik	3,63	Sangat Baik	0,60	3,82	Sangat Penting	0,64	-0,19	94,91
3	Kesesuaian	3,62	Sangat Baik	0,60	3,83	Sangat Penting	0,64	-0,21	94,58
4	Pemanfaatan	3,62	Sangat Baik	0,60	3,81	Sangat Penting	0,64	-0,19	94,96
5	Kontribusi Terhadap Perekonomian	3,61	Sangat Baik	0,60	3,79	Sangat Penting	0,63	-0,18	95,25

LAPORAN AKHIR

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Kepuasan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Harapan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	GAP	Tingkat Kesesuaian
6	Kontribusi Terhadap Pembangunan	3,63	Sangat Baik	0,61	3,82	Sangat Penting	0,64	-0,18	95,18
Jumlah Rata-rata tertimbang		21,74		3,62	22,99		3,83	-0,21	94,58
Nilai Indeks				90,58			95,78		
Mutu pelayanan				A			A		
Kinerja				Sangat Baik			Sangat Penting		

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 5. 12 Radar Net Indeks Kepuasan dan Harapan Jalan dan Jembatan

Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap Jaringan Irigasi Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Jaringan Irigasi memperoleh nilai 90,58 dengan mutu pelayanan termasuk kategori A. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Jaringan Irigasi Kabupaten Gresik termasuk dalam kondisi yang Sangat Baik. Skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur kualitas fisik dan kontribusi terhadap pembangunan dengan nilai rata-rata 3,63. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden beranggapan bahwa Jaringan Irigasi memiliki kualitas fisik yang sangat baik. Selain itu, Jaringan Irigasi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan dengan sangat baik. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur kontribusi terhadap perekonomian dengan nilai rata-rata sebesar 3,61. Meskipun demikian, keseluruhan unsur pelayanan masih berada dalam kategori sangat baik. Hal tersebut

LAPORAN AKHIR

menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Gresik sudah sangat baik.

5.2.5 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Gresik terkait dengan sistem jaringan persampahan, sanitasi, drainase, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi.

- Kabupaten Gresik memiliki tiga jenis sistem jaringan persampahan: TPA Ngipik sebagai satu-satunya TPA yang masih beroperasi sejak 2002 hingga sekarang, dengan luas total 9,5 Ha. Dari luas tersebut, sekitar 4 Ha digunakan sebagai zona pembuangan, 3 Ha sebagai sel pasif, dan sisanya 2 Ha untuk fasilitas pendukung.
- Sanitasi di Kabupaten Gresik meningkat dengan persentase Desa/Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), mencapai 12,07% pada tahun 2019, melampaui target sebesar 10%. Sebagian besar rumah di Kabupaten Gresik memiliki jamban pribadi, dengan 99,25% penduduk menggunakan jamban pribadi untuk buang air besar.
- Infrastruktur drainase di Kabupaten Gresik memiliki kondisi yang beragam, dengan banyak wilayah kecamatan atau desa di luar kota memiliki daerah terbuka sebagai daerah resapan air, sementara di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar, meskipun memiliki sistem drainase yang cukup lengkap, banjir masih sering terjadi karena dimensi saluran yang kecil, tersumbat sampah, dan bozem-bozem yang tidak berfungsi.
- Jaringan listrik dilayani oleh PT. PLN. PT PLN (Persero) mengelola kelistrikan di Kabupaten Gresik dengan persentase pelanggan utama terdiri dari 90,54% rumah tangga, 5,70% bisnis, dan sebagian kecil untuk industri, kebutuhan sosial, dan pemerintahan. Wilayah pelayanan energi listrik mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik dan beberapa kecamatan di luar Gresik yang dilayani oleh wilayah kerja PLN yang berbeda.

Evaluasi Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gresik melibatkan persampahan, sanitasi, drainase, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Evaluasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gresik dilakukan melalui penilaian pada unsur-unsur terkait ketersediaan fisik,

LAPORAN AKHIR

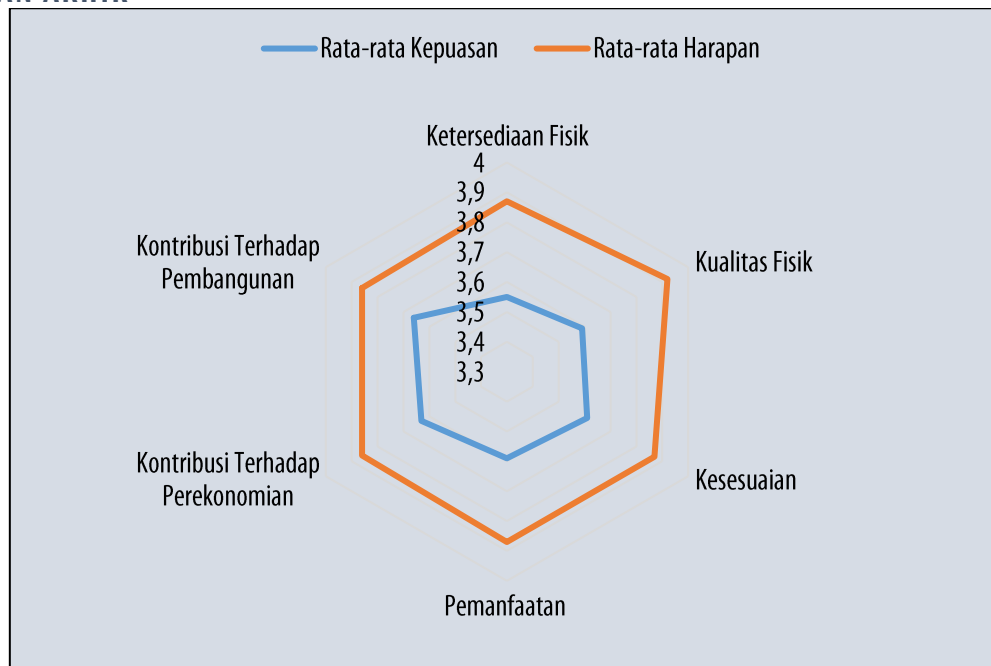
kualitas fisik, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, tingkat pemanfaatan, dan kontribusi terhadap ekonomi serta pembangunan Kabupaten Gresik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman mencapai 90,11 dengan mutu layanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Baik. Di sisi lain, Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) untuk Perumahan dan Permukiman mencapai 96,79 dengan mutu layanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Penting. Evaluasi spesifik terhadap Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) untuk Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gresik tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. 10 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Kepuasan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Harapan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	GAP	Tingkat Kesesuaian
1	Ketersediaan Fisik	3,55	Sangat Baik	0,59	3,87	Sangat Penting	0,64	-0,31	91,95
2	Kualitas Fisik	3,59	Sangat Baik	0,60	3,92	Sangat Penting	0,65	-0,33	91,54
3	Kesesuaian	3,61	Sangat Baik	0,60	3,87	Sangat Penting	0,64	-0,26	93,26
4	Pemanfaatan	3,59	Sangat Baik	0,60	3,87	Sangat Penting	0,64	-0,28	92,87
5	Kontribusi Terhadap Perekonomian	3,63	Sangat Baik	0,61	3,86	Sangat Penting	0,64	-0,23	94,13
6	Kontribusi Terhadap Pembangunan	3,66	Sangat Baik	0,61	3,86	Sangat Penting	0,64	-0,20	94,82
Jumlah Rata-rata tertimbang		21,63		3,60	23,23		3,87	-0,27	93,09
Nilai Indeks				90,11			96,79		
Mutu pelayanan				A			A		
Kinerja				Sangat Baik			Sangat Penting		

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 5. 13 Radar Nett Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan dan Harapan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap Infrastruktur Perumahan dan Permukiman menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman memperoleh nilai 90,11 dengan mutu pelayanan termasuk kategori A. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman termasuk dalam kondisi yang Sangat Baik. Skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur kontribusi terhadap pembangunan dengan nilai rata-rata 3,66. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden beranggapan bahwa Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang tersedia telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan dengan sangat baik atau dengan kata lain Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang dibangun telah memberikan pengaruh yang sangat baik dalam pembangunan Kabupaten Gresik. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur ketersediaan fisik dengan nilai rata-rata sebesar 3,55. Meskipun demikian, keseluruhan unsur pelayanan masih berada dalam kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gresik sudah sangat baik.

Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gresik sebesar 96,79 dengan mutu harapan/kepentingan masuk dalam kategori A yang menunjukkan pelayanan infrastruktur Infrastruktur Perumahan dan

LAPORAN AKHIR

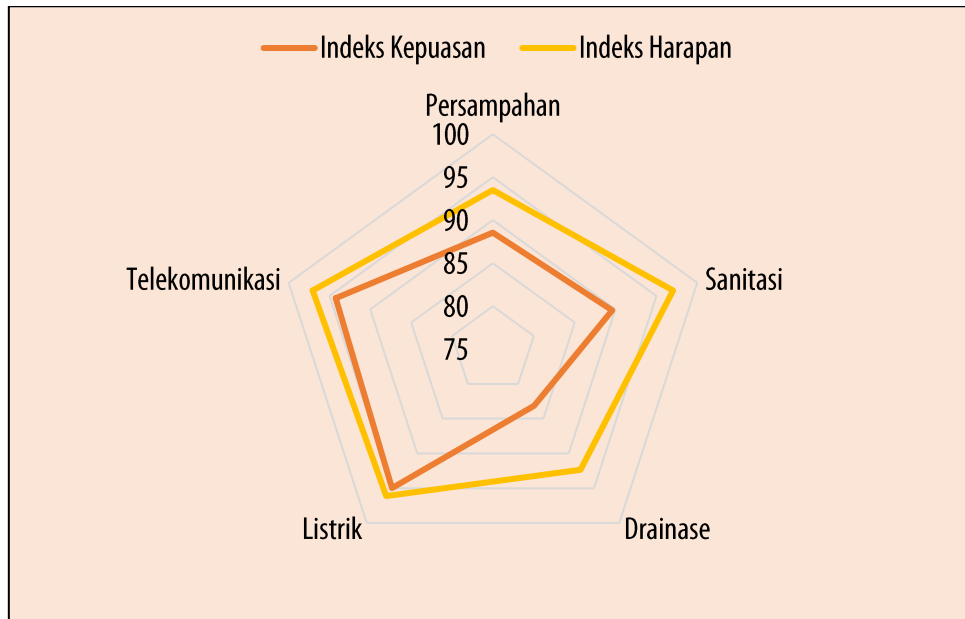
Permukiman di Kabupaten Gresik termasuk dalam kondisi sangat penting. Oleh karena itu, pentingnya harapan/kepentingan masyarakat terhadap pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Gresik terbukti. Harapan tertinggi masyarakat terfokus pada unsur kualitas fisik, dengan skor rata-rata mencapai 3,92. Masyarakat menilai kualitas fisik layanan infrastruktur Perumahan dan Permukiman dalam kategori sangat penting. Sementara itu, harapan terendah masyarakat terhadap layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman kontribusi terhadap perekonomian dan kontribusi terhadap pembangunan, dengan skor rata-rata 3,86. Meskipun memiliki angka rata-rata yang paling rendah diantara unsur pelayanan yang lain, unsur-unsur tersebut masih berada dalam kategori sangat penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan unsur pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Gresik dianggap sangat penting.

Dalam Penyusunan Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik, evaluasi difokuskan pada Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang mencakup persampahan, sanitasi, drainase, jaringan listrik, dan jaringan komunikasi. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa Infrastruktur Perumahan dan Permukiman dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tertinggi adalah Jaringan Listrik mencapai nilai indeks sebesar 94,99 yang memiliki kategori mutu pelayanan A dengan kinerja Sangat Baik. Rincian mengenai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Harapan Layanan Infrastruktur untuk Infrastruktur Perumahan dan Permukiman tersaji dalam tabel di berikut.

Tabel 5. 11 Indeks Kepuasan dan Harapan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Jenisnya

No	Aspek	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Indeks Harapan Layanan Infrastruktur		
		Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
5	Perumahan dan Permukiman	90,11	A	Sangat Baik	96,79	A	Sangat Penting
a	Persampahan	88,56	A	Sangat Baik	93,51	A	Sangat Penting
b	Sanitasi	89,59	A	Sangat Baik	97,04	A	Sangat Penting
c	Drainase	83,15	B	Baik	92,33	A	Sangat Penting
d	Listrik	94,99	A	Sangat Baik	96,13	A	Sangat Penting
e	Telekomunikasi	94,24	A	Sangat Baik	97,06	A	Sangat Penting

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 5. 14 Radar Nett Indeks Kepuasan dan Harapan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diamati bahwa indeks kepuasan layanan tertinggi terdapat pada Infrastruktur Perumahan dan Permukiman adalah Jaringan Listrik dengan nilai mencapai 94,99 dan mutu harapan/kepentingan termasuk dalam kategori A. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jaringan Listrik memiliki kinerja terbaik Infrastruktur Perumahan dan Permukiman lainnya. Di sisi lain, hasil tabulasi menunjukkan bahwa indeks kepuasan layanan terendah terdapat pada Jaringan Drainase dengan nilai mencapai 83,15 dan mutu harapan/kepentingan termasuk dalam kategori B. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pada Jaringan Drainase Kabupaten Gresik.

Apabila ditinjau melalui Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Gresik, dapat diketahui bahwa Jaringan Telekomunikasi mendapatkan skor tertinggi yaitu sebesar 97,06 dengan mutu harapan/kepentingan termasuk kategori A. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jaringan Telekomunikasi dianggap paling penting dibandingkan infrastruktur Perumahan dan Permukiman lainnya.

5.2.6 Infrastruktur Ruang Publik

Kabupaten Gresik saat ini mengalami pembangunan wilayah fisik yang pesat terutama perumahan, perdagangan jasa, dan industri, dan jumlah penduduk yang selalu

LAPORAN AKHIR

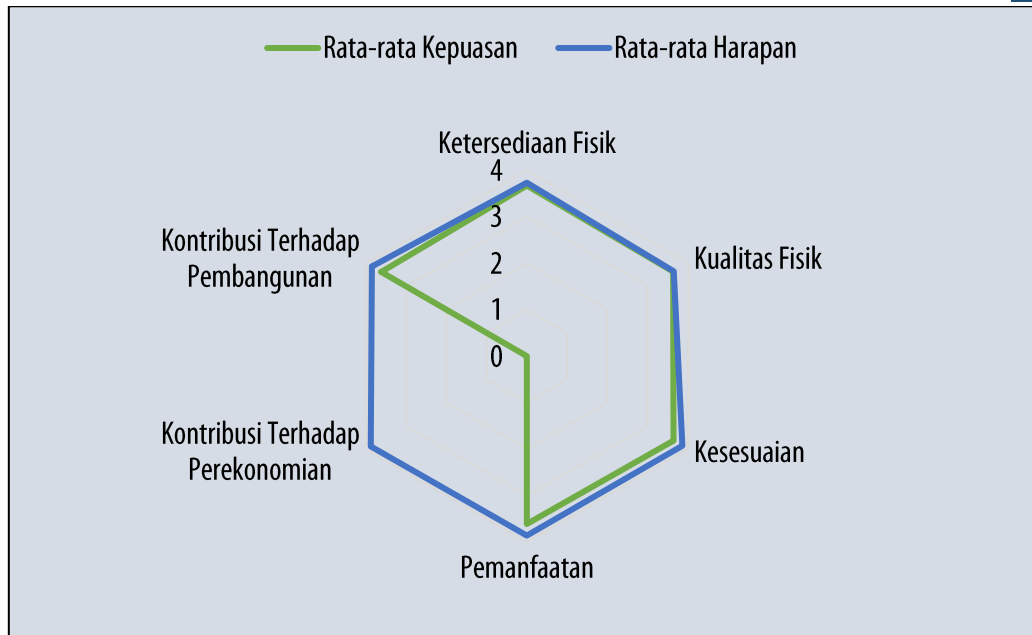
bertambah. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai salah satu faktor yang turut andil dalam mendukung keseimbangan lingkungan di kawasan perkotaan di Kabupaten Gresik. Maka perlu diperhatikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkait kecakupannya. RTH ini meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan semping sungai. Di sisi lain, jaringan jalan di Kabupaten Gresik dibagi menjadi tiga peran terkait pejalan kaki. Jalan arteri tidak didesain untuk pejalan kaki, kecuali jika ada pemisah vertikal. Jalan kolektor membatasi aktivitas pejalan kaki untuk memperhatikan keselamatan, sementara jalan lokal menggunakan zebra cross untuk mengatur penyeberangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Ruang Publik mencapai 90,76 dengan mutu layanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Baik. Di sisi lain, Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) untuk Ruang Publik mencapai 95,13 dengan mutu layanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Penting. Evaluasi spesifik terhadap Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) untuk Infrastruktur Ruang Publik Kabupaten Gresik tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. 12 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Ruang Publik

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Kepuasan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Rata-Rata	Kinerja Unsur Harapan	Nilai Rata-Rata Tertimbang	GAP	Tingkat Kesesuaian
1	Ketersediaan Fisik	3,67	Sangat Baik	0,61	3,73	Sangat Penting	0,62	-0,07	98,24
2	Kualitas Fisik	3,63	Sangat Baik	0,61	3,65	Sangat Penting	0,61	-0,02	99,50
3	Kesesuaian	3,64	Sangat Baik	0,61	3,86	Sangat Penting	0,64	-0,22	94,42
4	Pemanfaatan	3,61	Sangat Baik	0,60	3,86	Sangat Penting	0,64	-0,25	93,62
5	Kontribusi Terhadap Perekonomian	3, 61	Sangat Baik	0,60	3,88	Sangat Penting	0,65	-0,27	92,97
6	Kontribusi Terhadap Pembangunan	3,62	Sangat Baik	0,60	3,85	Sangat Penting	0,64	-0,23	94,02
Jumlah Rata-rata tertimbang		21,78		3,63	22,83		3,81	-0,17	95,46
Nilai Indeks				90,76			95,13		
Mutu pelayanan				A			A		
Kinerja				Sangat Baik			Sangat Penting		

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 5. 15 Radar Nett Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan dan Harapan Ruang Publik

Hasil tabulasi data kepuasan masyarakat terhadap Infrastruktur Ruang Publik menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Ruang Publik memperoleh nilai 90,76 dengan mutu pelayanan termasuk kategori A. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Infrastruktur Ruang Publik termasuk dalam kondisi yang Sangat Baik. Skor kinerja atau kepuasan masyarakat tertinggi terdapat pada unsur ketersediaan fisik dengan nilai rata-rata 3,67. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden beranggapan bahwa Infrastruktur Ruang Publik telah tersedia dengan sangat baik. Sementara itu kinerja terendah yang masih dirasakan oleh masyarakat terdapat pada unsur pemanfaatan dan kontribusi terhadap ekonomi dengan nilai rata-rata sebesar 3,61. Meskipun demikian, keseluruhan unsur pelayanan masih berada dalam kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan Infrastruktur Ruang Publik Kabupaten Gresik sudah sangat baik.

Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap layanan Infrastruktur Ruang Publik Kabupaten Gresik sebesar 95,13 dengan mutu harapan/kepentingan masuk dalam kategori A yang menunjukkan pelayanan infrastruktur Infrastruktur Ruang Publik di Kabupaten Gresik termasuk dalam kondisi sangat penting. Oleh karena itu, pentingnya harapan/kepentingan masyarakat terhadap pelayanan Infrastruktur Ruang Publik di Kabupaten Gresik terbukti. Harapan tertinggi masyarakat terfokus pada unsur kontribusi terhadap perekonomian dengan skor rata-rata mencapai 3,88. Masyarakat menilai layanan infrastruktur Ruang Publik

LAPORAN AKHIR

memberikan kontribusi dalam ekonomi masyarakat di Kabupaten Gresik dalam tingkat yang wilayah sangat penting. Sementara itu, harapan terendah masyarakat terhadap layanan Infrastruktur Ruang Publik adalah unsur kualitas fisik dengan skor rata-rata 3,65. Meskipun memiliki angka rata-rata yang paling rendah diantara unsur pelayanan yang lain, unsur-unsur tersebut masih berada dalam kategori sangat penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan unsur pelayanan Infrastruktur Ruang Publik di Kabupaten Gresik dianggap sangat penting.

Dalam Penyusunan Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik, evaluasi difokuskan pada Infrastruktur Ruang Publik yang mencakup Jalur Pejalan Kaki dan Taman Kota. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa Infrastruktur Ruang Publik dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tertinggi adalah Jalur Pejalan Kaki mencapai nilai indeks sebesar 90,99 yang memiliki kategori mutu pelayanan A dengan kinerja Sangat Baik. Rincian mengenai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Harapan Layanan Infrastruktur Ruang Publik tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 13 Indeks Kepuasan dan Harapan Layanan Infrastruktur Ruang Publik Berdasarkan Jenisnya

No	Aspek	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Indeks Harapan Layanan Infrastruktur		
		Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
6	Ruang Publik	90,76	A	Sangat Baik	95,13	A	Sangat Penting
a	Jalur Pejalan Kaki	90,99	A	Sangat Baik	96,99	A	Sangat Penting
b	Taman Kota	90,53	A	Sangat Baik	95,71	A	Sangat Penting

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diamati bahwa indeks kepuasan layanan tertinggi terdapat pada Infrastruktur Ruang Publik adalah Jalur Pejalan Kaki dengan nilai mencapai 90,99 dan mutu harapan/kepentingan termasuk dalam kategori A. Selain itu, meskipun Taman Kota memiliki nilai yang lebih rendah tetapi mutu pelayanan ruang publik tersebut masih berada dalam kategori Sangat Baik.

Apabila ditinjau melalui Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap layanan Infrastruktur Ruang Publik di Kabupaten Gresik, dapat diketahui bahwa Jalur Pejalan Kaki mendapatkan skor tertinggi yaitu sebesar 96,99 dengan mutu harapan/kepentingan termasuk kategori A. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jalur Pejalan Kaki dianggap lebih penting daripada Taman Kota, namun keduanya memiliki kinerja dalam kategori Sangat Baik.

LAPORAN AKHIR

5.2.7 Analisis Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik

Analisis indeks infrastruktur di Kabupaten Gresik akan melibatkan penilaian terhadap enam aspek infrastruktur utama yaitu jalan dan jembatan, transportasi darat, penyediaan air bersih, perumahan dan permukiman, serta ruang publik. Dalam setiap aspek infrastruktur tersebut, berbagai elemen spesifik akan dievaluasi. Aspek jalan dan jembatan, evaluasi akan mencakup jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan poros desa, jalan lingkungan dan jembatan. Aspek transportasi darat, penilaian akan mencakup moda transportasi seperti bus, kereta api, ojek, angkutan kota, dan terminal. Selanjutnya, aspek penyediaan air bersih, fokus penilaian terkait dengan sumber air baku, unit pengolahan air, dan unit transmisi pelayanan air. Aspek jaringan irigasi tidak ada unsur yang memerlukan penilaian lebih lanjut. Infrastruktur perumahan dan permukiman, elemen-elemen seperti pengelolaan sampah, sanitasi, drainase, serta penyediaan listrik dan telekomunikasi akan dievaluasi. Aspek infrastruktur ruang publik, penilaian akan meliputi jalur pejalan kaki dan ruang terbuka hijau (RTH).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik mencapai 89,62, dengan tingkat mutu layanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Baik. Sementara itu, Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) Kabupaten Gresik untuk tahun yang sama mencapai 94,69, dengan mutu layanan A dan kinerja yang diklasifikasikan sebagai Sangat Penting. Rincian evaluasi IKLI dan IHLI Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. 14 Analisis Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik

No	Aspek	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Indeks Harapan Layanan Infrastruktur		
		Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	Jalan dan jembatan	89,42	A	Baik	95,35	A	Sangat Penting
A	Jalan Nasional	95,36	A	Sangat Baik	94,46	A	Sangat Penting
B	Jalan Provinsi	92,29	A	Sangat Baik	95,64	A	Sangat Penting
C	Jalan Kabupaten	92,38	A	Sangat Baik	95,83	A	Sangat Penting
D	Jalan Poros Desa	84,32	B	Baik	95,58	A	Sangat Penting
E	Jalan Lingkungan	84,73	B	Baik	95,12	A	Sangat Penting
F	Jembatan	87,45	B	Baik	95,49	A	Sangat Penting
2	Transportasi Darat	90,31	A	Sangat Baik	93,38	A	Sangat Penting
A	Bus	90,79	A	Sangat Baik	93,31	A	Sangat Penting
B	Kereta Api	91,80	A	Sangat Baik	93,35	A	Sangat Penting
B	Ojek	91,67	A	Sangat Baik	93,81	A	Sangat Penting
C	Angkutan Kota	85,62	B	Baik	93,03	A	Sangat Penting

LAPORAN AKHIR

No	Aspek	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Indeks Harapan Layanan Infrastruktur		
		Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja
D	Terminal	90,22	A	Sangat Baik	94,15	A	Sangat Penting
3	Air Bersih	86,55	B	Baik	93,81	A	Sangat Penting
A	Sumber Air Baku	87,09	B	Baik	93,03	A	Sangat Penting
B	Unit Pengolahan Air	87,45	B	Baik	94,15	A	Sangat Penting
C	Unit Transmisi dan Pelayanan	85,11	B	Baik	92,71	A	Sangat Penting
4	Jaringan irigasi	90,58	A	Sangat Baik	95,78	A	Sangat Penting
5	Perumahan dan Permukiman	90,11	A	Sangat Baik	96,79	A	Sangat Penting
A	Persampahan	88,56	A	Sangat Baik	93,51	A	Sangat Penting
B	Sanitasi	89,59	A	Sangat Baik	97,04	A	Sangat Penting
C	Drainase	83,15	B	Baik	92,33	A	Sangat Penting
D	Listrik	94,99	A	Sangat Baik	96,13	A	Sangat Penting
E	Telekomunikasi	94,24	A	Sangat Baik	97,06	A	Sangat Penting
6	Ruang Publik	90,76	A	Sangat Baik	95,13	A	Sangat Penting
A	Jalur Pejalan Kaki	90,99	A	Sangat Baik	96,99	A	Sangat Penting
B	Taman Kota	90,53	A	Sangat Baik	95,71	A	Sangat Penting
IKLI/IHLI		89,62	A	Sangat Baik	94,69	A	Sangat Penting

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabulasi data, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik mencapai 89,62, menandakan mutu layanan dalam kategori A. Ini mengindikasikan bahwa kinerja infrastruktur di Kabupaten Gresik dapat diklasifikasikan sebagai Sangat Baik. Evaluasi kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa aspek ruang publik mendapat skor tertinggi, mencapai 90,76, menandakan penyediaan infrastruktur ruang publik sudah sangat baik. Namun, aspek air bersih memiliki skor terendah, yaitu 86,55, namun masih dalam kategori A dan menunjukkan kinerja yang Sangat Baik. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan baik dalam kualitas maupun kuantitas infrastruktur air bersih di Kabupaten Gresik.

Indeks Harapan/Kepentingan masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik mencapai nilai 94,69 yang menempatkannya dalam kategori A untuk mutu harapan/kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa harapan/kepentingan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur di Kabupaten Gresik dianggap sebagai hal yang Sangat Penting. Aspek infrastruktur Perumahan dan Permukiman menjadi harapan tertinggi

LAPORAN AKHIR

masyarakat dengan nilai 96,79, menunjukkan bahwa masyarakat menganggap peran infrastruktur Perumahan dan Permukiman sangat penting bagi mereka.

Berdasarkan indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) pada tahun 2022, Kabupaten Gresik mencatat skor sebesar 89,04. Pada tahun 2024, indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) mengalami peningkatan menjadi 89,62. Peningkatan ini menandakan bahwa kinerja infrastruktur di Kabupaten Gresik dinilai baik oleh masyarakat. Perbandingan skor IKLI di Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut.

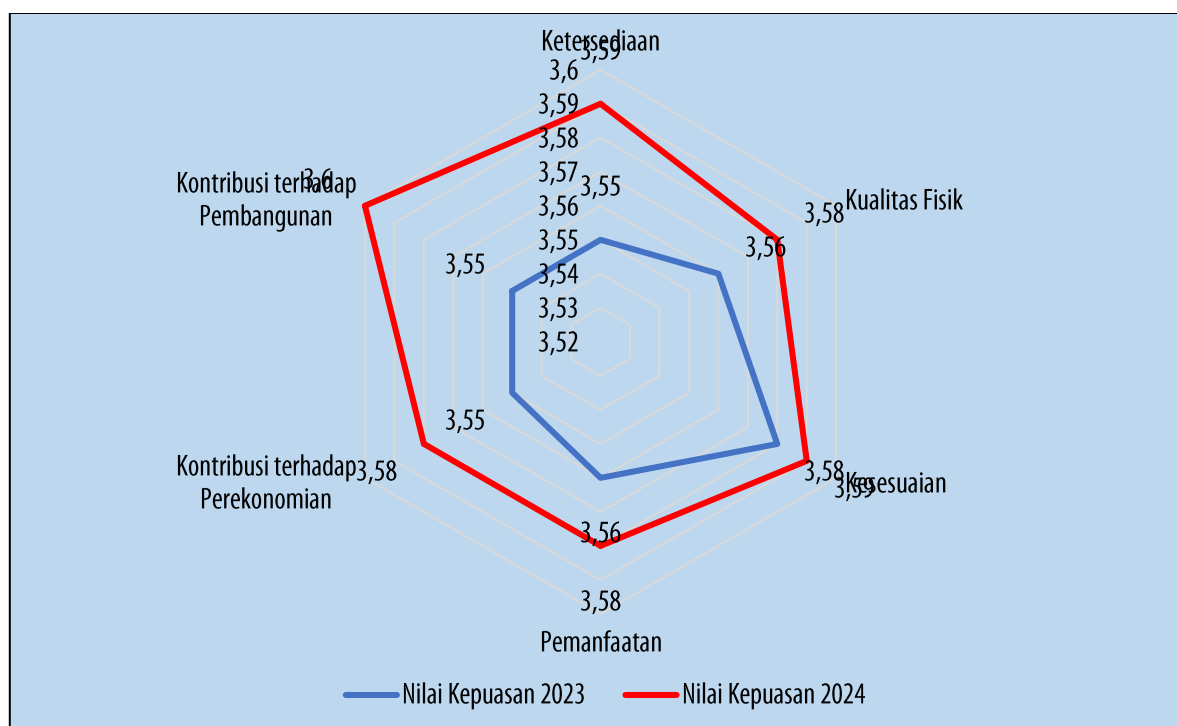
Tabel 5. 15 Perbandingan IKLI Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024

INDIKATOR	ASPEK	Nilai Rata-Rata Kepuasan 2023	Nilai Rata-Rata Kepuasan 2024	Nilai Kepuasan 2023	Nilai Kepuasan 2024
Ketersediaan	Jalan dan Jembatan	3,52	3,59	3,55	3,59
	Transportasi Darat	3,59	3,60		
	Infrastruktur Air Bersih	3,42	3,49		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	3,60	3,62		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,53	3,55		
	Infrastruktur Ruang Publik	3,66	3,67		
Kualitas Fisik	Jalan dan Jembatan	3,53	3,55	3,56	3,58
	Transportasi Darat	3,59	3,59		
	Infrastruktur Air Bersih	3,43	3,46		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	3,61	3,63		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,58	3,59		
	Infrastruktur Ruang Publik	3,62	3,63		
Kesesuaian	Jalan dan Jembatan	3,55	3,58	3,58	3,59
	Transportasi Darat	3,63	3,64		
	Infrastruktur Air Bersih	3,45	3,47		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	3,61	3,62		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,60	3,61		
	Infrastruktur Ruang Publik	3,64	3,64		
Pemanfaatan	Jalan dan Jembatan	3,52	3,60	3,56	3,58
	Transportasi Darat	3,59	3,60		
	Infrastruktur Air Bersih	3,42	3,44		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	3,60	3,62		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,59	3,59		
	Infrastruktur Ruang Publik	3,61	3,61		
Kontribusi Thd Perekonomian	Jalan dan Jembatan	3,52	3,58	3,55	3,58
	Transportasi Darat	3,57	3,59		
	Infrastruktur Air Bersih	3,41	3,43		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	3,59	3,61		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,58	3,63		

LAPORAN AKHIR

INDIKATOR	ASPEK	Nilai Rata-Rata Kepuasan 2023	Nilai Rata-Rata Kepuasan 2024	Nilai Kepuasan 2023	Nilai Kepuasan 2024
	Infrastruktur Ruang Publik	3,60	3,61		
Kontribusi Terhadap Pembangunan	Jalan dan Jembatan	3,52	3,56	3,55	3,60
	Transportasi Darat	3,60	3,65		
	Infrastruktur Air Bersih	3,43	3,48		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	3,61	3,63		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,54	3,66		
	Infrastruktur Ruang Publik	3,60	3,62		
NILAI INDEKS KEPUASAN	Jalan dan Jembatan	88,30	89,42		
	Transportasi Darat	90,07	90,31		
	Infrastruktur Air Bersih	85,80	86,55		
	Infrastruktur Jaringan Irigasi	90,27	90,58		
	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	89,40	90,11		
	Infrastruktur Ruang Publik	90,68	90,76		
IKLI		89,04	89,62		

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 5. 16 Perbandingan Nilai Rata-Rata Kabupaten Gresik Tahun 2023-2024

Berdasarkan tabulasi data, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai kepuasan berdasarkan setiap unsur pelayanan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa kinerja infrastruktur di Kabupaten Gresik dapat diasumsikan

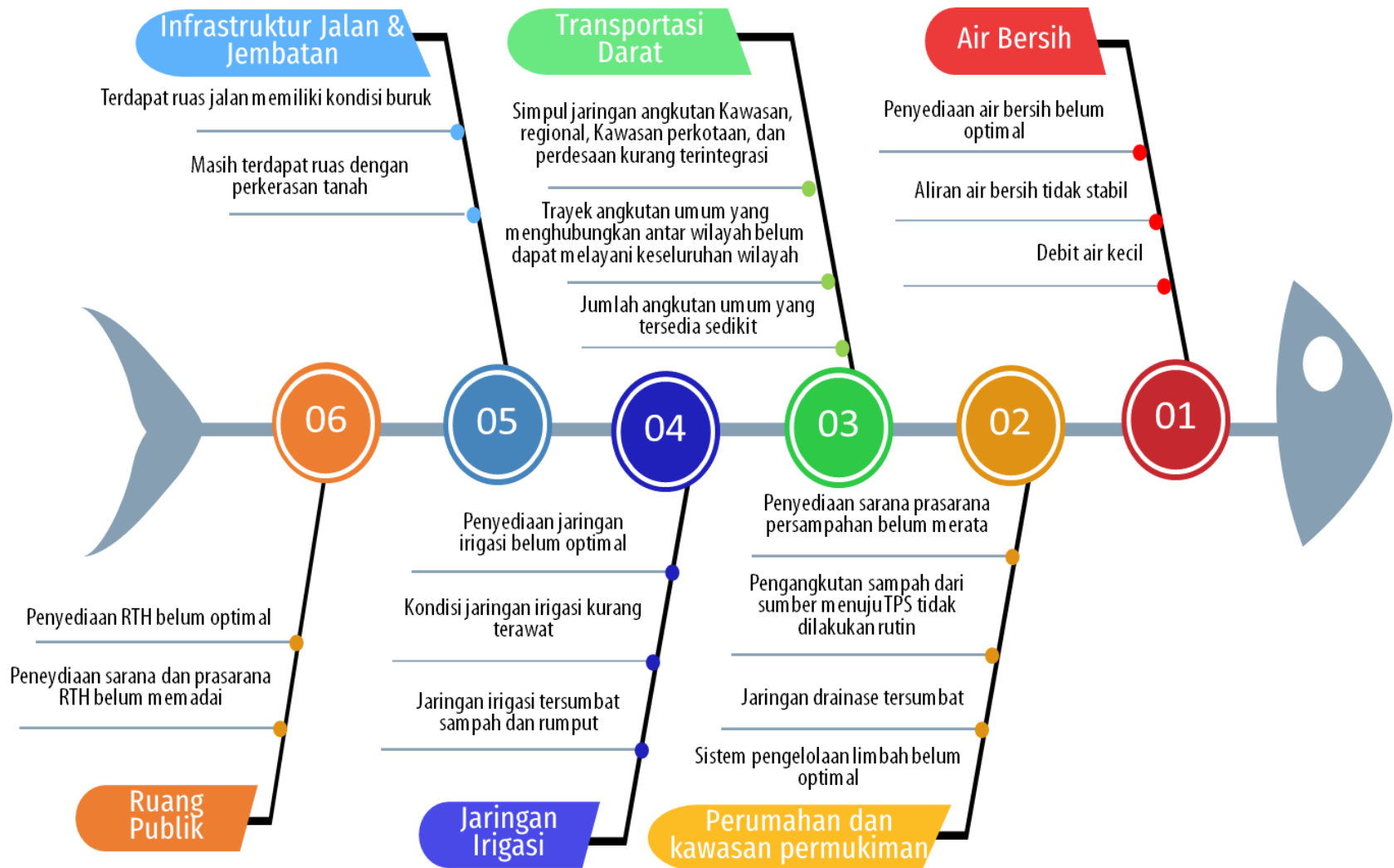
LAPORAN AKHIR

meningkat. Rata-rata kepuasan paling tinggi yaitu terkait dengan kontribusi terhadap pembangunan yang mencapai skor rata-rata nilai kepuasan sebesar 3,60.

5.3 ANALISIS AKAR MASALAH

Analisis akar masalah melibatkan identifikasi dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor mendasar yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap suatu masalah atau situasi yang dihadapi, sehingga memungkinkan perumusan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Proses ini melibatkan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah, memahami keterkaitan di antara faktor-faktor tersebut, dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatifnya. Dengan melakukan analisis ini, solusi yang efektif dan strategis dapat diidentifikasi, tidak hanya untuk menangani gejala masalah tetapi juga untuk menangani akar penyebabnya, sehingga memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

LAPORAN AKHIR



Gambar 5. 17 Analisis Akar Masalah Kabupaten Gresik

5.4 ANALISIS SWOT

Analisis SWOT merupakan analisis yang dilakukan melalui identifikasi faktor-faktor dalam suatu kondisi secara sistematis dengan tujuan untuk merumuskan suatu strategi yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT mencakup kegiatan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*). Berikut merupakan pembahasan lebih lanjut terkait faktor-faktor dalam SWOT (Istiqomah & Andriyanto, 2017).

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan (*Strength*), merupakan situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi, yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani ancaman.

2. Kelemahan (*Weakness*), merupakan situasi internal organisasi yang di mana kompetensi/sumber daya dari suatu organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman.

3. Peluang (*Opportunity*), merupakan situasi eksternal organisasi yang berpotensi dapat menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.

4. Ancaman (*Threat*), merupakan suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan/ancaman. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.

Dalam penyusunan faktor-faktor strategis, analisis SWOT menggunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat menggambarkan dengan jelas peluang dan ancaman yang akan dihadapi dengan didasarkan pada kekuatan dan kelemahan yang ada dalam suatu kondisi eksisting. Matriks SWOT disusun seperti yang tercantum dalam **Gambar 5.8** Dengan memperhatikan unsur-unsur berikut (Istiqomah & Andriyanto, 2017).

LAPORAN AKHIR

1. Strategi SO (*Strength-Opportunities*), merupakan strategi yang ditetapkan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. Strategi ST (*Strenghts-Threats*), merupakan strategi yang ditetapkan dengan berdasar pada kekuatan yang dimiliki agar dapat mengatasi suatu ancaman yang terdeteksi.
3. Strategi WO (*Weaknesses- Opportunities*), merupakan strategi yang ditetapkan dengan berdasar pada pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan dalam organisasi. Dalam hal ini kelemahan-kelemahan yang ada perlu diperbaiki dan dicari solusinya untuk memperoleh suatu peluang.
4. Strategi WT (*Weaknesses- Threats*), merupakan strategi yang ditetapkan dengan berdasar pada usaha untuk menimilkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

	<i>Strengths</i>	<i>Weakness</i>
<i>Threats</i>	ST Memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman	WT Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman
<i>Opportunities</i>	SO Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang	WO Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang

Gambar 5. 18 Matriks SWOT

Sumber: Istiqomah & Andriyanto, 2017

Tabel 5. 16 Matriks SWOT Infrastruktur Kabupaten Gresik

		STRENGTH	WEAKNESS
INTERNAL		1. Sepanjang 280 km atau sebesar 49,6% jalan di Kabupaten Gresik sudah memiliki perkerasan jalan berupa aspal 2. Jaringan air bersih yang tersedia di Kabupaten Gresik secara garis besar sudah terlayani oleh PDAM 3. Sarana Prasarana Pengelolaan sampah sudah tersedia pada beberapa lokasi di Kabupaten Gresik 4. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik sudah memiliki MCK Pribadi dan <i>septic tank</i> 5. Sebagian besar daerah di Kabupaten Gresik sudah memiliki akses listrik dengan baik yang dilayani oleh PT. PLN	1. Kondisi ruas jalan rusak dan berlubang di beberapa titik sehingga banyak terjadi kecelakaan 2. Simpul jaringan angkutan kawasan regional, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan kurang terintegrasi. 3. Trayek Angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah belum mampu melayani keseluruhan wilayah 4. Jumlah angkutan umum yang tersedia masih sedikit 5. Aliran Air bersih tidak stabil sehingga terkadang debit air yang keluar kecil dan masih sering tidak mengalir 6. Sistem pengelolaan jaringan irigasi masih kurang optimal yang menyebabkan saluran irigasi tersumbat sampah dan tanaman 7. Pengangkutan sampah dari sumber menuju TPS belum dilakukan secara rutin 8. Sistem pengelolaan limbah pada tingkat rumah belum optimal yang ditunjukkan dengan belum tersedianya IPAL mandiri 9. Terdapat beberapa ruas jalan yang belum tersedia saluran drainase sehingga saat hujan turun terjadi banjir dan genangan 10. Jaringan Drainase yang tersedia belum bekerja secara optimal karena tersumbat tanaman dan endapan sehingga saat hujan turun terjadi banjir dan genangan 11. Penyediaan Sarana Prasaarana Ruang Publik RTH belum memadai
		1. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2031, Kabupaten Gresik memiliki sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fungsi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri 2. Misi Kabupaten Gresik berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 salah satunya adalah Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota 3. Adanya kebijakan dan indikasi program dalam dokumen kebijakan pembangunan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur Kabupaten Gresik	1. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik tahun 2020 - 2040, Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, yang membawa dampak terjadi bencana banjir, serta terjadinya penurunan kualitas air, sedimentasi dan kepadatan pemukiman sekitar bantaran sungai; 2. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik tahun 2020 – 2040, perkembangan permukiman di perkotaan Kabupaten Gresik lebih dinamis dan cenderung terpusat, mengakibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan dan penurunan pelayanan infrastruktur. 3. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik tahun 2020 - 2040, Kabupaten Gresik mendapatkan pengaruh Kegiatan terhadap Sistem Perkotaan dengan adanya kegiatan – kegiatan yang berkembang tersebut, maka muncul kawasan pemukiman baru dan fasilitas kebutuhan pemukiman 4. Sebagai kabupaten yang berdekatan dengan Kota Surabaya dan memiliki kawasan industri, Kabupaten Gresik memiliki pertumbuhan penduduknya mengalami peningkatan yang cukup besar yang sejalan dengan peningkatan kebutuhan pemenuhan layanan infrastruktur
EKSTERNAL			

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Tabel 5. 17 Analisis SWOT Infrastruktur Kabupaten Gresik

	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
Internal	1. Sepanjang 280 km atau sebesar 49,6% jalan di Kabupaten Gresik sudah memiliki perkerasan jalan berupa aspal 2. Jaringan air bersih yang tersedia di Kabupaten Gresik secara garis besar sudah terlayani oleh PDAM 3. Sarana Prasarana Pengelolaan sampah sudah tersedia pada beberapa lokasi di Kabupaten Gresik 4. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik sudah memiliki MCK Pribadi dan <i>septictank</i> 5. Sebagian besar daerah di Kabupaten Gresik sudah memiliki akses listrik dengan baik yang dilayani oleh PT. PLN	1. Kondisi ruas jalan rusak dan berlubang di beberapa titik sehingga banyak terjadi kecelakaan 2. Simpul jaringan angkutan kawasan regional, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan kurang terintegrasi. 3. Trayek Angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah belum mampu melayani keseluruhan wilayah 4. Jumlah angkutan umum yang tersedia masih sedikit 5. Aliran Air bersih tidak stabil sehingga terkadang debit air yang keluar kecil dan masih sering tidak mengalir 6. Sistem pengelolaan jaringan irigasi masih kurang optimal yang menyebabkan saluran irigasi tersumbat sampah dan tanaman 7. Pengangkutan sampah dari sumber menuju TPS belum dilakukan secara rutin 8. Sistem pengelolaan limbah pada tingkat rumah belum optimal yang ditunjukkan dengan belum tersedianya IPAL mandiri 9. Terdapat beberapa ruas jalan yang belum tersedia saluran drainase sehingga saat hujan turun terjadi banjir dan genangan 10. Jaringan Drainase yang tersedia belum bekerja secara optimal karena tersumbat tanaman dan endapan sehingga saat hujan turun terjadi banjir dan genangan 11. Penyediaan Sarana Prasarana Ruang Publik RTH belum memadai
Eksternal		

LAPORAN AKHIR

Opportunity	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2031, Kabupaten Gresik memiliki sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fungsi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri 2. Misi Kabupaten Gresik berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 salah satunya adalah Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota 3. Adanya kebijakan dan indikasi program dalam dokumen kebijakan pembangunan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur Kabupaten Gresik	1. Memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada untuk mendukung pembangunan infrastruktur berdaya saing, meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar arus lalu lintas, sehingga dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan air bersih yang sudah ada melalui PDAM dengan membangun infrastruktur yang lebih baik dan efisien, termasuk meningkatkan kapasitas penyediaan air bersih, memperbaiki jaringan distribusi, dan memperluas cakupan layanan ke daerah-daerah yang masih belum terlayani secara optimal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi 3. Mengoptimalkan sarana prasarana pengelolaan sampah yang sudah tersedia dan mengintegrasikannya dalam program pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif berupa lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mengurangi dampak negatif dari penumpukan sampah terhadap infrastruktur dan lingkungan	1. Terintegrasikan misi dan kebijakan pembangunan infrastruktur untuk dapat mengatasi kelemahan infrastruktur seperti jalan rusak, kurangnya integrasi jaringan angkutan, dan sistem pengelolaan limbah yang belum optimal. 2. Menyelaraskan strategi pembangunan infrastruktur dengan misi dan kebijakan yang ada, Kabupaten Gresik sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Membangun kemitraan dan kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan peluang yang ada dalam pembangunan infrastruktur.
Threats	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik tahun 2020 – 2040, perkembangan permukiman di perkotaan Kabupaten Gresik lebih dinamis dan cenderung terpusat, mengakibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan dan penurunan pelayanan infrastruktur. 2. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik tahun 2020 - 2040, Kabupaten Gresik mendapatkan pengaruh Kegiatan terhadap Sistem Perkotaan dengan adanya kegiatan – kegiatan	1. Mengintegrasikan keberhasilan infrastruktur yang sudah ada dengan upaya-upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan pertumbuhan permukiman dan peningkatan kebutuhan layanan infrastruktur berdasarkan data pertumbuhan penduduk. 2. Melakukan identifikasi pada area-area yang membutuhkan peningkatan layanan infrastruktur dan mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan secara efektif dan berkelanjutan.	1. Memperkuat integrasi simpul jaringan angkutan antar wilayah dan jumlah angkutan umum yang tersedia untuk dapat meminimalisir dampak ketidakseimbangan pertumbuhan dan meningkatkan aksesibilitas infrastruktur bagi penduduk secara merata. 2. Mengoptimalkan pengelolaan limbah dan irigasi serta meningkatkan penyediaan sarana prasarana ruang publik untuk menghadapi pertumbuhan penduduk yang signifikan dan peningkatan kebutuhan

LAPORAN AKHIR

yang berkembang tersebut, maka muncul kawasan pemukiman baru dan fasilitas kebutuhan pemukiman 3. Sebagai kabupaten yang berdekatan dengan Kota Surabaya dan memiliki kawasan industri, Kabupaten Gresik memiliki pertumbuhan penduduknya mengalami peningkatan yang cukup besar yang sejalan dengan peningkatan kebutuhan pemenuhan layanan infrastruktur 4. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik tahun 2020 - 2040, Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, yang membawa dampak terjadi bencana banjir, serta terjadinya penurunan kualitas air, sedimentasi dan kepadatan pemukiman sekitar bantaran sungai	3. Memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada untuk memperkuat dan meningkatkan efisiensi pengelolaan air bersih dan mitigasi banjir sehingga Kabupaten Gresik dapat menghadapi ancaman terhadap kualitas air dan potensi banjir sebagai bagian dari Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo.	infrastruktur sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. 3. Mengatasi kondisi ruas jalan rusak dan kurangnya saluran drainase untuk menghadapi ancaman banjir dan genangan yang terjadi melalui pembenahan dan pemeliharaan jaringan jalan serta drainase yang optimal untuk mengurangi risiko kecelakaan dan dampak banjir.
--	--	--

Sumber : Hasil Analisis, 2024

5.5 ANALISIS IFAS-EFAS

Analisis IFAS (*Internal Factor Analysis Strategy*) dan EFAS (*External Factor Analysis*) adalah analisis yang melakukan faktor-faktor strategis baik pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan dan rating. Analisis IFAS sendiri merupakan analisis untuk menganalisis faktor internal apa saja yang termasuk sebagai kekuatan dan kelemahan. Sedangkan, analisis EFAS merupakan penentuan faktor eksternal yang dapat menjadi peluang maupun ancaman yang dimiliki (Suryati, 2015). Hasil analisis SWOT yang sebelumnya telah dilakukan akan membantu dalam melakukan analisis IFAS-EFAS. Beberapa aspek SWOT yang mencakup kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman (T) saling terkait dan dapat digunakan untuk menentukan strategi pengembangan, baik secara teknis maupun non-teknis. Analisis SWOT akan membantu dalam pembobotan dan penilaian untuk menentukan strategi pengembangan, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk kuadran untuk memandu langkah-langkah selanjutnya.

Aspek-aspek SWOT dinilai dengan memberikan bobot antara 0,00 hingga 1,00, dengan total bobot setiap faktor (internal/eksternal) adalah 1. Setelah pembobotan, masing-

LAPORAN AKHIR

masing aspek diberikan rating untuk menunjukkan tingkat kepentingannya (1 = agak penting; 2 = penting; 3 = sangat penting). Nilai bobot kemudian dikalikan dengan rating yang telah ditentukan. Total dari setiap faktor (internal/eksternal) dijumlahkan untuk menentukan letak dalam kuadran SWOT sebagai langkah dalam menentukan strategi pengembangan.

Tujuan menganalisa faktor-faktor internal (IFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan dan kelemahan, sedangkan tujuan menganalisa faktor-faktor eksternal (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman. Setelah menghasilkan faktor internal maupun eksternal maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses pembobotan, peratingan, dan penilaian yang akan menghasilkan skor pembobotan untuk masing-masing faktor. Berikut merupakan langkah-langkah dalam menentukan nilai dalam matriks IFAS EFAS menurut (Rangkuti, 2013):

1. Susunlah dalam kolom masing – masing.
2. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak pada faktor strategis.
3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4.
4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

LAPORAN AKHIR

Berdasarkan langkah-langkah tersebut dapat dibuat sebuah garis-garis sumbu X dan Y. Dimana pada sumbu-sumbu tersebut membentuk titik potong yang membagi 4 ruang atau kuadran. Posisi-posisi kuadran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kuadran 1 (*growth*) yaitu kuadran pertumbuhan. Pada kuadran ini terbagi menjadi 2 ruang antara lain adalah ruang A dan ruang B. Ruang A dengan sebutan *Rapid Growth Strategy*, yaitu strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dalam waktu singkat. Ruang B dengan sebutan *Stable Growth Strategy* yaitu strategi pertumbuhan stabil dan pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi.
2. Kuadran 2 (*stability*) yaitu kuadran pertumbuhan stabil. Pada kuadran ini juga memiliki 2 ruang yaitu ruang C dan ruang D. Ruang C dengan sebutan *Agressive Maintenance Strategy*, yaitu pengelola objek melaksanakan pengembangan secara agresif dan aktif. Sedangkan Ruang D dengan sebutan *Selective Maintenance Strategy* yaitu pengelolaan objek dengan pemilahan-pemilahan hal-hal yang dianggap penting.
3. Kuadran 3 (*Survival*) yaitu kuadran pertumbuhan dengan survival. Pada kuadran ini juga terdapat 2 ruang yaitu ruang E dan ruang F. Ruang E dengan sebutan *Turn Arround Strategy* adalah strategi bertahan dengan cara tambal sulam atau menutupi kelemahan dengan kekuatan untuk operasional objek. Ruang F dengan sebutan *Guirelle Strategy* yaitu startegi dengan gerilya, operasinal, dan diadakan pembangunan atau usaha pemecahan masalahn dan ancaman.
4. Kuadran 4 (*Diversification*) yaitu kuadran pertumbuhan. Pada kuadran ini juga memiliki 2 ruang yaitu ruang G dan ruang H. Ruang G dengan sebutan *Concentric Strategy* yaitu suatu strategi pengembangan objek yang dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau Kordinator oleh satu pihak. Sedangkan ruang H dengan sebutan *Conglomerate Strategy* yaitu suatu strategi pengembangan masing-masing kelompok dengan cara koordinasi disetiap sektor itu sendiri.

Tabel 5. 18 Matriks Analisis IFAS Infrastruktur Kabupaten Gresik

LAPORAN AKHIR

Faktor Strategi Internal	No.	Keterangan	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Aspek Kekuatan/ <i>Strength</i>	1	Sepanjang 280 km atau sebesar 49,6% jalan di Kabupaten Gresik sudah memiliki perkerasan jalan berupa aspal	0,1	4	0,4
	2	Jaringan air bersih yang tersedia di Kabupaten Gresik secara garis besar sudah terlayani oleh PDAM	0,1	4	0,4
	3	Sarana Prasarana Pengelolaan sampah sudah tersedia pada beberapa lokasi di Kabupaten Gresik	0,1	3	0,3
	4	Sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik sudah memiliki MCK Pribadi dan <i>septic tank</i>	0,1	3	0,3
	5	Sebagian besar daerah di Kabupaten Gresik sudah memiliki akses listrik dengan baik yang dilayani oleh PT. PLN	0,1	2	0,2
Sub total			0,5	16	1,6
Aspek Kelemahan/ <i>Weakness</i>	1	Kondisi ruas jalan rusak dan berlubang di beberapa titik sehingga banyak terjadi kecelakaan	0,1	2	0,2
	2	Simpul jaringan angkutan kawasan regional, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan kurang terintegrasi.	0,1	3	0,3
	3	Trayek Angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah belum mampu melayani keseluruhan wilayah	0,1	2	0,2
	4	Jumlah angkutan umum yang tersedia masih sedikit	0,1	2	0,2
	5	Aliran Air bersih tidak stabil sehingga terkadang debit air yang keluar kecil dan masih sering tidak mengalir	0,1	3	0,3
	6	Sistem pengelolaan jaringan irigasi masih kurang optimal yang menyebabkan saluran irigasi tersumbat sampah dan tanaman	0,1	2	0,2
	7	Pengangkutan sampah dari sumber menuju TPS belum dilakukan secara rutin	0,1	1	0,1
	8	Sistem pengelolaan limbah pada tingkat rumah belum optimal yang ditunjukkan dengan belum tersedianya IPAL mandiri	0,1	1	0,1
	9	Terdapat beberapa ruas jalan yang belum tersedia saluran drainase sehingga saat hujan turun terjadi banjir dan genangan	0,1	2	0,2
	10	Jaringan Drainase yang tersedia belum bekerja secara optimal karena tersumbat tanaman dan endapan sehingga saat hujan turun terjadi banjir dan genangan	0,05	2	0,1
	11	Penyediaan Sarana Prasarana Ruang Publik RTH belum memadai	0,05	2	0,1
Sub total			1	22	2
TOTAL			1,5	38	-0,4

Sumber: Hasil Analisa, 2024

LAPORAN AKHIR

Tabel 5. 19 Matriks Analisis EFAS Infrastruktur Kabupaten Gresik

Faktor Strategi Eksternal	No.	Keterangan	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Aspek Peluang/ Opportunities	1	Berdasarkan Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik tahun 2020 – 2040, perkembangan permukiman di perkotaan Kabupaten Gresik lebih dinamis dan cenderung terpusat, mengakibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan dan penurunan pelayanan infrastruktur	0,2	3	0,6
	2	Berdasarkan Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik tahun 2020 - 2040, Kabupaten Gresik mendapatkan pengaruh Kegiatan terhadap Sistem Perkotaan dengan adanya kegiatan – kegiatan yang berkembang tersebut, maka muncul kawasan pemukiman baru dan fasilitas kebutuhan pemukiman	0,1	2	0,2
	3	Sebagai kabupaten yang berdekatan dengan Kota Surabaya dan memiliki kawasan industri, Kabupaten Gresik memiliki pertumbuhan penduduknya mengalami peningkatan yang cukup besar yang sejalan dengan peningkatan kebutuhan pemenuhan layanan infrastruktur	0,1	2	0,2
	4	Berdasarkan Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik tahun 2020 - 2040, Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, yang membawa dampak terjadi bencana banjir, serta terjadinya penurunan kualitas air, sedimentasi dan kepadatan pemukiman sekitar bantaran sungai;	0,2	3	0,6
Sub total			0,6	10	1,6
Aspek Ancaman/ Threats	1	Kebutuhan infrastruktur semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk	0,1	2	0,2
	2	Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjaga Infrastruktur yang sudah di sediakan	0,2	3	0,6
	3	Globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut adanya penyempurnaan dalam penyediaan infrastruktur	0,1	2	0,2
Sub total			0,4	7	1
TOTAL			1	17	0,6

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Berdasarkan pada penghitungan dengan IFAS dan EFAS di atas, maka dapat diketahui nilai X dan Y sebagai berikut :

$$X = \text{Potensi} + \text{Masalah}$$

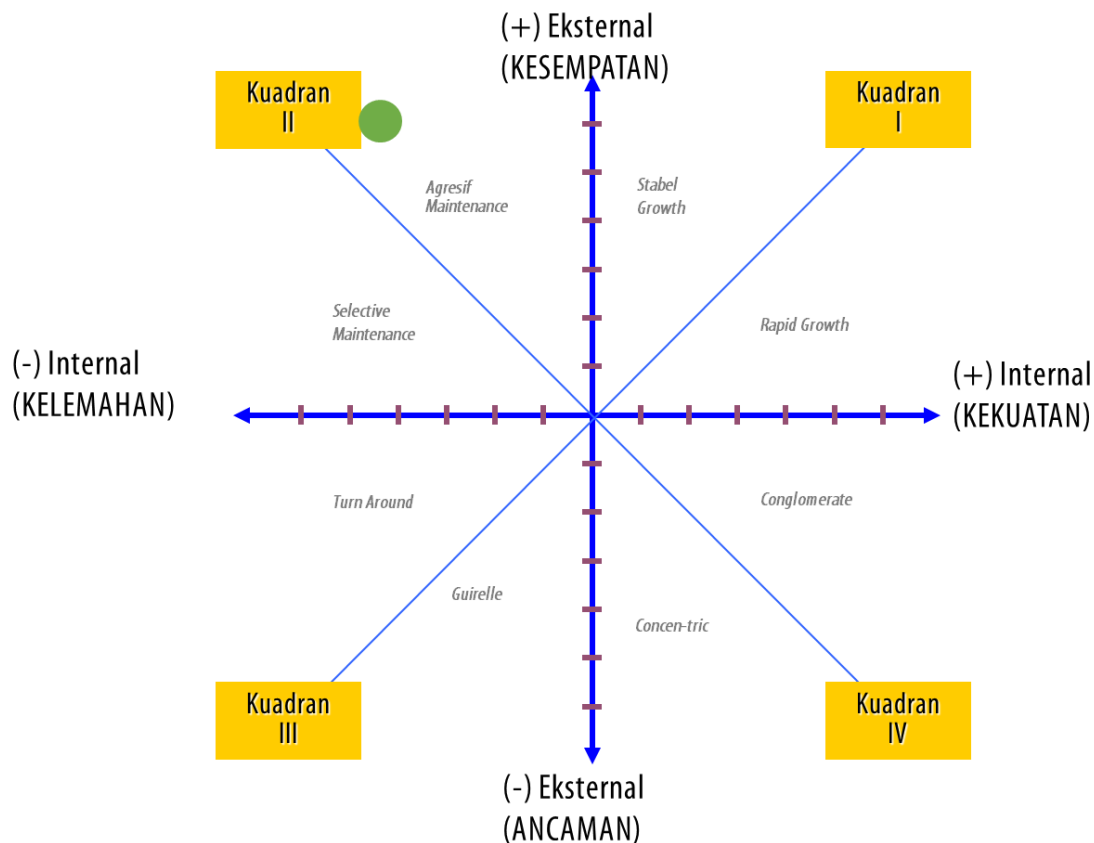
$$= 1,6 + (-2,00)$$

$$= -0,4$$

$$Y = \text{Peluang} + \text{Ancaman}$$

$$= 1,6 + (-0,6)$$

$$= 0,6$$



Gambar 5. 19 Kuadran IFAS EFAS Kabupaten Gresik

5.6 KONSEP DASAR

Konsep dasar diperlukan karena digunakan sebagai pemikiran awal yang akan dijadikan pedoman dan agar dikembangkan menjadi lebih sempurna untuk direalisasikan. Sama halnya dengan Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik. Dibutuhkan konsep dasar untuk pembangunan, seperti perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat, dan harga diri. Apalagi dalam hal pembangunan infrastruktur, yang mana infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Baik ekonomi tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama di Kabupaten Gresik.

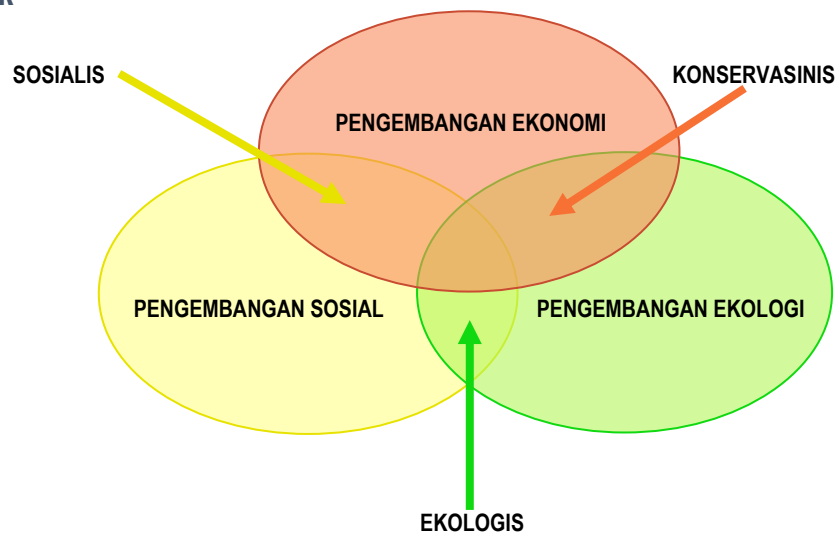
Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim,1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan

LAPORAN AKHIR

tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource.

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi ditempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang.

Konsep keberlanjutan dipahami sebagai integrasi tiga pilar, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan saling memperkuat. Dengan demikian, perumusan kota yang berkelanjutan perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang keberlanjutan dari komunitas manusia atau warga kotanya seperti aspek budaya dan tata kelola. Konsep pembangunan permukiman berkelanjutan ini, baik itu keberlanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologi dapat menunjang terlaksananya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.



Gambar 5. 20 Konsep Kota Berkelanjutan

Untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam *Paris Agreement*. *Paris Agreement* merupakan kesepakatan lingkungan yang terjalin oleh hampir setiap negara termasuk Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya. Di lain sisi, untuk dapat mencapai pembangunan berkelanjutan, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur untuk menerapkan aspek-aspek yang diantaranya meliputi:

1. Penerapan prinsip-prinsip **Quality Infrastructure Investment (QII)**, antara lain dengan:
 - a) memaksimalkan dampak positif infrastruktur dalam mencapai pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan;
 - b) meningkatkan efisiensi ekonomi dari perspektif *life-cycle cost*;
 - c) mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam investasi infrastruktur; d) memperhatikan ketahanan bangunan terhadap bencana alam dan risiko lainnya;
 - d) mengintegrasikan pertimbangan sosial dalam investasi infrastruktur; dan
 - e) memperkuat tata kelola infrastruktur.
2. Penerapan **Green Infrastructure**. Infrastruktur Hijau merupakan konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan. Pembangunan yang dimulai pada tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan didesain dengan memperhatikan aspek-aspek yang mampu melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Adapun prinsip-prinsip infrastruktur hijau meliputi, pengurangan penggunaan sumber daya (lahan,

LAPORAN AKHIR

material, air, sumber daya alam dan sumber daya manusia), pengurangan tumpukan limbah, penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya, penggunaan sumber daya hasil daur ulang, perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian, mitigasi risiko keselamatan kesehatan perubahan iklim dan bencana.

3. Penerapan ***Circular Economy Infrastructure***. *Circular economy* atau sering disebut sebagai "sirkularitas" adalah sistem ekonomi yang bertujuan meminimalkan limbah dan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin, sehingga dapat mengurangi jumlah bahan baru yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dengan memaksimalkan jumlah bahan yang lama yang telah didaur ulang. Sirkularitas pada prinsipnya memiliki enam prinsip utama, yaitu ***Rethink, Refuse, Repair, Reduce, Reuse, dan Recycle (6R)***.

Selain itu, guna mendukung terwujudnya infrastruktur berkelanjutan, diperlukan strategi dan inisiatif pembiayaan yang memadai. Adapun pembiayaan yang saat ini tersedia di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan terbuka untuk dikerjasamakan dengan lembaga finansial maupun *philanthropies*, antara lain:

1. ***Sovereign Wealth Fund*** melalui Indonesia *Investment Authority* sebagai bentuk dana pemerintah yang berkontribusi untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,
2. ***Sustainable Development Goals Indonesia One platform***, sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk *green project* yang dananya bersumber dari berbagai lembaga filantropis, donor, *climate finance institutions*, MDB, dan sebagainya.
3. ***Public Private Partnership (PPP scheme)*** sebagai bentuk kebijakan fiskal dan dukungan pemerintah yang tersedia untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
4. ***Green Climate Fund*** yang dananya ditujukan untuk membantu negara berkembang dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan transisi terhadap perubahan iklim, *government/ sovereign guarantee* untuk mendukung proyek infrastruktur agar *bankable* dan layak secara finansial, dan
5. ***Green bonds*** sebagai salah satu inovasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan *green* infrastruktur di Indonesia.

Dengan diterapkannya aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan skema pembiayaan yang tersedia, implementasi infrastruktur berkelanjutan diharapkan

LAPORAN AKHIR

dapat terwujud dan memberikan manfaat dan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, seperti:

1. **Berkurangnya tingkat emisi karbon.** Komisi Ekonomi dan Iklim Global dari *The New Climate Economy* (NCE) memproyeksikan bahwa perencanaan pembangunan dengan penerapan infrastruktur berkelanjutan akan membantu mewujudkan tercapainya *net zero emission*, melalui pengurangan kadar emisi karbon hingga 3.7 gigaton dalam 5 tahun ke depan.
2. **Peningkatan implementasi energi terbarukan.** Tersedianya layanan energi yang bersih dan terjangkau secara ekonomi dan juga secara upaya (jarak dan/atau waktu tempuh untuk pengadaan energi), sehingga dapat memberikan akses energi terbarukan yang memadai secara menyeluruh bagi masyarakat.
3. **Tersedianya lapangan pekerjaan hijau (*green employment*).** Sebagai konsekuensi dari dekarbonisasi ekonomi dan pengembangan ekonomi sirkular, lapangan pekerjaan di masa depan akan tercipta dengan beradaptasi pada penerapan realitas hijau.
4. **Berkurangnya kesenjangan.** Rencana infrastruktur saat ini yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia di beberapa tempat akan tergantikan dengan *sustainable infrastructure* yang akan memberikan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, transportasi, **konektivitas jaringan, dan sebagainya.**



Gambar 5. 21 Konsep Smart City

Sumber: Frost & Sullivan

LAPORAN AKHIR

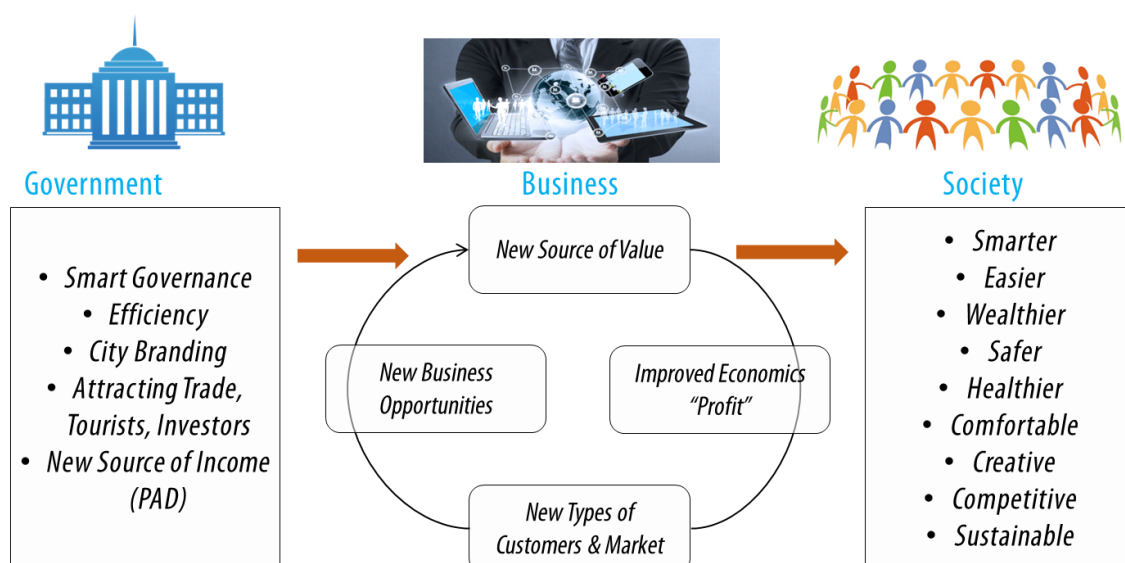
Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa terdapat 12 konsep *smart city*. Penjelasan dari setiap konsep smart city sebagai berikut.

1. **Urbanization city as a costumer.** Perubahan perilaku masyarakat sebagai costumers. Dimana dunia kan mengalami migrasi besar-besaran ke daerah perkotaan, mengubah kota menjadi pusat perekonomian. Sekitar 90% urbanisasi ini akan terjadi di Asia dan Afrika. Pada tahun 2030 lebih dari 50% populasi di Asia dan Afrika akan tinggal di daerah perkotaan. Kota yang menjadi pusat pertumbuhan perekonomian diharapkan mampu menggerakkan perekonomian negara.
2. **Smart is the New Green.** Dekade mendatang akan melihat evolusi alami dari produk dan layanan ramah lingkungan menjadi produk dan layanan cerdas. Kebutuhan yang cerdas dan hemat energy akan mendorong dan menumbuhkan kota pintar, kota pintar diukur dari tingkat kecerdasan dan integrasi infrastruktur yang menghubungkan sektor kesehatan, energi, gedung, transportasi, dan tata kelola.
3. **Social trends.** Gen Y (millenials), Middle Bulge (Middle Age Gen), She-Economy (Woman), Geo-socialization (massive use of localization – eg. Map). Tren sosial menghadirkan masa depan yang terus berubah, dalam satu dekade mendatang akan terjadi pergeseran kelas konsumen.
4. **Connectivity and convergency.** Meningkatkan tethering perangkat ke internet akan menciptakan jaringan luas sehingga dunia akan saling terhubung. Konektivitas dan konvergensi teknologi baru akan mengeluarkan potensi baru IoT dan berbagai inovasi yang akan mengubah cara hidup.
5. **Bricks and clicks.** Model ini akan menjadi trend yang menggabungkan digital, virtual, dan fisik menjadi satu. Mode ini mempengaruhi dan membentuk industri lain, termasuk otomotif, logistik, dan keuangan.
6. **Innovation to zero.** Merupakan mega visi yang fokus pengembangan ke arah produk dan teknologi dengan visi “*innovate to zero*” yang mengedepankan inovasi sosial.
7. **Future of Energy.** Energi terbarukan dengan tenaga angin dan surya diharapkan menjadi proporsi global terbesar. Transformasi digital dan teknologi cerdas akan

LAPORAN AKHIR

memungkinkan infrastruktur energi menjadi sistem energi yang lebih fleksibel, cerdas, terhubung, dan responsif.

8. **Economy: Beyond BRIC: The next game changers.** Pergeseran ekonomi yang signifikan dari BRICKS dilakukan ke berbagai negara. Dimana perusahaan melihat ekonomi baru diluar BRICKS untuk operasi bisnis mereka.
9. **Future infrastructure development.** Kurangnya Kebutuhan investasi berdasarkan tren saat ini akan menjadi kesenjangan besar yang perlu diatasi, terutama untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan listrik.
10. **Health, wellness and well being.** Perawatan kesehatan semakin beralih ke model PaaS dan Daas yang inovatif dan pergeseran paradigma industri ini akan mengarah pada peluang dan kemitraan yang lebih besar untuk perusahaan biofarmasi dan perangkat medis.
11. **Future of mobility.** Saat ini, industri mobilitas mengalami transformasi dari transportasi pribadi menjadi pendekatan pintu ke pintu yang terintegrasi. Perangkat berteknologi sekarang memberikan perjalanan yang multi-moda real time, door to door yang menghasilkan kenyamanan, penghematan waktu, dan biaya.
12. **New business models value for money.** Munculnya platform online diharapkan mampu memengaruhi konsumsi dan model bisnis baru. Dengan Etika dan praktik bisnis sebagai faktor fundamental diharapkan dapat mendorong model bisnis.



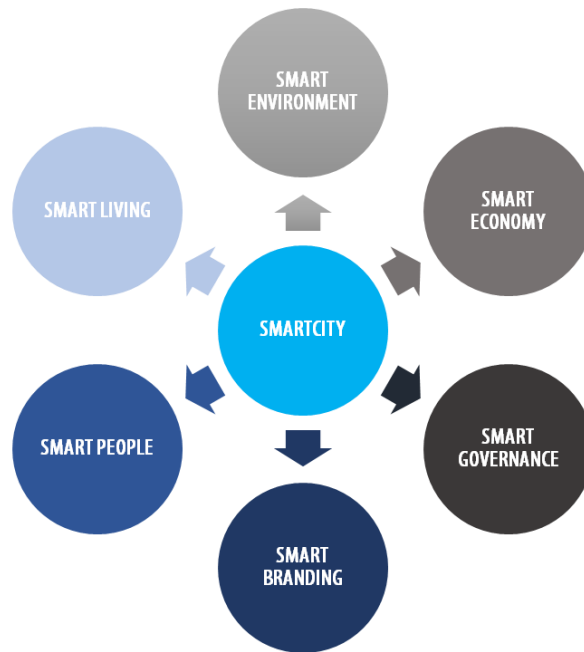
Gambar 5. 22 Konsep Smart City

Sumber: Frost & Sullivan

Berdasarkan Konsep *smart city* dari gambar diatas, diketahui bahwa terdapat tiga komponen atau pendukung sebuah konsep kota cerdas/pintar. Tiga hal tersebut yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. *Smart city* yang didukung oleh pelaksanaan kinerja pemerintah dengan mendorong proses pelayanan publik yang efisien, efektif serta transparan pada menyebarkan informasi ke masyarakat umum, serta kepada lembaga lainnya yang melaksanakan administrasi pemerintah. Pemerintah merupakan step pertama dalam memajukan sebuah kota atau kota pintar. Konsep *smart city* dapat diwujudkan dengan pemerintahan yang cerdas, efisiensi, citra kota yang merupakan upaya strategi dari suatu kota dapat membentuk identitas kota yang berguna untuk memasarkan segala aktivitas kegiatan. selain citra kota, pemerintah juga pintar dalam menarik perdagangan, turis, dan investor baik dengan menciptakan pariwisata, dan lainnya. Menciptakan inovasi baru dalam sebuah kota yang menarik banyak orang maka akan menciptakan sumber pendapatan baru bagi kota tersebut.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam merealisasikan konsep *smart city* diatas, sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan pengusaha/business. Kerjasama ini memiliki banyak manfaat untuk mendukung terwujudnya *smart city*. Dalam hal Penyediaan infrastruktur dan/atau layanan untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. seperti untuk membangun atau menjalankan utilitas publik seperti jalan, pembangkit listrik, bandara, dan stasiun kereta api. Dalam mewujudkan Konsep *smart city* dalam hal usaha dapat dibantu dengan menghasilkan sumber nilai baru yang diciptakan maka kedepannya mendapatkan keuntungan ekonomi, jenis pelanggan dan pasar baru, dan peluang bisnis baru.

Salah satu tujuan *smart city* yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam mendukung mewujudkan *smart city*, sehingga hendaknya masyarakat dapat ikut andil dalam memberikan masukan-masukan penting yang nantinya dapat diterapkan untuk mewujudkan *smart city*. Konsep smart city untuk masyarakat diharapkan segala kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat akan lebih pintar, lebih mudah, lebih kaya, lebih aman, lebih sehat, nyaman, kreatif, kompetitif, dan berkelanjutan.

**Gambar 5. 23 Komponen Smart City**

Sumber: Frost & Sullivan

Terdapat enam komponen *smart city* yang apabila terpenuhi dalam suatu kota maka banyak manfaat yang dapat dirasakan, seperti memonitor kondisi infrastruktur penting kota, merencanakan aktivitas-aktivitas perawatan dan peningkatan keamanan, dan meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kota. Berikut penjelasan dari komponen *smart city* yang menjadi pendukung dalam mewujudkan kota pintar.

1. **Smart Environment (Lingkungan Cerdas).** Keberlanjutan dan sumber daya, lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar.
2. **Smart Economy (Ekonomi Cerdas).** kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/moda.
3. **Smart Governance (Pemerintahan yang Cerdas).** Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

LAPORAN AKHIR

yang mengindahkan berbagai prinsip ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan berdaya saing.

4. **Smart Branding (Pencitraan Cerdas).** *Smart Branding* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.
5. **Smart People (Masyarakat Cerdas).** Kreativitas dan modal sosial, pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal usaha (*human capital*), maupun modal sosial (*social capital*). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya.
6. **Smart Living (Kualitas Hidup).** Kualitas hidup bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.

Konsep dasar dari hasil pengukuran indeks kepuasan layanan infrastruktur dapat diasumsikan bahwa apabila tingginya indeks kepuasan layanan infrastruktur dapat mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik. Maka dari itu, bagaimana kinerja saat ini dan bagaimana kondisi yang diharapkan oleh masyarakat pengguna infrastruktur merupakan umpan balik yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Selain itu, dari adanya pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan beberapa dampak seperti mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Gresik, menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik, menurunkan jumlah pengangguran di Kabupaten Gresik, meningkatkan nilai investasi daerah di Kabupaten Gresik, dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Gresik.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik juga membutuhkan perencanaan yang detail dalam penyusunan program dan anggaran. Hal ini membantu mendorong proses

LAPORAN AKHIR

pemerataan infrastruktur di Kabupaten Gresik agar lebih optimal, ideal, efektif, dan efisien. Untuk menjaga keseimbangan antar wilayah. Maka, Pemerataan infrastruktur terutama bagi wilayah yang tertinggal sangat dibutuhkan. Dengan mengacu pada dokumen-dokumen pemerintah, terutama terkait arahan kebijakan dan rencana strategis infrastruktur dengan menganalisis/menyesuaikan kondisi eksisting wilayah tersebut.

5.7 KONSEP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Strategi peningkatan kepuasan layanan infrastruktur dilakukan untuk dapat mengetahui apa rekomendasi atau masukan yang bisa diterapkan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan menyusun program/kegiatan tahun selanjutnya. Strategi peningkatan kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik didapatkan dari hasil analisis SWOT dan IFAS EFAS yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan penjabaran dari masing-masing strategi peningkatan kepuasan layanan infrastruktur:

5.7.1 Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan dan jembatan merupakan penghubung suatu daerah dengan daerah lainnya. Dengan adanya penghubung tersebut maka aktivitas dari tiap manusia dan barang juga akan semakin tinggi. Maka dari itu, dalam perkembangannya pelayanan jaringan jalan dan jembatan tidak hanya sebatas kuantitas namun juga kualitas serta kelengkapan sarana pendukungnya (BPPD, 2021). Strategi dalam pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan di Kabupaten Gresik mengacu pada PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 84 butir tiga (3), program penanganan jalan didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:

1) Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi, dimana:

- a) Pemeliharaan rutin jalan merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
- b) Pemeliharaan berkala jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

LAPORAN AKHIR

- c) Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

2) Peningkatan Jalan

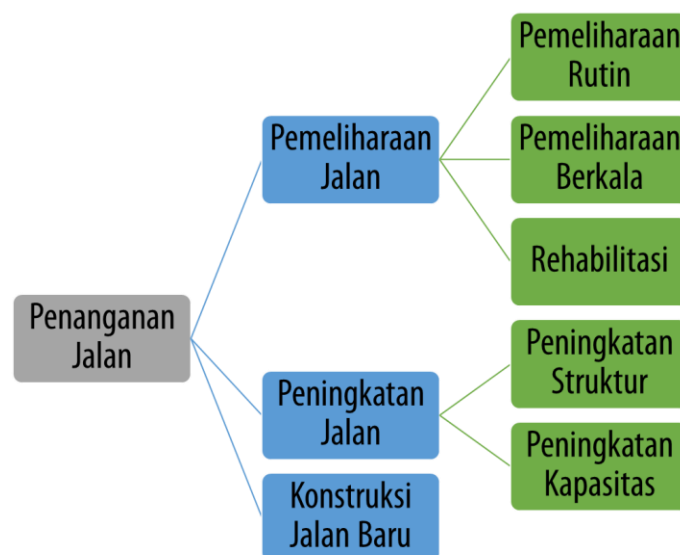
Peningkatan jalan meliputi peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas, dimana:

- a) Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- b) Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.

3) Konstruksi Jalan Baru

Konstruksi jalan baru merupakan penanganan jalan dari kondisi belum tersedia badan jalan sampai kondisi jalan dapat berfungsi.

Dengan mengacu pada PP 34/2006 tersebut, maka klasifikasi jenis penanganan jalan di Indonesia dapat diringkas seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 5. 24 Program Penanganan Jalan

Sumber: PP 34/2006 tentang Jalan

5.7.2 Infrastruktur Transportasi Darat

Transportasi merupakan penghubung serta menjadi aspek penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menunjang perekonomian yang telah berkembang. Transportasi

LAPORAN AKHIR

menjadi backbone dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang, mulai dari sektor ekonomi, hingga perekat wilayah nusantara dan merajut keberagaman identitas. Transportasi digunakan untuk dapat memudahkan penduduk untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Adapun strategi dalam pengembangan infrastruktur transportasi darat di Kabupaten Gresik adalah melalui optimalisasi trayek angkutan umum dan peningkatan kualitas serta pelayanan terminal. Strategi dalam peningkatan kualitas serta pelayanan terminal di Kabupaten Gresik meliputi:

1. Penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal sesuai dengan standar berdasarkan Peraturan Menteri No 40 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri No 24 Tahun 2021.
2. Melakukan penyesuaian dan penataan pada tata letak fasilitas penunjang yang ada di terminal.
3. Melakukan penataan pada pengaturan sirkulasi angkutan dan kendaraan pribadi berupa pemisahan jalur antara jalur keberangkatan angkutan umum dengan kendaraan yang akan masuk kedalam terminal.
4. Penerapan integrasi moda sebagai fleksibilitas bagi penumpang yang ingin melakukan transfer antara rute dan moda transportasi. Selain itu, mempermudah dalam mengakses sistem dan menciptakan jaringan transportasi yang komprehensif untuk menjaring penumpang.

5.7.3 Infrastruktur Air Bersih

Pemenuhan hak atas air bersih bagi masyarakat Kabupaten Gresik harus selalu diupayakan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pengembangan wilayah industri. Ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh rakyat dan menyangkut kualitas kehidupan rumah tangga.

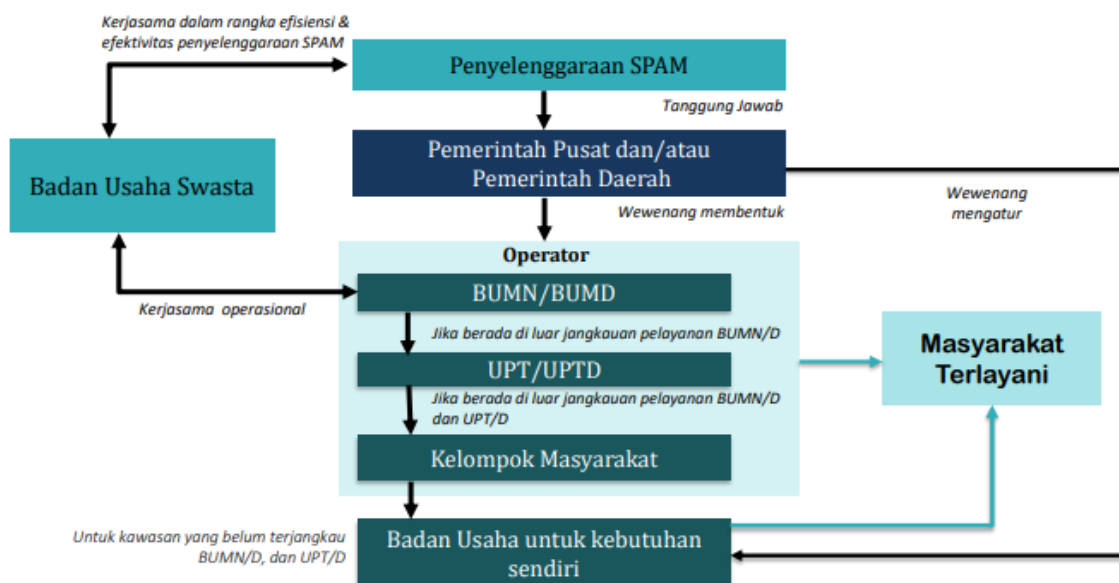
Strategi dalam pemerataan penyediaan air bersih di Kabupaten Gresik adalah melalui optimalisasi penyediaan air bersih berdasarkan prinsip penyelenggaraan SPAM. Pemerintah bersama *stakeholder* terkait dapat memberikan penyuluhan serta pendampingan kepada masyarakat terutama masyarakat dengan pendidikan rendah mengenai air bersih sebagai standar minimum untuk konsumsi dan penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu,

LAPORAN AKHIR

pemerintah dan masyarakat mampu berkontribusi dan bersinergi menjadi satu untuk mewujudkan target yang sudah ditentukan.

Pengelolaan prasarana dan sarana air minum berbasis masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga dapat diterima masyarakat (*acceptable*).
2. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat (*transparent*). Pengelolaan sistem pelaporan yang baik dan benar serta penyampaian tepat waktu merupakan salah satu penilaian keberlanjutan pengelolaan prasarana dan sarana air minum komunal.
3. Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
4. Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*).



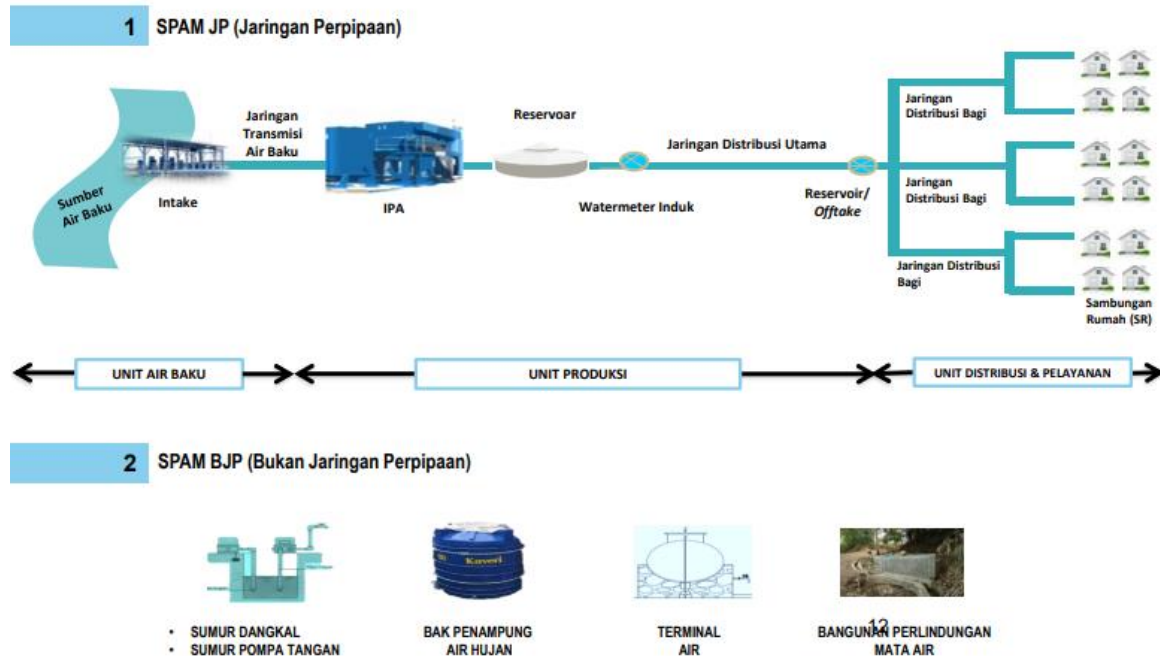
Gambar 5. 25 Penyelenggaraan SPAM

Sumber: Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PDAM. Sedangkan Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah juga memiliki wewenang dalam membentuk operator yang terdiri dari BUMN/BUMD, UPT/UPTD, dan Kelompok Masyarakat yang paling bawah. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam mengatur badan usaha untuk kebutuhan sendiri, dimana badan usaha ini untuk kawasan yang belum

LAPORAN AKHIR

terjangkau BUMN/D dan UPT/D. dalam Penyelenggaraan SPAM, perlu melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dalam rangka efisiensi & efektivitas penyelenggaraan SPAM dan operasional. Tujuan sejati penyelenggaraan SPAM yaitu agar masyarakat terlayani kebutuhan air bersih.

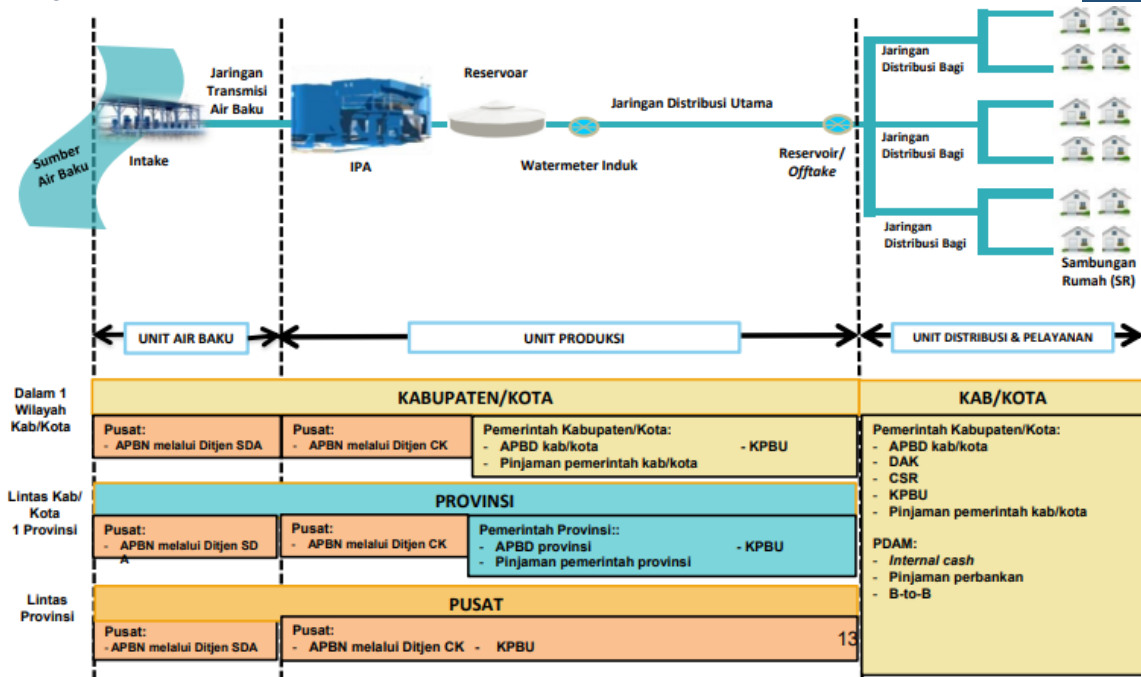


Gambar 5. 26 Skema Pengembangan SPAM

Sumber: Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

Gambar diatas menunjukkan skema pengembangan SPAM, dimana pada SPAM JP (Jaringan Perpipaan) bersumber dari air baku yang kemudian diproses seperti urutan tiga pemrosesan, yaitu unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi & pelayanan. **Unit air baku:** intake, jaringan transmisi air baku. **Unit produksi:** IPA, reservoir, watermeter induk, jaringan distribusi utama, reservoir/offtake. **Unit distribusi & pelayanan:** disalurkan melalui jaringan ke sambungan rumah penduduk. Kemudian pada skema SPAM BJP (Bukan Jaringan Perpipaan) dilakukan dengan menggunakan sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampung air hujan, terminal air, dan bangunan perlindungan mata air.

LAPORAN AKHIR



Gambar 5. 27 Skema Pembiayaan SPAM

Sumber: Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

Skema pembiayaan SPAM diatas yaitu SPAM JP (Jaringan Perpipaan) yang pembiayaan pada tahap unit air baku seluruh wilayah dibiayai oleh Pusat APBN melalui Ditjen SDA. Pada tahap unit produksi seluruh wilayah yang dibiayai pusat oleh APBN melalui Ditjen CK dan pusat juga melalui KPBU. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota oleh APBD Kab/kota, pinjaman pemerintah kab/kota, KPBU. Pemerintah provinsi melalui APBD provinsi, pinjaman pemerintah provinsi. Kemudian, pada tahap unit distribusi & pelayanan pemerintah kab/kota pembiayaan melalui APBD kab/kota, DAK, CSR, KPBU, dan pinjaman pemerintah kab/kota. Untuk PDAM melalui *internal cash*, pinjaman perbankan, dan B-to-B.

5.7.4 Infrastruktur Jaringan Irigasi

Irigasi adalah Usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Infrastruktur jaringan irigasi merupakan infrastruktur yang dapat diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada para petani pada jangka waktu panjang. Dalam hal itu, diperlukan pengelolaan secara rutin yang dapat membuat jaringan irigasi dapat berfungsi secara optimal.

Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik guna menunjang peningkatan pendapatan petani.

LAPORAN AKHIR

Lembaga pengelolaan irigasi meliputi: Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya. Strategi dalam peningkatan penyediaan jaringan irigasi di Kabupaten Gresik meliputi:

1. penyediaan air irigasi. Air Irigasi pada umumnya disediakan untuk mengairi tanaman pada petak-petak tersier untuk mencapai hasil yang optimal namun dalam penyediaan perlu diperhatikan keperluan keperluan lainnya, pemukiman, peternakan, perikanan air tawar, industri dan pelestarian lingkungan hidup dalam suatu Daerah Irigasi
2. Pengembangan dan pengelolaan saluran irigasi yang terdapat di daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah, dimana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan dapat saling bekerjasama berdasarkan peraturan perundang - undangan.
3. Pengembangan dan pengelolaan saluran irigasi primer dan sekunder daerah dilaksanakan berdasarkan rencana umum nasional dan provinsi dan saluran irigasi tersier sesuai dengan rencana umum daerah dan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kualitas jaringan irigasi dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan. Pemeliharaan dan pengamanan guna menjamin kelestarian fungsi dan kondisi jaringan dan drainase beserta bangunan pelengkap.
5. Peningkatan kapasitas jaringan irigasi dengan melakukan normalisasi saluran irigasi secara berkala.

5.7.5 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur perumahan merupakan dasar dari fisik lingkungan dan menjadi fasilitas penunjang untuk pelayanan lingkungan serta menjadi bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan.

A. Persampahan

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang hasil aktifitas manusia maupun proses alam. Penanganan dan pengelolaan sampah akan semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi sampah. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah diberlakukan. Setiap

LAPORAN AKHIR

rumah tangga sebagai penghasil sampah tidak bisa lagi mengabaikan urusan sampahnya dengan alasan sudah membayar iuran kebersihan. Pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah dengan mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA saja, tetapi harus dilakukan secara tersusun dan terpadu agar Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan.

Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah di kawasan permukiman yang terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Peran aktif masyarakat atau individu dapat dimulai dengan melaksanakan perilaku positif dalam mengelola sampah seperti pengumpulan, pewadahan, pemilahan dan melakukan daur ulang sampah untuk mengurangi volume dan penyebaran sampah. Sehingga dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang diharapkan meningkatkan peran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah.

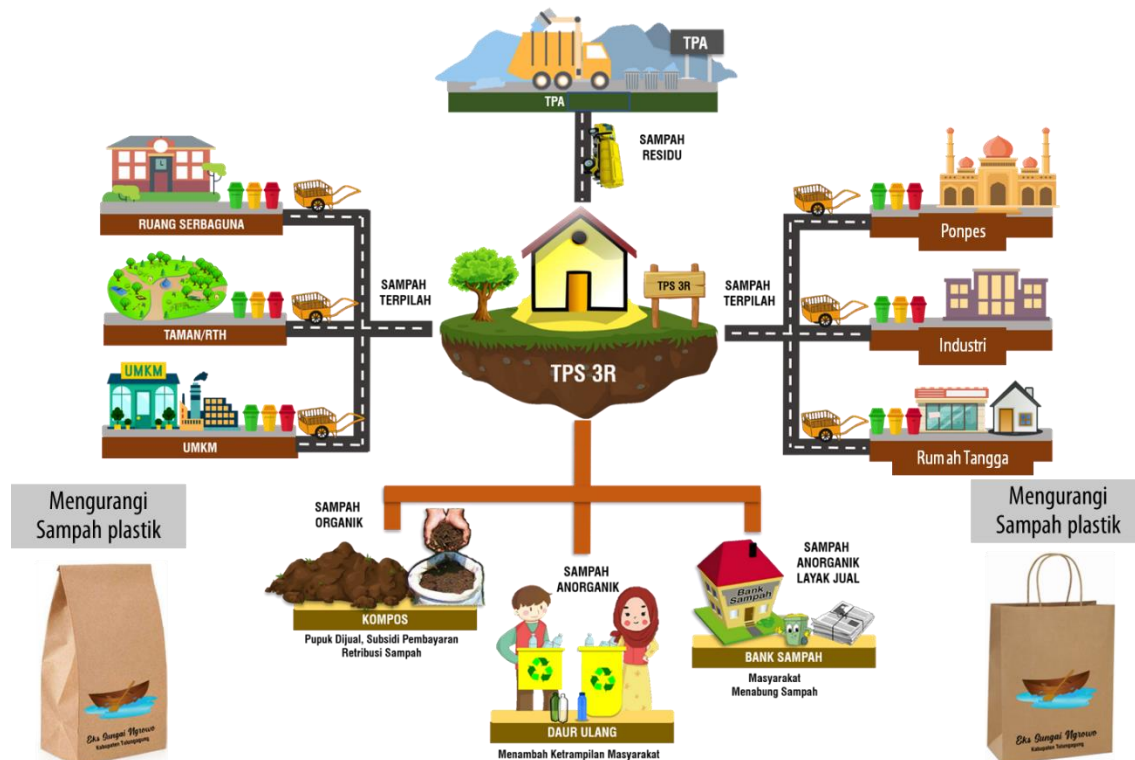
Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini mulai dari proses pewadahan dan pemilahan. Masyarakat diharapkan dalam melakukan pembuangan sampah dilakukan dengan cara terpilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yang berupa rumput, sayur-sayuran dll dilakukan pengolahan oleh masyarakat menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik berupa plastic, kaca, logam dll dilakukan pengolahan pada bank sampah. Sampah anorganik yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dilakukan penyetoran kepada bank sampah, kemudian di bank sampah dilakukan pengolahan. Pengolahan tersebut juga diharapkan untuk melibatkan masyarakat yang ada wilayah Kabupaten Gresik.

Adapun strategi dalam peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan tempat sampah di setiap rumah dan pewadahan komunal
2. Pembangunan TPS 3R dapat dimanfaatkan untuk penimbunan atau pembakaran sampah.

LAPORAN AKHIR

3. Pembangunan bank sampah.
4. Pengadaan program kegiatan composting dan biogas.
5. Pengadaan program 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant*).
6. Pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah



Gambar 5. 28 Konsep Dasar Pengelolaan Sampah

B. Sanitasi

Berdasarkan rencana keterpaduan infrastruktur wilayah pengembangan strategis, pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan sehingga memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah, akibat adanya kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah.

LAPORAN AKHIR

Strategi penanganan sistem pengelolaan limbah di Kabupaten Gresik adalah melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah berbasis masyarakat. Rencana arahan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di Kabupaten Gresik meliputi:

1. Pembangunan IPAL pada zona permukiman padat penduduk.
2. Peningkatan akses sistem pengelolaan limbah baik sistem on-site maupun offsite (terpusat) untuk memperbaiki kesehatan masyarakat.
3. Penyediaan MCK dan septic tank komunal, terutama pada pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, puskesmas, dan kantor kecamatan.
4. Sosialisasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan sistem jaringan air limbah dan pengelolaannya.

C. Jaringan Drainase

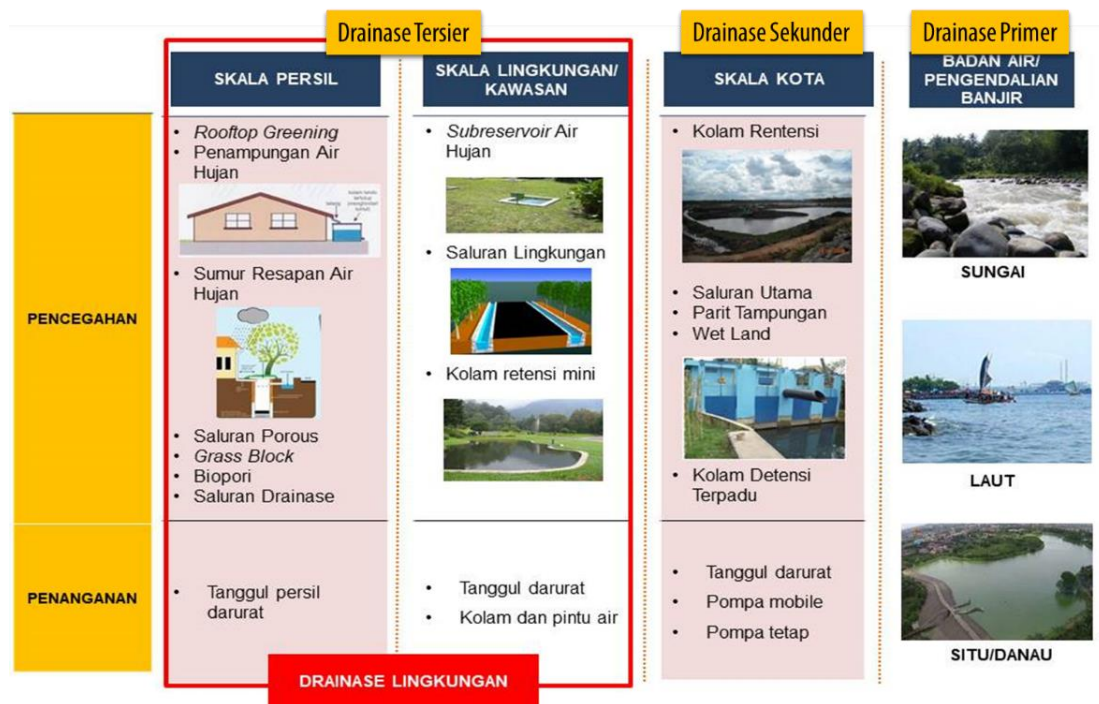
Perkembangan dan pertumbuhan kawasan perkotaan di Indonesia yang cukup pesat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang salah satunya adalah permasalahan drainase perkotaan yang semakin meningkat pula. Umumnya penanganan drainase di banyak kawasan perkotaan Indonesia masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase di kawasan perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai tahap perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai drainase kepada pihak yang terlibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Strategi dalam penanganan jaringan drainase di Kabupaten Gresik adalah melalui pemeliharaan dan peningkatan jaringan drainase. Upaya dalam pemeliharaan dan peningkatan jaringan drainase di Kabupaten Gresik meliputi:

1. Pelebaran atau peningkatan kualitas saluran drainase yang bertujuan untuk meningkatkan kembali kemampuan menampung air dari saluran yang sudah rusak atau dalam kondisi yang kurang baik.
2. Normalisasi saluran untuk saluran-saluran yang mengalami penyumbatan dan terdapat sampah sehingga aliran dapat kembali berjalan dengan normal.
3. Pembuatan area resapan air seperti sumur resapan untuk daerah yang memiliki ruang cukup banyak dan biopori untuk daerah yang memiliki ruang sedikit seperti di

LAPORAN AKHIR

perkotaan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan menjaga resapan air agar tidak beralih fungsi.



Gambar 5. 29 Konsep Pengembangan Jaringan Drainase

5.7.6 Infrastruktur Ruang Publik

A. Ruang Terbuka Hijau

Perencanaan tata ruang wilayah perkotaan berperan sangat penting dalam pembentukan ruang-ruang publik terutama RTH di perkotaan. Rencana tata ruang perkotaan secara ekologis dan planologis terlebih dahulu mempertimbangkan komponen-komponen RTH maupun ruang terbuka publik lainnya dalam pola pemanfaatan ruang kota. Secara hirarkis, struktur pelayanan tipikal kota dapat menggambarkan bentuk akomodasi ruang terbuka publik dalam perencanaan tata ruang di perkotaan. Strategi peningkatan RTH di Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang RTH
2. Meningkatkan kesadaran pengunjung untuk ikut memelihara RTH publik
3. Melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku ekonomi sekitar dalam pengembangan RTH
4. Meningkatkan kelancaran sirkulasi dan arus lalu lintas sekitar RTH

B. Jalur Pejalan Kaki

LAPORAN AKHIR

Keberadaan kebijakan bagi pejalan kaki di Indonesia termasuk di Kabupaten Gresik dinyatakan secara eksplisit dan khusus berupa dorongan bagi penyediaan fasilitasnya masih sangat minim. Meskipun ada, namun masih belum memperlihatkan integrasinya terhadap sistem jaringan transportasi secara keseluruhan. Perhatian yang masih minimal ini menyebabkan rendahnya investasi terhadap fasilitas yang dimaksud. Dengan demikian, secara tidak sengaja fasilitas pejalan kaki diletakkan di luar sistem transportasi, yang lebih mendorong pembangunan jaringan jalan untuk mengakomodasi permintaan berkendara yang semakin meningkat.

Strategi dalam peningkatan penyediaan jalur pejalan kaki di Kabupaten Gresik meliputi:

1. Melakukan penataan PKL yang menggunakan jalur pejalan kaki sebagai aktivitas berdagang.
2. Revitalisasi jalur pejalan kaki, dengan menghidupkan kembali jalur pejalan kaki yang kurang aktif.
3. Penyediaan fasilitas peninjang jalur pejalan kaki (penerangan umum, kursi, dll).
4. Melindungi area trotoar dengan bollard, bollard yang ada berfungsi untuk tempat senderan bagi pejalan kaki apabila menunggu menyeberang, dan untuk menghalau/menghalangi kendaraan yang akan naik atau masuk ke area trotoar.

Pemasangan *guiding block* (jalur difabel) yang ramah disabilitas, Keberadaan *guiding block* ini dapat membantu kaum disabilitas khususnya penyandang tunanetra untuk menuju ke suatu tempat.

BAB VI

KESIMPULAN & REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

Analisis Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Secara umum nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik sebesar 89,62. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik termasuk ke dalam mutu pelayanan A dan menunjukkan kinerja sangat baik. Secara rinci nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :
 - a. Infrastruktur jalan dan jembatan memiliki nilai indeks kepuasan sebesar 89,42 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat baik.
 - b. Infrastruktur transportasi darat memiliki nilai indeks kepuasan sebesar 90,31 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan transportasi darat di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat baik.
 - c. Infrastruktur air bersih memiliki nilai indeks kepuasan sebesar 86,55 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur air bersih di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat baik.

- d. Infrastruktur jaringan irigasi memiliki nilai indeks kepuasan sebesar 90,58 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur jaringan irigasi di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat baik.
 - e. Infrastruktur perumahan dan permukiman memiliki nilai indeks kepuasan sebesar 90,11 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat baik.
 - f. Infrastruktur ruang publik memiliki nilai indeks kepuasan sebesar 90,76 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur ruang publik di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat baik.
2. Nilai Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) Kabupaten Gresik

Nilai Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) Kabupaten Gresik sebesar 94,69. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik nilai Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) Kabupaten Gresik termasuk ke dalam mutu pelayanan A dan dikategorikan sangat penting. Secara rinci nilai Indeks Harapan Layanan Infrastruktur (IHLI) Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan memiliki nilai indeks harapan sebesar 95,35 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kepentingan pada pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat penting.
- b. Infrastruktur transportasi darat memiliki nilai indeks harapan sebesar 93,58 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kepentingan pada pelayanan transportasi darat di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat penting.
- c. Infrastruktur air bersih memiliki nilai indeks harapan sebesar 93,81 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kepentingan pada

pelayanan infrastrukturnya bersih di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat penting.

- d. Infrastruktur jaringan irigasi memiliki nilai indeks harapan sebesar 95,78 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kepentingan pada pelayanan infrastruktur jaringan irigasi di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat penting.
- e. Infrastruktur perumahan dan permukiman memiliki nilai indeks harapan sebesar 96,97 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kepentingan pada pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat penting.
- f. Infrastruktur ruang publik memiliki nilai indeks harapan sebesar 95,13 dengan mutu pelayanan A. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kepentingan pada pelayanan infrastruktur ruang publik di Kabupaten Gresik termasuk dalam klasifikasi sangat penting.

6.2 REKOMENDASI

Rekomendasi peningkatan kepuasan layanan infrastruktur di Kabupaten Gresik didapatkan dari hasil analisis SWOT dan IFAS EFAS yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan penjabaran dari masing-masing strategi peningkatan kepuasan layanan infrastruktur:

A. Infrastruktur jalan dan jembatan

Rekomendasi strategi dalam pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan di Kabupaten Gresik terdiri dari:

1. Pemeliharaan Jalan, meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi
2. Peningkatan Jalan, meliputi peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas
3. Konstruksi Jalan Baru

B. Transportasi darat

Rekomendasi strategi dalam peningkatan kualitas serta pelayanan terminal di Kabupaten Gresik meliputi:

LAPORAN AKHIR

1. Penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal sesuai dengan standar berdasarkan Peraturan Menteri No 40 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri No 24 Tahun 2021.
2. Melakukan penyesuaian dan penataan pada tata letak fasilitas penunjang yang ada di terminal.
3. Melakukan penataan pada pengaturan sirkulasi angkutan dan kendaraan pribadi berupa pemisahan jalur antara jalur keberangkatan angkutan umum dengan kendaraan yang akan masuk kedalam terminal.
4. Penerapan integrasi moda sebagai fleksibilitas bagi penumpang yang ingin melakukan transfer antara rute dan moda transportasi. Selain itu, mempermudah dalam mengakses sistem dan menciptakan jaringan transportasi yang komprehensif untuk menjaring penumpang.

C. Air Bersih

Strategi dalam pemerataan penyediaan air bersih di Kabupaten Gresik adalah melalui optimalisasi penyediaan air bersih berdasarkan prinsip penyelenggaraan SPAM.

D. Jaringan Irigasi

Rekomendasi strategi dalam peningkatan penyediaan jaringan irigasi di Kabupaten Gresik meliputi:

1. penyediaan air irigasi.
2. Pengembangan dan pengelolaan saluran irigasi yang terdapat di daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah, dimana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan dapat saling bekerjasama berdasarkan peraturan perundang - undangan.
3. Pengembangan dan pengelolaan saluran irigasi primer dan sekunder daerah dilaksanakan berdasarkan rencana umum nasional dan provinsi dan saluran irigasi tersier sesuai dengan rencana umum daerah dan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kualitas jaringan irigasi dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan.

5. Peningkatan kapasitas jaringan irigasi dengan melakukan normalisasi saluran irigasi secara berkala.

E. Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Persampahan

Adapun strategi dalam peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a) Penyediaan tempat sampah di setiap rumah dan pewadahan komunal
- b) Pembangunan TPS 3R dapat dimanfaatkan untuk penimbunan atau pembakaran sampah.
- c) Pembangunan bank sampah.
- d) Pengadaan program kegiatan composting dan biogas.
- e) Pengadaan program 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant*).
- f) Pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah

2. Sanitasi

Strategi pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di Kabupaten Gresik meliputi:

- a) Pembangunan IPAL pada zona permukiman padat penduduk.
- b) Peningkatan akses sistem pengelolaan limbah baik sistem on-site maupun offsite (terpusat) untuk memperbaiki kesehatan masyarakat.
- c) Penyediaan MCK dan septic tank komunal, terutama pada pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, puskesmas, dan kantor kecamatan.
- d) Sosialisasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan sistem jaringan air limbah dan pengelolaannya.

3. Jaringan Drainase

Strategi dalam pemeliharaan dan peningkatan jaringan drainase di Kabupaten Gresik meliputi:

- a) Pelebaran atau peningkatan kualitas saluran drainase yang bertujuan untuk meningkatkan kembali kemampuan menampung air dari saluran yang sudah rusak atau dalam kondisi yang kurang baik.

- b) Normalisasi saluran untuk saluran-saluran yang mengalami penyumbatan dan terdapat sampah sehingga aliran dapat kembali berjalan dengan normal.
- c) Pembuatan area resapan air seperti sumur resapan untuk daerah yang memiliki ruang cukup banyak dan biopori untuk daerah yang memiliki ruang sedikit seperti di perkotaan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan menjaga resapan air agar tidak beralih fungsi.

F. Ruang Publik

1. Ruang Terbuka Hijau

Strategi peningkatan RTH di Kabupaten Gresik sebagai berikut:

- a) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang RTH
- b) Meningkatkan kesadaran pengunjung untuk ikut memelihara RTH publik
- c) Melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku ekonomi sekitar dalam pengembangan RTH
- d) Meningkatkan kelancaran sirkulasi dan arus lalu lintas sekitar RTH

2. Jalur Pejalan Kaki

Strategi dalam peningkatan penyediaan jalur pejalan kaki di Kabupaten Gresik meliputi:

- a) Melakukan penataan PKL yang menggunakan jalur pejalan kaki sebagai aktivitas berdagang.
- b) Revitalisasi jalur pejalan kaki, dengan menghidupkan kembali jalur pejalan kaki yang kurang aktif.
- c) Penyediaan fasilitas penunjang jalur pejalan kaki (penerangan umum, kursi, dll).
- d) Melindungi area trotoar dengan bollard, bollard yang ada berfungsi untuk tempat senderan bagi pejalan kaki apabila menunggu menyeberang, dan untuk menghalau/ menghalangi kendaraan yang akan naik atau masuk ke area trotoar.
- e) Pemasangan *guiding block* (jalur difabel) yang ramah disabilitas, Keberadaan *guiding block* ini dapat membantu kaum disabilitas khususnya penyandang tunanetra untuk menuju ke suatu tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Wibowo, & Mangasa, R. (2016). Kebutuhan Pengembangan Standar Nasional Indonesia Fasilitas Taman Kota. *Jurnal Standardisasi*, 18, 161–170.
- Asmorowati, E. T., Rahmawati, A., Sarasanty, D., Kurniawan, A. A., Rudiyanto, M. A., Nadya, E., Nugroho, M. W., & Findia. (2021). Drainase Perkotaan. *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*, 161.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2024*. Katalog No. 1102001.3512. BPS: Kabupaten Gresik.
- Belantai, N. B., Nagari, D. A. N., Koto, K., Tarusan, X. I., & Pesisir, K. (2016). *Pemodelan bangkitan perjalanan di nagari siguntur, nagari barung-barung belantai dan nagari nanggalo kecamatan koto xi tarusan kabupaten pesisir selatan*. 77–82.
- Grigg, Neil. (1998). *Infrastructure Engineering And Management*. New York: John Wiley and Sons.
- Hasan. M Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia; Bogor.
- Kalensun, H., Kawet, L., & Halim, F. (2016). Perencanaan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih di Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan. *Jurnal Sipil Statik*, 4(2), 105–115.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga. (2022). No. 01/P/BM/2022 Pedoman Pemeriksaan Jembatan. Jakarta.
- Kenastri. (2007). “Perumusan Strategi Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur Skala Besar”, Tesis Pasca Sarjana IPB.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor*

LAPORAN AKHIR

41/PRT/M/2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan. Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum. (2007). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*. Jakarta.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*. Jakarta.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek*. Jakarta.

Manheim, M. L. (1979). *Fundamentals of Transportation Systems Analysis, Volume I: Basic Concepts*. Massachusetts: The MIT Press Cambridge.

Morlok, E.K. (1995). *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, 085147, 1–124*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*.

Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta.

Sirait, K. J. M., Naibaho, P. D. R., & Aritonang, E. R. (2018). Kajian Tentang Jalur Pedestrian Berdasarkan Aspek Kenyamanan. *Jurnal Arsitektur ALUR*, 1(2), 11–21.

LAPORAN AKHIR

- SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah. (2002). Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. *ACM SIGGRAPH 2010 Papers on - SIGGRAPH '10*, ICS 27.180.
- Standar Nasional Indonesia. (2004). SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. *Badan Standardisasi Nasional*, 1–58.
- Sulistiyani Eka Lestari, S. (2022). Pelayanan Bus Patas dan Ekonomi Pada Trayek Antar Kota. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 24(1), 51–61.
- Tambunan, J. M., Hutajulu, A. G., & Husada, H. (2020). Perancangan Dan Penataan Penerangan Jalan Umum Dengan Aplikasi Dialux evo 8.2 Di Jalan Depok Cilodong. *Energi & Kelistrikan*, 12(2), 111–120.
- Tumewu, D., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (2021). Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.